



**BRIN**

BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



Editor:

Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati

# Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun: *Perspektif Gender*

Buku ini tidak diperjualbelikan.



# **Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun: *Perspektif Gender***

---

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tersedia untuk diunduh secara gratis: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Editor:  
Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati

# Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun: *Perspektif Gender*

PENERBIT BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2023 Agustina Kustulasari, Longgina Novadona Bayo, Kurniawati Hastuti Dewi, & Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun: Perspektif Gender/Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati (Ed.)—Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

xvii hlm. + 184 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-8372-01-0 (*e-book*)

- |             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1. Gender   | 2. Ekonomi Kreatif      |
| 3. Industri | 4. Kebijakan Pemerintah |

305.3

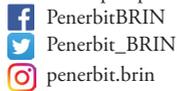
*Copy editor* : Emsa Ayudia Putri  
*Proofreader* : Ayu Tya Farany & Novia Stuti Putri Indrasari  
Penata isi : Donna Ayu Savanti  
Desainer sampul : Meita Safitri

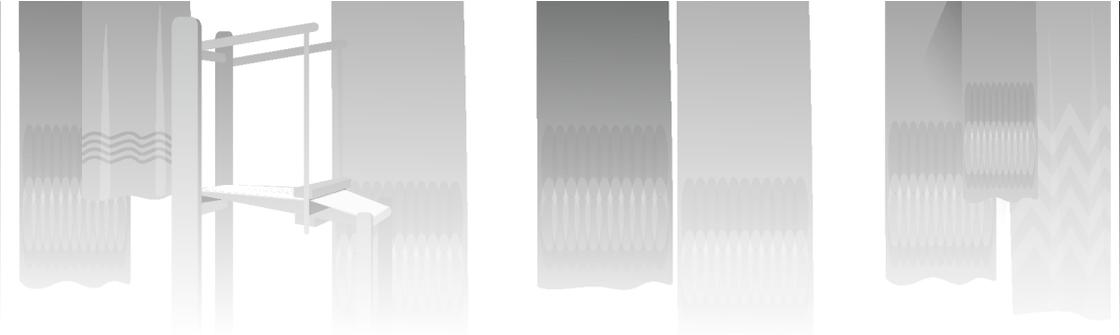
Cetakan pertama : September 2023



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL

Diterbitkan oleh:  
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi  
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: +62 811-1064-6770  
*E-mail*: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
*Website*: <https://penerbit.brin.go.id/>





# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR PENERBIT .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 KONTEKS EKONOMI KREATIF TENUN DAN PERAN PEREMPUAN DI INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
<i>Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati &amp; Agustina Kustulasari</i>	
<b>BAB 2 REGULASI DI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BARAT .....</b>	<b>35</b>
<i>Agustina Kustulasari</i>	
<b>BAB 3 GENDER DALAM EKONOMI KREATIF TENUN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT .....</b>	<b>57</b>
<i>Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati</i>	
<b>BAB 4 MEMAHAMI DINAMIKA GENDER DALAM EKONOMI KREATIF TENUN DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....</b>	<b>91</b>
<i>Longgina Novadona Bayo</i>	

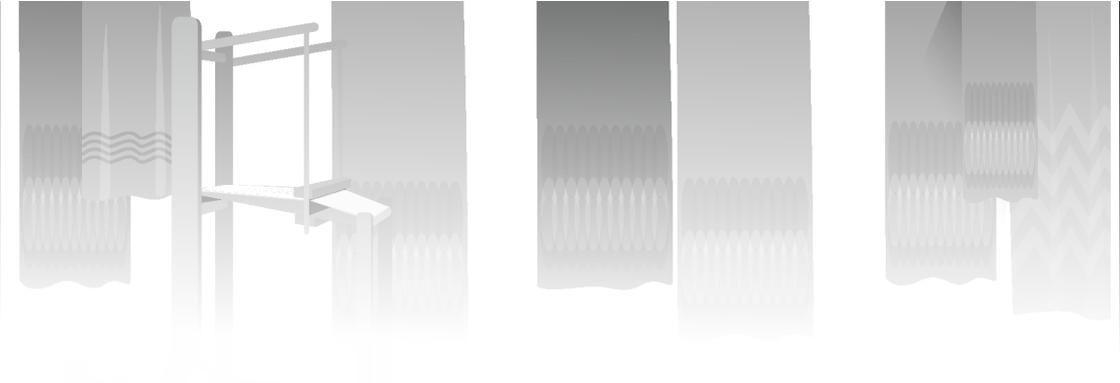
**BAB 5 NARASI PEREMPUAN DALAM EKONOMI  
KREATIF KAIN TENUN DI KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR DAN KOTA KUPANG.....119**

*Kurniawati Hastuti Dewi*

**BAB 6 Mencari Arah Kebijakan  
Ekonomi Kreatif Tenun di Indonesia:  
Antara Pelestarian Tradisi dan  
Komersialisasi Budaya .....151**

*Longgina Novadona Bayo*

**TENTANG EDITOR.....159**  
**TENTANG PENULIS.....161**  
**INDEKS .....165**



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Kerangka Analisis Moser.....	26
---	----

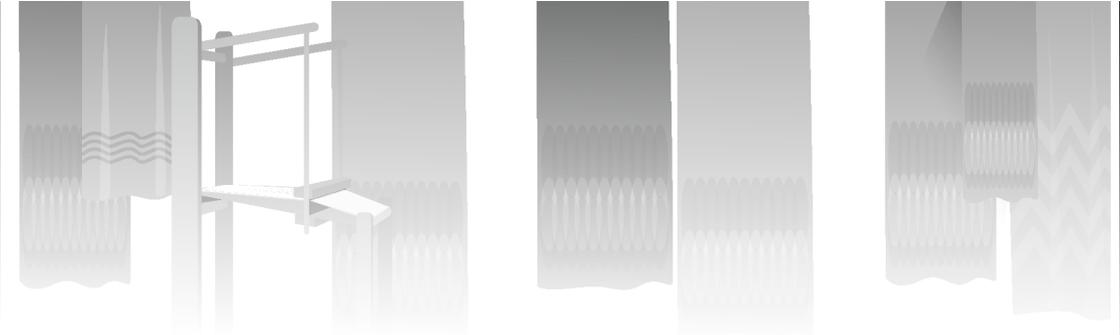


Buku ini tidak diperjualbelikan.

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai Tambah Subsektor Industri Kreatif terhadap PDB Nasional .....	5
Tabel 1.2	<i>Non-Governmental Organization</i> (NGO) Pendamping dan Dampingan .....	8
Tabel 1.3	Ringkasan Sistem Ekonomi Kreatif .....	10
Tabel 1.4	Contoh Penggunaan <i>MGP Framework Tool</i> .....	23
Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT dan NTB .....	38
Tabel 2.2	Persentase Penduduk Perempuan di Bawah Garis Kemiskinan .....	39
Tabel 2.3	Skala Pengukuran Responsivitas Kebijakan .....	46
Tabel 2.4	Penggunaan Istilah Ekonomi dan Industri Kreatif dalam Dokumen Terkait .....	50
Tabel 3.1	Indikator Perusahaan/Usaha Industri Formal Menurut Cabang Industri di Kabupaten Lombok Timur 2016 .....	62
Tabel 3.2	Perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur 2011–2016 .....	63
Tabel 3.3	Tabel Lanjutan Perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur 2011–2016 .....	64

Tabel 4.1	Corak Kain Tenun dari Daerah-Daerah di NTT .....	95
Tabel 4.2	Kelompok Penenun Formal Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Provinsi NTT .....	102
Tabel 4.3	Temuan Terhadap Dinamika Gender dalam Kebijakan Pengembangan Tenun di NTT .....	104



# PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku berjudul *Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun: Perspektif Gender* merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya yang berjudul *Gender dalam Praktik Regulasi Tenun* yang telah diterbitkan oleh Litera Publishing pada tahun 2020. Penerbitan kembali oleh Penerbit BRIN menerapkan akses terbuka agar buku ini dapat dimanfaatkan secara lebih mudah oleh masyarakat luas.

Secara umum, buku ini membahas kain tenun sebagai salah satu komoditas utama yang selalu dilirik di pasar internasional. Selain batik, kain tenun menjadi sorotan dunia karena kecantikan dan keunikannya. Sebagai contohnya, kain tenun ikat yang ada di NTB dan NTT mempunyai ciri khas dan nilai ekonomi yang tinggi.

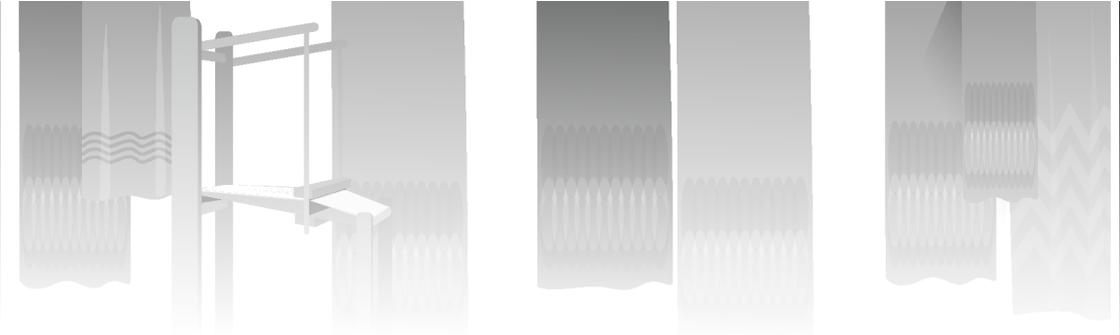
Berdasarkan data Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) tahun 2017, jumlah perempuan sebagai penenun lebih banyak ditemui di daerah NTB dan NTT jika dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dimensi penguatan nilai dan identitas

kultural berperan dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia dan dalam konteks inilah perempuan berkontribusi signifikan dalam industri kreatif, khususnya industri kreatif fesyen tenun.

Industri kreatif fesyen yang berbasis kain tenun ikat lebih banyak berbentuk industri kecil dan menengah sehingga membutuhkan banyak dukungan dari daerah setempat. Penambahan peran perempuan dalam industri ini, selain peran yang telah dijalannya, dikhawatirkan akan memberatkan. Pembahasan dan pertimbangan pengambilan arah kebijakan tersebut dirangkum dalam buku ini.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat memperkaya pengetahuan masyarakat dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian bertema sejenis agar tetap bertahan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

**Penerbit BRIN**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua sehingga hasil penelitian hibah *triple-helix* ini dapat diterbitkan dan siap dibagikan kepada komunitas akademik dan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih saya ucapkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada atas dukungan berupa pemberian hibah *triple-helix* untuk penelitian ini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pusat Riset Politik - Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), dan ASEAN Studies Center UGM (ASC UGM) yang telah bersedia melakukan kolaborasi dalam penelitian ini. Saya berharap kolaborasi ini dapat membawa ASC UGM, Pusat Riset Politik BRIN, dan ASPPUK untuk terus menyelaraskan visi dan bahu-membahu dalam berkarya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh narasumber serta pihak-pihak lain yang telah mendukung agenda penelitian pengabdian masyarakat ini.

Penelitian ini berangkat dari semangat dan visi ASC UGM untuk menghasilkan penelitian ilmiah yang mampu meningkatkan posisi dan kapasitas institusi lokal di Indonesia dalam mengambil momentum regionalisasi ASEAN. Mengangkat tema besar *Gendering ASEAN Economic Community*, penelitian ini melakukan analisis kebijakan berperspektif gender dengan studi kritis terhadap implementasi

kebijakan industri kreatif tenun berbasis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya meyakini bahwa hasil dari penelitian ini akan memberi sudut pandang baru bagi masyarakat dan dapat menjadi masukan kebijakan bagi pihak-pihak terkait demi terwujudnya Indonesia yang inklusif bagi seluruh gender untuk terus berkarya dan memiliki daya tawar di tingkat ASEAN.

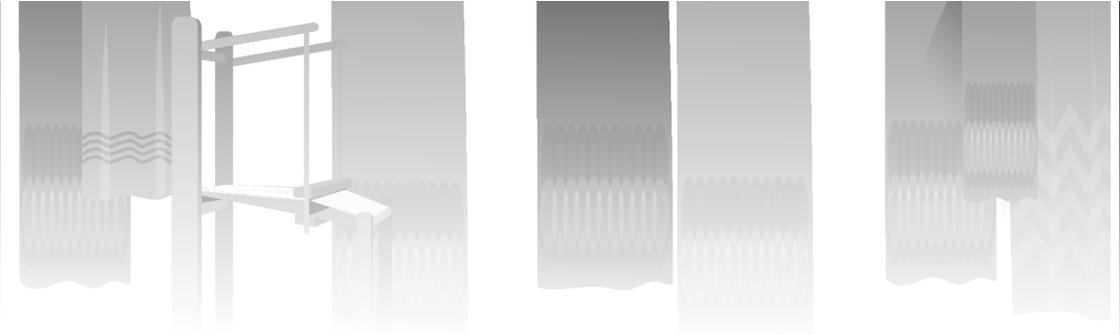
Dengan slogan *Bringing ASEAN Closer to You*, saya bersama rekan-rekan ASC UGM berharap hasil penelitian ini dapat membuat isu-isu krusial di ASEAN menjadi lebih dekat dengan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan perspektif baru bagi pembaca sekalian. Selamat membaca!

Terima kasih.

Yogyakarta, 23 Maret 2021

**Dr. Dafri Agussalim, M.A.**

Direktur Eksekutif ASEAN Studies Center  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada



# PRAKATA

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan isu strategis dalam rangka meningkatkan persaingan dalam dunia industri global. Selain meningkatkan PDB nasional, produk ekonomi kreatif menjadi sarana bagi penguatan nilai dan identitas budaya bangsa. Ini menjadi salah satu kekuatan strategis Indonesia dalam meningkatkan daya tawar di tingkat global. Salah satu produk ekonomi kreatif yang diminati pasar internasional sekaligus menjaga warisan budaya adalah kain tenun. Meskipun demikian, dimensi penguatan nilai dan identitas kultural melalui produk ekonomi kreatif kain tenun ini belum secara serius menjadi agenda pemerintah. Maka dari itu, buku yang berorientasi pada diseminasi pengetahuan ini berusaha untuk mengantisipasi persoalan ekonomi kreatif yang semakin berkembang. Buku ini mengulas kebijakan-kebijakan dalam ekonomi kreatif fesyen berbasis tenun di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) karena sektor ekonomi kreatif fesyen berbasis tenun ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Apalagi kebijakan yang memihak kaum perempuan sebagai pekerjanya. Hal tersebut seiring dengan beberapa kajian yang menyatakan bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan responsif gender yang mendukung perempuan untuk bekerja di sektor ekonomi kreatif dalam industri kecil dan menengah.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, buku ini memaparkan dua hal. *Pertama*, melakukan analisis gender terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam ekonomi kreatif tenun. *Kedua*, menawarkan kebijakan dalam ekonomi kreatif tenun yang berperspektif gender dalam konteks industri fesyen tenun di NTB dan NTT. Sementara itu, tujuan buku ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi kreatif fesyen yang berbasis pada kain tenun; melakukan analisis berbasis gender terhadap kebijakan pemerintah daerah ekonomi kreatif fesyen yang berbasis pada kain tenun; mengidentifikasi strategi pengembangan ekonomi kreatif fesyen yang berbasis pada kain tenun; dan merumuskan usulan strategi alternatif pengembangan dan kebijakan ekonomi kreatif yang memadai untuk merealisasikan kemajuan bidang fesyen yang berbasis pada kain tenun di Kabupaten Lombok Timur, NTB dan Kota Kupang, NTT.

Buku ini awalnya merupakan hasil penelitian yang melibatkan kemitraan ASEAN Studies Center-Universitas Gadjah Mada (ASC UGM) yang mewakili akademisi, berkolaborasi dengan Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mewakili institusi pemerintah, dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) sebagai perwakilan industri. Penelitian ini merupakan Hibah Riset *Triple Helix* dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Buku ini sebelumnya berjudul "Gender dalam Praktik Regulasi Tenun" dan diterbitkan oleh Litera Publishing (CV Lingkar Tema Respublika) tahun 2020. Kemudian, dengan pertimbangan isu yang menarik dan akan berguna bagi masyarakat luas maka tim penulis memutuskan mengikutsertakan dalam seleksi Akuisisi Pengetahuan Lokal BRIN. Sebagaimana tahap akuisisi yang ditentukan BRIN, naskah buku juga mengalami penyesuaian dan *update* (meskipun minimal) dengan memperhatikan saran dan masukan dari penelaah luar yang telah ditentukan BRIN sehingga buku ini sebenarnya menjadi buku yang tidak bisa disamakan persis dengan buku yang sudah terbit lebih dahulu. Karena dari segi judul mengalami perubahan, kandungan isi juga mengalami perubahan dan juga pengayaan. Oleh karena itu, BRIN menerbitkan buku ini sebagai edisi revisi.

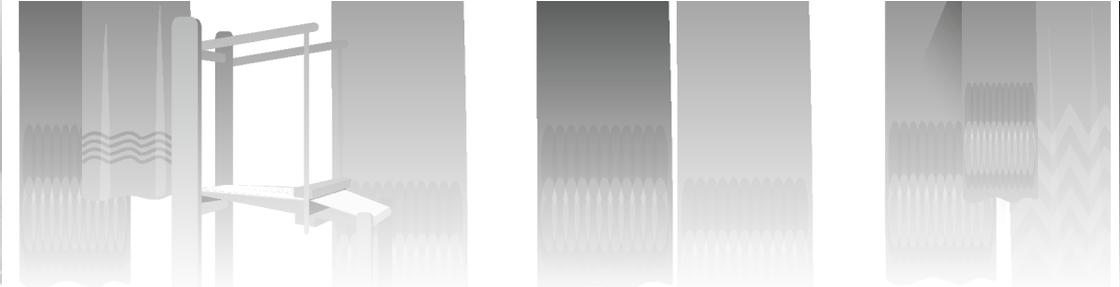
Tim penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak yang mendukung penerbitan buku ini dan terlibat dalam penulisan buku sebelumnya *Gender dalam Praktik Regulasi Tenun* mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu Eka Zuni Lusi Astuti, karena tanpa dukungannya buku edisi revisi ini tidak akan pernah ada.

Buku ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan ekonomi kreatif yang ramah gender. Harapannya buku ini menjadi *background study* bagi perumusan usulan strategi alternatif pengembangan ekonomi kreatif fesyen yang berbasis kain tenun di NTB dan NTT. Di samping itu, buku ini menghasilkan peta kesiapan, *best practices* dan *knowledge sharing*, baik bagi pemerintah daerah maupun NGO untuk pengembangan ekonomi kreatif fesyen berbasis kain tenun.

**Tim Penulis**



Buku ini tidak diperjualbelikan.



# BAB 1

## KONTEKS EKONOMI KREATIF TENUN DAN PERAN PEREMPUAN DI INDONESIA

*Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati &  
Agustina Kustulasari*

### **A. Ekonomi Kreatif di Indonesia**

Sejak dibentuk tahun 1967, ASEAN telah mengalami perkembangan yang luar biasa, bertransformasi menjadi kawasan ekonomi yang dinamis, terpadu dan diperhitungkan secara global. ASEAN kini telah menjadi entitas ekonomi terbesar ketiga dan menyumbang lebih dari 3% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Tahun 2015 menjadi kunci keterpaduan kawasan Asia Tenggara dengan diluncurkannya tiga bentuk komunitas ASEAN: Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial-Kebudayaan ASEAN. Di antara ketiganya, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nampaknya terus mendapat perhatian yang utama, seiring juga dengan semakin maraknya usaha untuk mendorong integrasi kawasan melalui Masyarakat Politik dan Keamanan serta Masyarakat Sosial dan Budaya. Pertumbuhan ekonomi sebagai pendorong pembangunan merupakan

---

©2023 P. R. N. Rimbawati, & A. Kustulasari  
Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: putrirakhmadhani@gmail.com

Rimbawati, P. R. N., & Kustulasari, A. (2023). Pendahuluan. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (1–34). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c669  
E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Buku ini tidak diperjualbelikan.

salah satu dari faktor yang memengaruhi popularitas MEA, di samping usaha pemerintah dan dukungan pelaku ekonomi global. Di tengah fenomena MEA ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menempati posisi yang strategis. Berdasarkan data Asian Development Bank, pada tahun 2020 terdapat 71 juta UMKM di ASEAN dan menyerap 67% tenaga kerja di kawasan ini (Tan, 2022). Kendati secara ukuran tergolong mikro dan menengah, 97% bisnis di ASEAN adalah UMKM (Tan, 2022). Hal ini menandai besarnya potensi UMKM di ASEAN. Beberapa hal berikut dapat menjelaskan pentingnya peran UMKM dalam MEA ini. *Pertama*, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp4.321,8 triliun atau 58,05%, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp4.869,5 triliun atau 59,08% dan terus mengalami peningkatan di tiap tahun (LPPI dan BI, 2015). *Kedua*, jumlah gabungan UMKM mencapai 52 juta (99% dari keseluruhan unit usaha). *Ketiga*, dengan jumlah unit semasih itu, UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Potensi UMKM di tingkat ASEAN dan Indonesia tersebut makin menguatkan posisi strategis UMKM dalam usaha meningkatkan persaingan dalam MEA.

Selama satu dekade terakhir, pemerintah nasional cukup gencar dalam mengembangkan industri kreatif di Indonesia. Keseriusan tersebut dapat dibaca dengan hadirnya instansi khusus di pusat yang mengurus ekonomi kreatif, mulai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga hadirnya Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf). Secara struktural, pengembangan ekonomi kreatif bagi pemerintah berarti ikut menjawab tantangan ekonomi jangka panjang dan jangka menengah. Ada beberapa rasionalitas yang melatarbelakanginya (Kementerian Perdagangan, 2008). *Pertama*, industri kreatif dinilai cukup strategis dalam mengurangi tingginya pengangguran (9%–10%) di Indonesia. Jumlah penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif sejak tahun 2003 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama tahun 2002–2008 jumlah tenaga kerja rata-rata yang terserap oleh industri kreatif sebanyak 7.391.642 orang per tahun. Data pada tahun 2010–2013 terjadi kenaikan yang cukup berarti, yakni jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri kreatif mencapai rata-rata

11.706.942 orang per tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif Indonesia rata-rata adalah 1,09% per tahun.

*Kedua*, industri kreatif dapat turut mengurangi tingginya tingkat kemiskinan (16%–17%). Data tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa industri kreatif memberikan kontribusi terhadap PDB nasional secara signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,28% atau setara dengan 104,6 triliun rupiah. Kondisi ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2010-2013 di mana kontribusi nilai tambah ekonomi kreatif terhadap total PDB (ADHB) rata-rata 7,13% atau nilai tambah ekonomi kreatif (ADHB) sebesar rata-rata 555.144 miliar. Hal ini menandakan bahwa sektor industri kreatif mengalami kenaikan kontribusi terhadap ekonomi nasional selama satu dekade terakhir, dan membantu pemerintah menekan laju kemiskinan.

*Ketiga*, industri kreatif berkontribusi dalam meningkatkan rendahnya daya saing industri di Indonesia. Dari perspektif ekonomi global, berkembangnya perdagangan internasional adalah dampak langsung dari ekonomi kreatif. Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2008, selama periode 2000–2007, perdagangan internasional barang dan jasa di industri ini tumbuh rata-rata 8,7% per tahun. Di negara-negara maju, kontribusi industri kreatif terhadap PDB negara menunjukkan peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Di Inggris, industri kreatif menyumbang 106 miliar poundsterling atau 5,6% dari perekonomian negara pada tahun 2022 (Scott, 2022) dan di Amerika Serikat industri ini memberikan kontribusi 11,12% (World Intellectual Property Organization, 2006). Di Indonesia, sejak tahun 2010–2013 industri kreatif memiliki kontribusi terhadap PDB nasional sebesar rata-rata 7,13% per tahunnya. Artinya, Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai potensi yang besar untuk mengembangkan industri kreatif dan bersaing dengan negara-negara maju lainnya yang sudah terlebih dahulu mengembangkan industri kreatifnya. Potensi pasar industri kreatif sangatlah besar, hampir 50% belanja masyarakat di negara-negara maju merupakan produk dan jasa kreatif (UNCTAD,

2008). Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia karena negara-negara maju tersebut, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Italia, dan Jepang merupakan negara-negara utama tujuan ekspor Indonesia. Selain itu, konteks regional ASEAN yang telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ikut memengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif supaya dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Beberapa studi telah memperlihatkan bahwa industri kreatif merupakan *fresh engine* bagi pertumbuhan ekonomi, instrumen bagi transformasi struktural, dan mekanisme untuk meningkatkan kompetisi antarbangsa, khususnya di antara bangsa-bangsa di ASEAN.

*Keempat*, industri kreatif ikut memberikan solusi bagi *global warming*, energi terbarukan, deforestasi, dan pengurangan emisi karbon, karena arah pengembangan industri kreatif ini akan menuju pola industri ramah lingkungan dan penciptaan nilai tambah produk yang berasal dari intelektualitas sumber daya insani Indonesia (Kementerian Perdagangan, 2008).

Melihat strategisnya industri kreatif di Indonesia, pemerintah sendiri telah mengategorisasikan 14 subsektor yang termasuk dalam industri kreatif. Dari ke-14 subsektor industri kreatif tersebut, industri fesyen adalah industri kreatif yang paling strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, industri fesyen merupakan industri kreatif yang paling besar menyumbangkan nilai ekspor tertinggi disusul dengan kerajinan di posisi kedua, dan kuliner di posisi ketiga. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2014), Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 menunjukkan data bahwa nilai ekspor produk fesyen mengalami peningkatan di tahun 2013, mencapai US\$10,97 miliar atau naik 4,4% dibandingkan 2012. Industri kreatif fesyen berhasil memberikan kontribusi mencapai Rp181 triliun, atau 7% terhadap total nilai 14 subsektor industri kreatif yang sebesar Rp642 triliun. Dalam hal ini, fesyen juga melampaui laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional di tahun 2013 yang hanya menyentuh 5,78% dengan menyumbang kontribusi 2% terhadap total pertumbuhan industri kreatif yang mencapai 6,4%.

Kedua, industri kreatif fesyen memberikan kontribusi pula terhadap penyerapan tenaga kerja. Industri kreatif fesyen menyerap hingga 3,2 juta dari total penyerapan tenaga kerja di bidang industri kreatif sebesar 11 juta (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2014). Kedua data itu mengindikasikan bahwa industri kreatif dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dalam jangka panjang.

Produktivitas sektor industri kreatif lebih tinggi dari keseluruhan produktivitas tenaga kerja nasional, karena ekonomi kreatif membawa segenap talenta, bakat, dan hasrat individu untuk menciptakan “nilai tambah” melalui hadirnya produk atau jasa kreatif. Data yang sedikit berbeda dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan nilai tambah subsektor industri kreatif terhadap PDB

**Tabel 1.1** Nilai Tambah Subsektor Industri Kreatif Terhadap PDB Nasional

No.	Subsektor Industri Kreatif	Nilai Tambah (Ribuan Rupiah)
1.	Periklanan	30.000.000.000
2.	Desain Fesyen	21.429.510.785
3.	Kerajinan	14.753.542.049
4.	Televisi dan Radio	7.818.000.000
5.	Arsitektur	7.473.834.000
6.	Musik	6.659.527.393
7.	Percetakan & Penerbitan	6.357.157.272
8.	Desain	2.411.822.987
9.	Pasar Seni & Barang Antik	2.000.000.000
10.	Jasa Komputer dan Peranti Lunak	1.379.000.000
11.	Film & Video	1.363.623.188
12.	Riset dan Pengembangan	1.335.278.280
13.	Hiburan Interaktif	900.000.000
14.	Seni Pertunjukan	500.000.000

Sumber: Kementerian Perdagangan (2008)

Nasional, desain fesyen masih menduduki peringkat kedua teratas dalam memberikan nilai tambah sebesar Rp21.420.510.785.000,00 di antara 14 subsektor industri kreatif seperti dalam Tabel 1.1.

Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa pada tahun 2017 komposisi terbanyak pekerja ekonomi kreatif adalah perempuan yang terpusat pada tiga sub utama, yang salah satunya adalah fesyen (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2019). Banyak studi mengatakan bahwa industri kreatif menyediakan platform guna mendukung keberlanjutan pemberdayaan perempuan (UNIDO, 2014). Di banyak komunitas di negara-negara di dunia, perempuanlah yang menjaga kekayaan nilai budaya dan desain-desain tradisional melalui industri kreatif. Untuk konteks Indonesia, perempuan memiliki peran sentral sebagai agen kebudayaan, penjaga nilai tradisi/budaya, hingga berkontribusi besar dalam menciptakan sekaligus mempertahankan serta melestarikan produk kebudayaan di masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari dominasi perempuan sebagai pekerja tenun di hampir seluruh pelosok Indonesia, baik di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Dalam masyarakat tradisional, menenun bukanlah pekerjaan yang bertujuan ekonomis (baca: profit), melainkan bekerja untuk tujuan kultural, menjaga tradisi, yang tidak dapat dinominalkan dalam bentuk rupiah.

Seorang wanita yang berbakat menenun dan dapat membuat karya tenun yang memukau juga dapat meningkatkan status sosial baik keluarganya maupun keluarga calon mempelai pria. Bahkan lebih dari posisi sosial berdasarkan kelahiran, gadis “berjari halus dan licin” dalam istilah mereka dapat mengubah seorang laki-laki menjadi pria yang disegani dan dihormati (Therik, 2012). Keterampilan menenun adalah tradisi budaya yang diwariskan dari ibu ke anak perempuan dan oleh karena itu menjadi hak istimewa perempuan. Dalam banyak tradisi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, seperti di NTT, NTB, dan beberapa kawasan Indonesia Timur lainnya, kain tenun memiliki arti penting dalam ritual-ritual adat.

Data BPS pada tahun 2011–2016 (Januari–Oktober) yang menggambarkan Ekspor 10 Komoditi Utama yang ada di Indonesia

menunjukkan perkembangan dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dibagi menjadi tiga klasifikasi (pakaian jadi, serat dan benang, serta kain). Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa kain tenun juga merupakan salah satu komoditas utama yang selalu dilirik di pasar internasional. Selain batik, masih banyak kain-kain, seperti kain tenun yang menjadi sorotan dunia karena kecantikan dan keunikannya. Contohnya, kain tenun yang ada di NTB dan NTT mempunyai kekhasan masing-masing dan nilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan data Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) tahun 2017, jumlah perempuan sebagai penenun lebih banyak ditemui di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) jika dibandingkan daerah lain di Indonesia (lihat Tabel 1.2). Kondisi ini mengindikasikan bahwa perempuan di kawasan Indonesia bagian timur bertumpu pada industri tenun. Maka dari itu, pengembangan industri kreatif fesyen di NTB dan NTT diarahkan untuk meningkatkan industri kreatif fesyen yang berbasis pada kain tenun ikat. Hal ini muncul karena NTB maupun NTT dikenal memiliki banyak kerajinan tenun tradisional yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, industri kreatif memainkan dua peran utama. Pertama, industri kreatif sebagai area penting bagi investasi pengetahuan ekonomi dan kedua, industri kreatif sebagai sarana bagi penguatan nilai dan identitas kultural (UNIDO, 2014). Dimensi penguatan nilai dan identitas kultural inilah yang kadang kala absen dalam diskursus pengembangan industri kreatif di Indonesia, padahal dalam konteks inilah perempuan berkontribusi signifikan dalam industri kreatif, khususnya terkait dengan industri kreatif fesyen. Hal ini dikarenakan industri kreatif yang terkait fesyen maupun kerajinan bergantung pada material/bahan baku lokal dan *indigenous designs*. Kondisi ini membuat banyak pengusaha yang berupaya untuk mengapitalisasi industri kreatif tersebut, padahal industri kreatif fesyen yang berbasis kain tenun ikat lebih banyak berbentuk industri kecil dan menengah (IKM) sehingga penting bagi pemerintah daerah setempat untuk melindungi IKM dari kapitalisasi pengusaha besar dalam industri kreatif fesyen

ini. Apalagi, industri kreatif tenun ikat yang berbentuk IKM banyak memperkerjakan kaum perempuan.

Oleh sebab itu, buku ini mengkaji kebijakan-kebijakan dalam industri kreatif fesyen berbasis tenun di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sektor industri kreatif fesyen berbasis tenun ikat belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dengan menerapkan kebijakan yang lebih berpihak pada

**Tabel 1.2** *Non-Governmental Organization (NGO) Pendamping dan Dampingan*<sup>1</sup>

No.	NGO Pendamping	Jumlah Dampingan	Kabupaten
1.	Pesada	165	Dairi, Sumatra Utara
2.	Soripada	155	Tarutung, Sumatra Utara
3.	LP2M	202	Tanah Datar dan Sawahlunto, Sumatra Barat
4.	Kemasda	50	Ogan Ilir, Sumatra Selatan
5.	Persepsi	155	Klaten, Jawa Tengah
6.	Gemawan	70	Sintang, Kalimantan Barat
7.	PRCF	111	Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
8.	KPPA	0	Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah
9.	Pancakarsa	216	Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
10.	LPSDM	676	Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
11.	YAO	449	Kota Kupang dan TTS, Nusa Tenggara Timur
	Total	2249	

Sumber: ASPPUK (2017)

<sup>1</sup> Tabel diolah dari hasil diskusi melalui surel dengan Direktur ASPPUK.

perempuan. Merujuk pada beberapa studi, pemerintah tidak memiliki kebijakan yang responsif gender untuk mendukung perempuan bekerja di sektor industri kreatif dalam industri kecil dan menengah (IKM) (UNIDO, 2014).

Industri kreatif di NTB telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 13 yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mendukung dengan memberi kemudahan dan insentif bagi para pelaku industri kreatif. Sedikit berbeda dengan Provinsi NTB, walaupun banyak pekerja perempuan sebagai perajin tenun di NTT, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kota di provinsi tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang berkenaan dengan pelestarian dan pengembangan tenun ikat. Keberadaan Perda ini penting dan dibutuhkan guna menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan komitmen yang jelas dalam pengembangan industri-industri budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Setiawan & Suwarningsyah, 2014). Penting bagi pemerintah NTT untuk bisa belajar (*horizontal learning*) dari pemerintah NTB dalam mengembangkan kebijakan industri kreatif tenun.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, berikut tiga hal yang akan dijelaskan dalam buku ini.

1. Melakukan analisis gender terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam industri kreatif tenun ikat.
2. Membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam industri kreatif tenun yang berperspektif gender.
3. Memberikan kontribusi untuk membangun konstruksi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang responsif gender melalui temuan-temuan di tingkat lokal.

Dengan demikian, diharapkan kebijakan pengembangan industri tenun di NTB dan NTT dapat memfasilitasi pemberdayaan ekonomi perempuan.

## B. Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Perempuan

### 1. Perkembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, dan hiburan. Ekonomi kreatif bersumber pada kegiatan ekonomi dari industri kreatif. Secara umum, industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual, seperti seni, film, permainan, atau desain fesyen, dan termasuk layanan kreatif antarperusahaan seperti iklan (Aufa & Mulyati, 2008).

**Tabel 1.3** Ringkasan Sistem Ekonomi Kreatif

Kreasi	Produksi	Distribusi dan Pasar
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengarang</li><li>• Pelukis</li><li>• Koki</li><li>• Pematung</li><li>• Fotografer</li><li>• Seniman</li><li>• Desainer Interior</li><li>• Arsitek Taman</li><li>• Desainer Grafis</li><li>• Arsitek</li><li>• Komposer</li><li>• Pengarang Lagu</li><li>• Musikus</li></ul>	<p><b>Hiburan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produksi Film &amp; Video</li><li>• Produksi Musik</li><li>• Seni Pertunjukan</li><li>• Permainan Komputer</li><li>• Radio &amp; TV</li></ul> <p><b>Perpustakaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rekaman Audio</li><li>• Buku-Koran</li><li>• Periodik</li></ul> <p><b>Seni Visual</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Artisan &amp; Kerajinan</li></ul> <p><b>Seni Kuliner</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengolahan Makanan</li><li>• Restoran-Katering</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Media</li><li>• Panggung Pertunjukan</li><li>• Pagelaran</li><li>• Festival</li><li>• Penjual Antara</li><li>• Ritel</li><li>• Perpustakaan &amp; Museum</li></ul>

Kreasi	Produksi	Distribusi dan Pasar
	<p><b>Desain</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain Grafis</li> <li>• Periklanan-Percetakan</li> </ul> <p><b>Warisan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barang Antik</li> <li>• Batik</li> <li>• Produksi Ornamen</li> </ul>	

Sumber: diolah dari Simatupang (2008)

Simatupang (2007) mengungkapkan beberapa karakteristik dalam ekonomi kreatif.

- Ekonomi kreatif merupakan sistem kegiatan lembaga dan manusia yang terlibat dalam produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, dan hiburan.
- Pelanggan mempunyai ikatan estetika, intelektual, dan emosional yang memberikan nilai terhadap produk kreatif di pasar.
- Mesin ekonomi kreatif adalah industri kreatif.

Ditinjau dari aspek peristilahan dalam ilmu manajemen dan psikologi, menurut Chris Bilton, kata “kreativitas” mengandung beberapa arti. *Pertama*, kreativitas berkaitan dengan sesuatu yang baru atau berbeda, atau “*a deviation from conventional tools and perspectives*”. *Kedua*, istilah tersebut berarti bahwa individu harus diberikan kebebasan untuk mengekspresikan bakat dan visi mereka (aspek manajemen) atau bahwa sesuatu yang baru tersebut harus bermanfaat bagi publik (aspek psikologi) (Bilton, 2007). Dikaitkan dengan topik pembicaraan di dalam tulisan ini, menurut John Howkins “*creativity is not in itself an economic good, but in its applications it can become so*” (Bilton, 2007). Chris Bilton beranggapan bahwa istilah Industri Kreatif (IK) bukan merupakan sesuatu yang bersifat universal karena sebenarnya merefleksikan tradisi kebudayaan Anglo-Amerika dalam pembuatan

kebijakan di bidang kebudayaan dan yang memandang HKI sebagai “*tradable economic goods*”. Jika melihat perkembangan di Eropa dalam kaitannya dengan IK, terdapat dua buah tradisi kebijakan yang berbeda di sektor kebudayaan. Pada awal tahun 1980-an, istilah yang sering digunakan adalah *cultural industry* (industri budaya). Istilah ini digunakan pada saat itu karena tujuan dari kebijakan *cultural democracy* (demokrasi budaya) yang dikembangkan adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam seni dan budaya dengan mempromosikan seni “modern” seperti musik populer sebagai “kebalikan” dari seni “berselera tinggi”, seperti opera, balet, dan musik klasik, yang menumbuhkan kelompok istimewa dalam masyarakat. Mereka memiliki pandangan bahwa: “*The cultural industries fitted with an ideological conviction that all social and cultural life could be framed in terms of economic transactions*”. Sektor budaya dikatakan memiliki unsur meritokratis (menawarkan penghargaan berdasarkan prestasi), tidak membutuhkan subsidi, mudah diakses dan menghibur (ringan), dan sangat cocok dengan semangat kewirausahaan “Eropa baru”. Akibatnya, dua aliran kebijakan terkoneksi karena di satu sisi, seperti yang ditunjukkan oleh pendapatan ekspor, data ketenagakerjaan, dan Produk Nasional Bruto. Hal-hal tersebut merupakan sumber keuntungan ekonomi. Di sisi lain, melalui lapangan kerja bagi kaum muda, regenerasi komunitas, program pelatihan dan pengembangan, serta proyek seni kolaboratif, hal-hal tersebut dipandang sebagai mekanisme inklusi sosial.

Akhirnya, frasa “industri budaya” berubah menjadi “industri kreatif”, yang menyoroti masalah bakat individu dan penciptaan kekayaan dan lapangan kerja. Alih-alih menekankan kolektivisme dan prinsip-prinsip sosial, frasa ini menekankan ciri-ciri individualisme dan hasil di bidang ekonomi (Bilton, 2007).

Selain itu, jika mencermati dari aspek sejarah, istilah “IK” pertama kali muncul di Australia pada tahun 1990-an bersamaan dengan rencana untuk melakukan perubahan yang signifikan terhadap proses justifikasi dan pendanaan untuk kebijakan yang berkaitan dengan bidang seni dan budaya. Namun setelah pemerintah Inggris menciptakan IK, ungkapan tersebut semakin terkenal. Inggris memiliki sejumlah masalah pada 1980-an, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi,

penurunan aktivitas industri, dan penurunan dukungan pemerintah terhadap seni. Maka diperkenalkanlah sebuah konsep, yaitu *culture as an industry* (Roodhouse, 2011). Dengan mengadopsi gagasan ini, seni dan budaya tidak lagi dianggap sebagai industri yang selalu membutuhkan bantuan pemerintah, melainkan sebagai alat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kebijakan yang mendorong inovasi (Potts, 2011). Berikut ini tesis Jason Potts yang berfokus pada motivasi utama penciptaan IK.

*“Civic officials now had a verified and convincing “good for the economy” justification for promoting cultural facilities, inner city development, local support for the arts and media sector, etc. These initiatives, which were frequently previously recorded as liabilities, such as maintenance of historical sites, events, or bike lanes, were now reassessed as significant evolutionary growth drivers. The new narrative stated that a region was no longer required to be serious and diligent in order to be vibrant and expanding. Instead of a new oil refinery or container port, post-industrial economic logic demanded that a region have fantastic cafes, theaters, and wi-fi for everyone. The creative industries thus became a central element in the ‘new economy’ where ultimate scarcity would increasingly shift from physical resources to human creativity indefining the limits on economic growth”* (Potts, 2011, 10).

Oleh karena itu, berikut ini adalah dasar pembenaran lahirnya IK di negara-negara industri maju: Ketegangan persaingan antarnegara di sektor industri konvensional berskala besar (industri manufaktur) semakin meningkat akibat globalisasi ekonomi yang turut meningkatkan angka pengangguran. Selain itu, perlu ada solusi untuk masalah berkurangnya dana untuk kegiatan artistik. Kedua masalah ini tidak lagi dapat diselesaikan dengan membangun kembali perusahaan skala besar karena tidak dapat diterima secara politik (yang kemungkinan besar terkait erat dengan masalah pencemaran lingkungan, ketersediaan lahan, dll.). Oleh karena itu, aktivitas “ekonomi yang ringan” (*weightless economy*) seperti kafe, teater, dan tempat-tempat lain diciptakan agar dapat meningkatkan jumlah uang yang dapat dikumpulkan untuk upaya artistik dengan tetap menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Pembangunan industri berskala besar akan dialihkan ke negara-negara Dunia Ketiga untuk sementara (bersama dengan masalah apa pun yang mungkin timbul dari hal ini). Semangat itu diilustrasikan oleh Perdana Menteri Inggris pada masanya, Tony Blair, yang menyatakan bahwa: “*pop music exports were financially more significant to the country than the steel industry*” (Weckerle dkk., 2008).

Kemudian, ditinjau dari aspek definisi, Pemerintah Inggris melalui *Department of Media, Culture and Sport* (DCMS) menjelaskan apa yang dimaksud dengan IK sebagai “kegiatan yang bersumber pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, serta yang memiliki potensi kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui generasi dan eksploitasi kekayaan intelektual”. Periklanan, arsitektur, kerajinan, desain, desain fesyen, perangkat lunak rekreasi interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, perangkat lunak, televisi, dan radio adalah beberapa bidang aktivitas yang dicakup oleh gagasan tersebut. (Roodhouse, 2011). Definisi tersebut diadopsi di beberapa negara seperti Norwegia, Selandia Baru, Singapura, dan Swedia (Birch, 2008). Menurut definisi dari frase yang digunakan di Prancis, itu merujuk pada serangkaian kegiatan ekonomi yang mengintegrasikan konsepsi, pengembangan, dan produksi sektor budaya dengan tugas-tugas industri produksi massal dan komersialisasi barang-barang budaya (Throsby, 2010). Di Indonesia, tidak digunakan istilah IK, melainkan istilah “Ekonomi Kreatif” (EK) khususnya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan EK menurut Diktum Pertama Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: “...kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia”.

Sementara itu, tampak tidak ada pembedaan mendasar antara Ekonomi Kreatif (EK) dan Industri Kreatif (IK) di kalangan profesional di bidang ini. Seorang akademisi yang menggunakan kata EK adalah John Howkins: “...*those sectors which produce intellectual property*” (Phillips, 2011). Sofie Birch setuju bahwa konsep DCMS menekankan pada hak kekayaan intelektual (HKI). Namun, pengamatan Birch

bahwa “sulit membayangkan bentuk bisnis apa pun yang tidak melibatkan kreativitas” adalah menarik (O’Connor 2005 dalam Birch, 2008). Sementara itu, Andy Pratt dari *London School of Economics* yang terlibat dalam penyusunan definisi IK oleh DCMS menyatakan bahwa industri tersebut “secara sepihak” diklasifikasikan sebagai “*the ones that made money*” (Birch, 2008). Lucy Montgomery menerjemahkan industri kreatif sebagai salah satu cabang ekonomi yang dikembangkan oleh mereka yang bergerak di bidang seni dan budaya (Montgomery, 2010). Menurut Susana Rodrigues ditinjau dalam segi perekonomian, EK diartikan sebagai mekanisme pengukuran dalam kontribusi IK (Cabrita & Cabrita, 2010). Adapun yang lain menganggap IK sebagai industri yang menawarkan produk dan layanan berdasarkan nilai-nilai budaya (*cultural goods and services*) (Caves dalam Throsby, 2010). Namun, istilah ini akhirnya terbatas untuk mencakup sektor-sektor yang memiliki ikatan kuat dengan seni atau budaya (Howkins, 2002 dalam Henry & de Bruin, 2011). Chris Bilton berpikir bahwa pengetahuan individu dan orisinalitas setiap orang selalu diprioritaskan dalam ide EK sebagai komponen yang berguna dari proses kreatif dan sebagai komponen “ajaib” dari EK (Bilton, 2007).

Selain itu, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) juga membuat definisi mengenai EK dan IK. Di dalam laporannya yang berjudul *Creative Economy Report 2008*, UNCTAD mendefinisikan IK sebagai berikut:

*“Creative industries’ can be defined as the cycles of creation, production and distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs. They comprise a set of knowledge-based activities that produce tangible goods and intangible intellectual or artistic services with creative content, economic value and market objectives”* (UNCTAD, 2008, 15).

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa IK sebenarnya adalah “jantung” dari EK (Erfanie, 2010). Dalam hal yang sama, UNESCO mendefinisikan “industri budaya” adalah: “...*those industries that ‘combine the creation, production and commercialization of contents which are intangible and cultural in nature. These contents are typically*

*protected by copyright and they can take the form of goods and services”* (Throsby, 2010). Komisi Eropa (2001) juga memiliki pengertian yang hampir sama untuk IK sebagai berikut: “...*the creative industry can be considered a ‘digital culture’, a sectoral area whose boundaries are difficult to draw, because of the manifold synergies and interactions of the traditional cultural sector with information technologies”* (Lazzeretti, 2007).

Kajian Industri Kreatif (IK) dapat dilakukan paling tidak melalui tiga cara berbeda, sesuai dengan aspek akademis. IK merupakan industri yang terkait dengan nilai-nilai budaya, seni, dan hiburan jika dilihat dari perspektif budaya. IK dipandang sebagai industri dari perspektif hak cipta (HC), yang dapat melindungi berbagai kegiatan termasuk distribusi dan penjualan eceran. IK, di sisi lain, adalah industri yang bersifat lintas sektor jika dilihat dari perspektif kreativitas, dan Pemerintah Inggris sangat tertarik dengannya sebagai bangsa yang pertama kali memopulerkan kata tersebut. Namun, kemudian pendekatan-pendekatan tersebut bergabung satu sama lain, sehingga industri yang dapat dilindungi oleh HC menjadi sama dengan industri (kreatif) budaya. Istilah “EK” sering diartikan sebagai industri budaya yang dipadukan dengan seni pertunjukan dan seni kreatif (Lazzeretti, 2007).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, 2022). Berdasarkan studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas, sebagai berikut.

- 1) Periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan produksi iklan, antara lain riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak, dan elektronik.

- 2) **Arsitektur.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan cetak biru bangunan dan informasi produksi antara lain: arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, dan dokumentasi lelang.
- 3) **Pasar Barang Seni.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan perdagangan, pekerjaan, produk antik dan hiasan melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet.
- 4) **Kerajinan.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi dan distribusi produk kerajinan, antara lain barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, aksesoris, pandai emas, perak, kayu, kaca, porselen, kain, marmer, kapur, dan besi.
- 5) **Desain.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, pengemasan, dan konsultasi identitas perusahaan.
- 6) **Fesyen.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorinya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen.
- 7) **Video, Film, dan Fotografi.** Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan ekshibisi film.
- 8) **Permainan Interaktif.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi.
- 9) **Musik.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi, dan komposisi musik.
- 10) **Seni Pertunjukan.** Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha yang berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

- 11) Penerbitan dan Percetakan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita.
- 12) Layanan Komputer dan Peranti Lunak. Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengembangan peranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur peranti lunak, desain prasarana peranti lunak & peranti keras, serta desain portal.
- 13) Televisi dan Radio. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi dan radio.
- 14) Riset dan Pengembangan. Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Berdasarkan definisi dan pembagian subsektor industri kreatif, dapat digarisbawahi bahwa industri kreatif sebagai berikut.

- 1) Kreativitas, keterampilan, dan talenta: berbasis pada otak manusia, yaitu kreativitas (baik artistik maupun non-artistik, seperti sains). Berbeda dengan sumber daya alam yang akan terus berkurang, kreativitas adalah sumber daya yang tidak terbatas.
- 2) Peningkatan kesejahteraan: suatu konsep dalam meraih kesejahteraan.
- 3) Penciptaan dan eksploitasi berbasis hak kekayaan intelektual (HKI).

## **2. Ekonomi Kreatif dan Perempuan**

Dalam tataran yang lebih praktis, ekonomi kreatif dijelaskan sebagai konsep pada era ekonomi yang mengandalkan kreativitas individual dan memanfaatkan imajinasi seni, keterampilan, dan bakat dari sumber

daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Dari hasil kreativitas tersebut, taraf ekonomi di suatu daerah atau kota dapat tumbuh dan berkembang. Bandung merupakan kota yang memiliki segudang kreativitas dan salah satu ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat di kota ini adalah busana muslim dan film. Kedua ekonomi kreatif ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sangat signifikan (Manurung, 2013). Penelitian serupa pun dilakukan oleh Widiastiti (2012) dan Setyaningsih (2012). UMKM dinyatakan telah berhasil meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat sekitar. Terlebih lagi, UMKM merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif dengan pelaku usaha perempuan terbesar. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan lainnya, UMKM juga dapat menjadi wadah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sosialisasi. Secara sadar, perempuan mulai beranjak dari ketidakberdayaan menjadi pemberdayaan. Perempuan mulai dapat berkontribusi bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk dapat membuktikan bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki sebagai pelaku bisnis. Seperti halnya yang terjadi di Bali, dengan keterbatasan yang dirasakan oleh perempuan terkait tradisi dan adat istiadat, perempuan di Bali akhirnya mempunyai tempat untuk mengaktualisasikan diri, hidup mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan.

Di banyak komunitas di dunia, warisan nilai tradisional sering kali dijaga dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh para perempuannya. Hal ini memberikan peluang besar bagi para ibu dan remaja perempuan untuk terus berupaya mengembangkan kreativitas dan mengonseptualisasikan nilai-nilai budaya sebagai warisan tradisional. Seperti halnya yang semakin marak di Bandung yakni ekonomi kreatif film. Ekonomi kreatif film ini merupakan warisan budaya yang dimulai dari seni pertunjukan. Para perempuan terbukti dapat terus berkreasi dengan mengembangkan pengetahuan kreatif yang diwujudkan dalam berbagai inovasi sehingga tercipta ekonomi kreatif film seperti saat ini dengan tetap mempertahankan kualitas. Beberapa ekonomi kreatif fesyen yang semakin marak di Indonesia pun merupakan salah satu bentuk inovasi dengan berawal dari ekonomi kreatif tenun kemudian berkembang menjadi pakaian jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hal

ini membuktikan para perempuan semakin terdorong untuk berkreasi dengan adanya UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Dengan demikian perempuan tidak hanya menjadi pemelihara warisan budaya tradisional tetapi juga menjadi pelaku budaya kreatif.

Pemberdayaan ekonomi melalui keterlibatan perempuan dalam ekonomi kreatif semacam ini telah dan perlu untuk terus diapresiasi sebagai sebuah usaha mengatasi kemiskinan. Sejumlah penelitian telah mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan dan menciptakan inovasi-inovasi demi mendorong penguatan potensi UMKM. Beberapa daerah bahkan telah mengatur ekonomi kreatif dalam peraturan daerah. Peraturan daerah ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Sayangnya, tidak semua daerah sadar akan pentingnya peran pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif. Kebijakan-kebijakan yang tidak ramah terhadap ekonomi kreatif pun kerap dijumpai. Sebagai salah satu penyumbang pemasukan terbesar APBD dan wadah pengembangan kreativitas perempuan, sudah semestinya ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang harus diperhatikan dan didukung oleh pemerintah.

Berbagai penelitian membuktikan bahwa perempuan berperan penting dalam ekonomi kreatif dan dalam mendorong perumusan kebijakan untuk mengembangkan jenis ekonomi kreatif ini. Namun, masih sedikit yang mengkaji kebijakan-kebijakan tersebut menggunakan perspektif gender.

### **C. Kerangka Analisis Moser sebagai Pendekatan Gender**

Buku ini memaparkan kebijakan pemerintah daerah terkait ekonomi kreatif khususnya ekonomi kreatif fesyen tenun, yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, menggunakan analisis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan kerangka analisis berbasis gender, yaitu Moser Gender Planning Framework (MGP).

Sebelum membahas lebih lanjut tentang MGP, ada dua pendekatan dan kerangka analisis berbasis gender yang lain, yaitu Harvard

Analytical Framework (HAF) dan Longwe's Women Empowerment Work (LWEW). Studi kebijakan menggunakan perspektif gender mulai marak pada 1980-an dengan munculnya kerangka-kerangka gender analisis, seperti Harvard Analytical Framework dan Moser Gender Planning Framework (March dkk., 1999). Penggunaan perspektif gender penting karena suatu kebijakan publik memengaruhi semua orang lewat berbagai cara (Broderick, 2012) dan sering kali dampak kebijakan pada laki-laki dan perempuan tidak terlihat. Kondisi sosial dan ekonomi selama ini menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sehingga dampak kebijakan publik terhadap dua kelompok gender ini—sebagaimana pada kelompok etnis, ras, usia, daerah—berbeda. Analisis gender menentang pandangan *gender-neutrality* dan membantu peneliti membandingkan bagaimana laki-laki dan perempuan terpengaruh oleh suatu kebijakan (Status of Women Canada, 1996). Melalui analisis berbasis gender, perbedaan dampak sosial-ekonomi dapat diidentifikasi dan pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan dan perumusan kebijakan berdasarkan bukti atau *evidence-based policy*.

Harvard Analytical Framework (HAF) atau disebut juga *Gender Roles Framework*, dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development bekerja sama dengan Women in Development (WID), USAID pada tahun 1985. Disebut sebagai yang pionir, HAF bertujuan untuk memetakan alokasi sumber daya pada aktivitas ekonomi perempuan dan laki-laki. *Framework* ini menyediakan sebuah matriks untuk pengumpulan data pada level mikro (rumah tangga) dan memiliki empat komponen utama.

1. *The Activity Profile*—siapa melakukan apa,
2. *The Access and Control Profile*—sumber daya dan manfaat,
3. *Influencing factors*—mengenal kesempatan dan hambatan, dan
4. *Checklist for Project-Cycle Analysis*—sejumlah pertanyaan untuk menilai proposal proyek atau area intervensi proyek yang dipilah berdasarkan gender.

Kelebihan HAF adalah memberikan gambaran yang jelas tentang pembagian kerja antargender, dan perbedaan pada beban kerja, serta

akses dan kontrol terhadap sumber daya. Sementara itu, kritik terhadap HAF mengatakan bahwa *framework* ini kurang memperhatikan *power-relations* dan lebih menekankan pemisahan daripada korelasi antargender.

Selain itu, Longwe's Women Empowerment Work (LWEW) dikembangkan oleh Sara Longwe untuk membantu para perencana menyoal arti *empowerment* (pemberdayaan) dan *equality* (kesetaraan) dalam praktik sesungguhnya. Longwe (dalam March dkk., 1999) mendefinisikan pemberdayaan perempuan dengan mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan secara setara dengan laki-laki agar dapat menguasai faktor-faktor produksi atas dasar kesetaraan dengan laki-laki.

Langkah awal dalam LWEW adalah mengidentifikasi *levels of equality* perempuan dan laki-laki, kemudian mengenali *level of recognition of women's issue*. Teknik ini memiliki banyak kesamaan dengan MGP, namun sudah mengalami perkembangan khususnya terkait kebutuhan praktis dan strategis. Menurut Longwe, "*The progression from practical to strategic depends on the extent to which the intervention has potential to empower.*" Kelebihan lainnya dari LWEW adalah penekanan pada pemberdayaan dan ideologis, namun kritik terhadapnya menyatakan bahwa LWEW ini belum merupakan sebuah *framework* yang komplet, dan 'hierarki' *levels of equality* bisa jadi membuat peneliti dan perencana melihat *empowerment* sebagai sebuah proses yang linear.

Moser Gender Planning Framework (MGP) juga salah satu kerangka analisis gender yang dikembangkan di awal 1980-an. Menggunakan pendekatan *Gender and Development* (GAD), Moser mengembangkan *framework* untuk perencanaan kebijakan gender yang terintegrasi dalam semua program pembangunan. Moser (1993) berpendapat bahwa emansipasi perempuan dari penindasan dan pencapaian *equality*, *equity*, dan *empowerment* merupakan tujuan utama perencanaan gender. Komponen dalam MGP yang berpusat pada *triple role* perempuan—reproduksi, produksi dan masyarakat—membuat pekerjaan-pekerjaan yang semula tidak terlihat menjadi jelas. Ada enam *tools* dalam MGP, yaitu sebagai berikut.

1. *Gender roles identification—triple role*;
2. *Gender needs assessment*—kebutuhan praktis dan strategis;
3. *Disaggregating control of resources and decision-making within the household*—siapa yang memiliki kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga dan siapa yang memiliki *power* untuk membuat keputusan;
4. *Planning for balancing the triple role*—mengkaji dampak intervensi atau program pada peran *triple* perempuan;
5. *Distinguishing between different aims in interventions*—antara matriks kebijakan WID dan GAD; serta
6. *Involving women, and gender-aware organizations and planner, in planning*—melibatkan partisipasi perempuan, serta organisasi dan perencana yang sadar gender, dalam perencanaan.

**Tabel 1.4** Contoh Penggunaan *MGP Framework Tool 2*

<b>Contoh Moser Tool 2: Penilaian Kebutuhan Gender</b> <i>(Example of Moser Tool 2: Gender Needs Assessment)</i>	
<b>Kebutuhan Praktis Gender Perempuan</b> <i>(Women's practical gender needs)</i>	<b>Kebutuhan Strategis Gender Perempuan</b> <i>(Women's strategic gender needs)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• akses terhadap bibit (<i>access to seedlings</i>)</li> <li>• kayu bakar (<i>firewood</i>)</li> <li>• kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan reboisasi dan kehutanan (<i>needs related to reforestation and forestry activities</i>)</li> <li>• oven yang lebih baik (<i>improved ovens</i>)</li> <li>• pemasaran produk rotan (<i>marketing of rattan products</i>)</li> <li>• pelatihan khusus (<i>specific training</i>)</li> <li>• pekerjaan berbayar (<i>paid work</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• organisasi kolektif (<i>collective organisation</i>)</li> <li>• hak untuk berbicara (<i>right to speak out</i>)</li> <li>• keterampilan dalam kepemimpinan, dan posisi kepemimpinan dalam proyek dan masyarakat (<i>skills in leadership, and leadership positions in the project and community</i>)</li> <li>• pendidikan (<i>education</i>)</li> </ul>

Sumber: Match (1991) dalam March dkk. (1999)

Terlihat dalam komponennya, MGP memiliki kelebihan dalam menyoroti peran perempuan yang semula tak terlihat, mudah diterapkan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh partisipan, serta membawa perencanaan ke level yang lebih tinggi daripada sekadar perkara teknis. Beberapa keterbatasannya adalah bahwa konsep *triple role* yang diusung di sini tidak sepenuhnya memotret ketidakseimbangan *power* antara perempuan dan laki-laki, dan seperti halnya dengan HAF, MGP masih memandang apa yang dikerjakan laki-laki dan perempuan serta sumber daya yang digunakan secara terpisah. Tabel 1.4 adalah contoh penggunaan MGP Tool 2 dalam penelitian yang sama dengan yang digunakan dalam contoh HAF sebelumnya, yaitu proyek hutan masyarakat di Biyasan.

Tujuan dari kerangka pemikiran perencanaan gender menurut Moser (1993), yaitu sebagai berikut.

1. Memengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan;
2. membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhan perempuan adalah sering kali berbeda dengan kebutuhan laki-laki;
3. mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis;
4. memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumber daya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda;
5. memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan dan prosedur; dan
6. membantu pengklarifikasian batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktik perencanaan.

Berdasarkan keenam tujuan tersebut, Moser (dalam March dkk., 1999) memperkenalkan enam perangkat sebagai kerangka yang dapat dipergunakan dalam perencanaan pembangunan untuk

semua tingkatan, mulai dari tingkatan proyek sampai ke tingkatan perencanaan daerah. Berikut enam perangkat tersebut.

1. Perangkat untuk Identifikasi Peran Gender. Tiga peran gender meliputi peran produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan/komunitas) yang mencakup penyusunan pembagian kerja gender, pemetaan aktivitas laki-laki dan perempuan (termasuk anak perempuan dan anak laki-laki) dalam rumah tangga selama periode 24 jam.
2. Perangkat untuk Penilaian Kebutuhan Gender. Moser mengembangkan alat ini berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada 1984. Penilaian kebutuhan gender didasari atas kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki dan mempertimbangkan posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat. Oleh karenanya, menurut Moser (1993) kebutuhan-kebutuhan gender dibedakan atas dua hal, yakni *pertama*, Kebutuhan Praktis Gender, yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan perempuan akan persediaan sumber air bersih, makanan, pemeliharaan kesehatan dan penghasilan tunai untuk kebutuhan rumah tangga, dan pelayanan dasar perumahan.

Mengidentifikasi kebutuhan praktis perempuan sangat penting untuk memperbaiki kondisi kehidupan kaum perempuan meskipun masih belum dapat mengubah posisi subordinat perempuan. *Kedua*, Kebutuhan Strategis Gender, yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinat perempuan. Hal ini berhubungan dengan isu kekuasaan dan kontrol, sampai dengan eksploitasi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kebutuhan strategis berhubungan dengan perjuangan penyusunan jaminan hukum terhadap hak-hak legal, penghapusan tindak kekerasan, upah yang sama/setara, kesetaraan dalam memiliki properti, akses untuk mendapatkan kredit dan sumber daya lainnya dan kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri.

3. Perangkat untuk Pemisahan Data/Informasi Berdasarkan Gender. Perangkat yang terkait dengan pemisahan data/informasi

berdasarkan jenis kelamin tentang kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga (alokasi sumber daya intra-rumah tangga dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga). Perangkat ini digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol sumber daya dalam rumah tangga, siapa yang mengambil keputusan penggunaan sumber daya, dan bagaimana keputusan itu dibuat.

4. Perangkat untuk Penyeimbangan Peran Gender. Perangkat yang terkait dengan menyeimbangkan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola tugas-tugas produktif, reproduktif, dan kemasyarakatan/komunitas mereka. Perlu juga diidentifikasi apakah suatu intervensi yang direncanakan akan meningkatkan beban kerja perempuan atau menambah penderitaan kaum perempuan.
5. Perangkat untuk Pengarusutamaan Gender. Perangkat tentang matriks kebijakan *Women in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD) yang akan memberikan masukan untuk pengarusutamaan gender.
6. Perangkat untuk Pelibatan *Stakeholder*. Perangkat ini meliputi organisasi perempuan dan institusi lain untuk mengintegrasikan kesadaran gender dalam perencanaan pembangunan. Tujuan dari alat ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan masuk dalam proses perencanaan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di tingkat keluarga dan masyarakat.



**Gambar 1.1** Tahapan Kerangka Analisis Moser

Perangkat pertama sampai ketiga dalam *framework* Moser mengajukan tiga pertanyaan mendasar dalam analisis gender terhadap kebijakan terkait produksi kain tenun di NTB dan NTT, yaitu

1. identifikasi *triple role* perempuan dan laki-laki;
2. identifikasi kebutuhan praktis dan strategis perempuan; dan
3. pemilahan kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Sementara itu, perangkat keempat sampai keenam berfungsi menjajaki bentuk-bentuk intervensi yang selama ini dilakukan dan mengenali arah tujuan dari perspektif WID dan GAD, serta upaya melibatkan perempuan dalam *gender planning*.

Keenam perangkat di atas dapat dirangkum dalam tiga tahapan kerangka analisis kebijakan gender yang dikenal dengan analisis model Moser (1993) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.1.

**Tahapan pertama, Analisis Pola Pembagian Kerja melalui Curahan Kerja (Profil Kegiatan)** untuk laki-laki maupun perempuan, baik peran produktif, reproduktif, maupun sosial kemasyarakatan di tingkat keluarga. Analisis pola pembagian kerja dalam keluarga akan memberikan gambaran sejauh mana laki-laki mengambil bagian peran domestik, dan sejauh mana perempuan mengambil bagian peran produktif. Di samping itu, melalui analisis ini diketahui pula seberapa jauh perempuan masih mempunyai waktu luang untuk melakukan kegiatan produktif, kapan waktu itu tersedia agar tepat dalam memberikan masukan keterampilan teknis pada perempuan. Analisis ini juga memberikan informasi tentang peluang baik laki-laki maupun perempuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, baik modal, alat-alat produksi, teknologi, media informasi, pendidikan, dan sumber daya alam yang tersedia. Akhirnya, analisis ini memberikan informasi tentang kekuatan pengambilan keputusan dan peluang untuk mendistribusikan kekuatan tersebut antara laki-laki dan perempuan.

**Tahapan kedua, Analisis Profil Akses/Peluang dan Kontrol.** Kontrol di sini dimaksudkan sebagai kekuatan dalam pengambilan keputusan. Profil akses/peluang bertujuan untuk mengetahui

bagaimana peluang dan akses sumber daya fisik (tanah, modal, alat-alat produksi), situasi dan kondisi pasar (komoditas, tenaga kerja, pemasaran, kredit modal, informasi pasar), serta sumber daya sosial-budaya (media informasi, pendidikan, pelatihan keterampilan).

**Tahapan ketiga, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profil Kegiatan serta Profil Akses dan Kontrol.** Analisis ini dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang menghambat atau menunjang sebuah program/proyek. Faktor-faktor yang perlu dianalisis meliputi lingkungan budaya, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan dalam masyarakat, struktur kelembagaan, penyebaran pengetahuan, teknologi dan keterampilan, norma/nilai-nilai individu dan masyarakat, kebijakan lokal/regional, peraturan/hukum, pelatihan dan pendidikan, kondisi politik, kearifan lokal, dan lain sebagainya.

Mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan, sesuai kebutuhan konteks, buku ini menggunakan *framework* analisis gender yang dikembangkan oleh Moser dan mengaitkannya dengan teori-teori tentang *global/regional governance*. Secara lebih spesifik, pembahasan buku ini mengacu pada kajian Rai (2004) tentang *Gendering Global Governance* yang memberikan analisis mengenai konstruksi gender terhadap konteks tata kelola global. Topik ini relevan dengan topik Masyarakat Ekonomi ASEAN, sebagai sebuah format kerja sama kawasan yang kini sudah mulai merespons perkembangan-perkembangan di tingkat lokal, khususnya isu 'pemuda' dan 'perempuan' (ASEAN, 2015). Buku ini mengeksplorasi keterkaitan antara konteks pembangunan di tingkat lokal dengan konstruksi integrasi kawasan di tingkat ASEAN. Hal ini sangat relevan untuk menjadi refleksi terhadap proses-proses pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN secara *bottom-up* dengan melihatnya pada proses-proses pembangunan ekonomi kreatif di tingkat lokal.

## D. Intisari Bab

Buku ini dibuka dengan Bab 1 yang memberikan gambaran ekonomi kreatif secara umum di Indonesia. Bab pertama juga menjabarkan perkembangan industri kreatif di Indonesia dan memperkenalkan

kerangka analisis berbasis gender. Kerangka-kerangka analisis tersebut digunakan untuk membahas kasus-kasus yang lebih spesifik di bab-bab selanjutnya.

Bab 2 menjelaskan regulasi ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat secara umum. Kemudian, bab ini juga menjelaskan kebijakan secara khusus di Kabupaten Lombok Timur di NTB dan Kabupaten Kupang di NTT. Bab ini diakhiri dengan analisis kebijakan berbasis gender terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Bab 3 dan 4 membahas secara spesifik ekonomi kreatif di bidang tenun di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Kupang secara berurutan. Pembahasan meliputi identitas ekonomi kreatif tenun di kedua kabupaten tersebut dan juga analisis berbasis gender terhadap kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Kupang.

Bab 5 membahas narasi peran perempuan dalam ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Kupang secara lebih spesifik. Pembahasan meliputi kontekstualisasi peran perempuan dalam ekonomi kreatif di era modern di kedua kabupaten tersebut. Bab 5 juga menjabarkan jaringan perempuan penenun di NTT dan NTB serta tantangan yang dihadapi oleh jaringan penenun tersebut.

Bab 6 mengakhiri buku ini dengan penggambaran masa depan ekonomi kreatif. Penulis mengajak pembaca untuk memikirkan narasi dan cara terbaik untuk menyeimbangkan aspek pelestarian budaya dan komersial dari ekonomi kreatif ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2015). *ASEAN economic community blueprint 2025*.  
ASEAN. [https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20180504\\_aec-blueprint-2025.pdf](https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180504_aec-blueprint-2025.pdf)
- Aufa, F. & Mulyati, S. (2008). *Ekonomi Kreatif: Perekonomian Berbasis Seni sebagai alternatif pembangunan perekonomian Indonesia*[Paper]. Institut Pertanian Bogor.

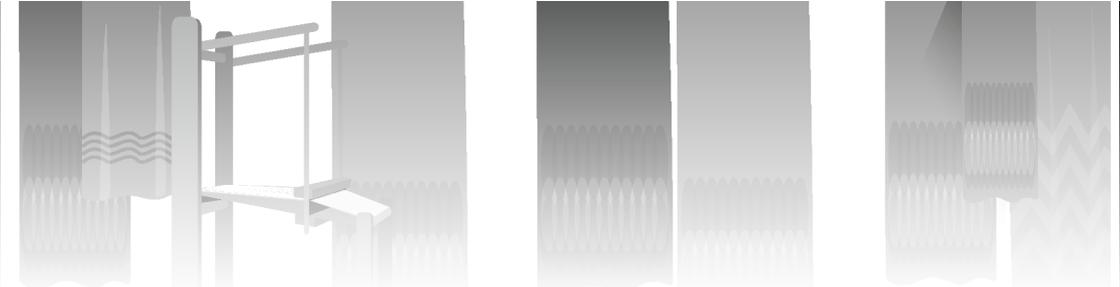
- Bilton, C. (2007). *Management and creativity: From creative industries to creative management*. Blackwell Publishing.
- Birch, S. (2008). *The political promotion of the experience economy and creative industries*. Narayana Press.
- Broderick, E. (2012, 9 Maret). Applying a gender perspective in public policy: What it means and how we can do it better. *Australian Human Rights Commission*. <https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/applying-gender-perspective-public-policy-what-it-means-and-how-we-can-do-it>
- Cabrita, M., & Cabrita, C. (2010). The role of creative industries in stimulating intellectual capital in cities and regions. Dalam S. Rodrigues (Ed.), *The Proceedings of the 2nd European Conference on Intellectual Capital*. Lisbon, Portugal, 29–30 Maret 2010. (175). Academic Publishing Limited.
- Erfanie, S. (2010). Dinamika industri kreatif dalam perekonomian nasional: Sebuah pengantar. Dalam Erfanie, S. (Ed.), *Dinamika industri kreatif dalam perekonomian nasional*. LIPI Press.
- Henry, C., & de Bruin, A. (2011). *Entrepreneurship and the creative economy: Process, practice and policy*. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Holmes, R., & Jones, N. (2010). *Rethinking social protection using a gender lens: Working Paper 320*. Overseas Development Institute.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. (2009). [https://jdih.kememparekraf.go.id/asset/data\\_puu/7193\\_2610-Inpres6Tahun2009](https://jdih.kememparekraf.go.id/asset/data_puu/7193_2610-Inpres6Tahun2009)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019, 16 Oktober). *Kembangkan ekonomi kreatif bidang fesyen, Pemerintah ajak Zilingo berdayakan perempuan, UMKM, dan produk dalam negeri*. Dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1091/kembangkan-ekonomi-kreatif-bidang-fesyen-pemerintah-ajak-zilingo-berdayakan-perempuan-umkm-dan-produk-dalam-negeri>

- Kementerian Perdagangan. (2008). *Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2025*. Kementerian Perdagangan. [https://library.pib.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=256](https://library.pib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=256)
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2014, 14 Februari). *Sektor fesyen topang ekspor*. Kementerian Perindustrian. <https://kemenperin.go.id/artikel/8586/Sektor-Fesyen-Topang-Ekspor>
- Lazzeretti, L. (2007). Culture, creativity and local economic development: Evidence from creative industries in Florence. Dalam P. Cooke, & D. Schwartz (Ed.), *Creative regions: Technology, culture and knowledge entrepreneurship*. Routledge.
- LPPI., & Bank Indonesia. (2015). *Profil bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*. LPPI dan Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>
- Manurung, M. E. (2013). Peran perempuan dalam membangun kewirausahaan kreatif busana muslim dan film di Bandung. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXII(1), 1–20.
- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). *A guide to gender analysis frameworks*. Oxfam GB.
- Montgomery, L. (2010). *China's creative industries: Copyright, social network markets and the business of culture in a aigital age*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice & training*. Routledge.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2016). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Nusa Tenggara Barat. (2016). [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Pergub%20No.%2010%20Tahun%202016.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20No.%2010%20Tahun%202016.pdf)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. (2022). <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/pp/2022/pp-nomor-24-tahun-2022.pdf>
- Phillips, R. J. (2011). Arts entrepreneurship and economic development: Can every city be "Austintatious"? *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*, 6(4), 239–313. <http://dx.doi.org/10.1561/03000000039>
- Potts, J. (2011). *Creative industries and economic evolution*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Rai, S. (2004). Gendering global governance. *International Feminist Journal of Politics*, 6(4), 579–601.
- Roodhouse, S. (2011). The creative industries definitional discourse. Dalam C. Henry, & A. de Bruin, *Entrepreneurship and the creative economy: Process, practice and policy* (8–10). Edward Elgar Publishing Limited.
- Saptari, R. (2000). Networks of reproduction among cigarette factory women in East Java. Dalam J. Koning, M. Nolten, J. Rodenburg, & R. Saptari, *Women and households in Indonesia: Cultural notions and social practices*. Curzon Press.
- Scott, E. (2022, 1 Desember). *Arts and creative industries: The case for a strategy*. Dari <https://lordslibrary.parliament.uk/arts-and-creative-industries-the-case-for-a-strategy/>
- Setiawan, B., & Suwarnigdyah, R. N. (2014). Strategi pengembangan tenun ikat Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(3), 353–367.
- Setyaningsih, S. (2012). Women empowerment through creative industry: A case study. *International Conference on Small and Medium Enterprises Development*. Procedia Economic and Finance.

- Simatupang, T. (2007, 1 Agustus). Gelombang ekonomi kreatif. *Pikiran Rakyat*.
- Simatupang, T. (2008). *Perkembangan Industri Kreatif*. SMB ITB.
- Soetjipto, A. W., & Adelina, S. (2013). *Suara dari desa: Menuju revitalisasi PKK*. Marjin Kiri.
- Status of Women Canada. (1996). *Gender-based analysis: a guide for policy making*. Staigh Associates Limited.
- Tan, M. (2022, 14 Maret). *Realizing the potential of over 71 Million MSMEs in Southeast Asia*. Southeast Asia Development Solutions - Asian Development Bank. <https://seads.adb.org/solutions/realizing-potential-over-71-million-msmes-southeast-asia>
- Therik, J. (2012). *Ragam-ragam tenunan Nusa Tenggara Timur*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- Throsby, D. (2010). *The economics of cultural policy*. Cambridge University Press.
- UNCTAD. (2008). *Creative Economy Report 2008*. UNCTAD.
- United Nations Industrial Development (UNIDO). (2014). *UNIDO Gender Newsletter No.4*. [https://www.unido.org/sites/default/files/2014-03/UNIDO\\_Gender\\_Newsletter\\_NO.4\\_A4\\_0.pdf](https://www.unido.org/sites/default/files/2014-03/UNIDO_Gender_Newsletter_NO.4_A4_0.pdf)
- UNDP (2012). *Gender and economic policy management initiative: Asia and the Pacific*. Retrieved from <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/gepmi-module-02-%E2%80%93-gender-responsive-policy-analysis>
- Weckerle, C., Gerig, M., & Söndermann, M. (2008). *Creative industries Switzerland: Facts, models, culture*. Zurich University of the Arts.
- World Health Organization. (2011). *Gender mainstreaming for health managers: a practical approach*. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064\\_eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf)

- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2006). *WIPO intellectual property handbook*. WIPO Publication. [https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid\\_2006\\_2.pdf](https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid_2006_2.pdf)
- Widiastiti, A. A. (2012). Resistensi perempuan Bali pada sektor Industri Kreatif di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Journal of Cultural Studies*, 1(1), 1–10.



# BAB 2

## REGULASI DI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BARAT

*Agustina Kustulasari*

### **A. Pengantar**

Kegiatan memproduksi kain tenun di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, maupun di beberapa daerah lain di Indonesia sudah ada sejak zaman nenek moyang. Benang yang dipintal dan ditenun secara manual menjadi kain ini semula adalah untuk memenuhi kebutuhan sandang keluarga dan kebutuhan sosio-kultural masyarakat karena kain tenun dikenakan pada acara-acara adat dan membawa identitas etnis asal motif. Seiring perubahan zaman, kain tenun menjadi ikon budaya, dikenal lebih luas dan menarik minat masyarakat dari luar daerah. Secara alami, permintaan memunculkan peningkatan pembuatan kain tenun sehingga kegiatan memproduksi kain tenun yang semula merupakan kegiatan sosio-kultural, kini juga menjadi sebuah aktivitas ekonomi. Pasar tercipta meskipun masih informal dan dalam skala kecil, serta usaha rumahan tenun menjadi perhatian beragam kalangan.

---

©2023 A. Kustulasari

Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: a.kustulasari@ugm.ac.id

Kustulasari, A. (2023). *Regulasi di Nusa Tenggara Timur dan Barat*. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Pe-  
rempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (35–55). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.  
c670 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah secara resmi dicanangkan tahun 2015, menjadi konteks makro untuk melihat kaitan antara usaha rumahan tenun yang tergolong masih sangat kecil dan kawasan ekonomi regional tersebut. Apabila dilihat dari jenis produknya, tenun termasuk dalam cakupan ekonomi kreatif karena pembuatannya melibatkan kreativitas dan produknya juga dihargai dari nilai estetikanya. Apabila dilihat dari ukuran produksinya, usaha tenun masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM)—meskipun dalam literatur yang lain, lebih tepat disebut usaha mikro (Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM). Maka, pertanyaan yang muncul adalah apakah ekonomi kecil dan kreatif tenun ini sudah berkontribusi terhadap MEA? Ekonomi kreatif dan UMKM merupakan dua topik yang banyak dibahas dalam kaitannya dengan MEA. UMKM terhitung memiliki persentase yang sangat besar dari keseluruhan jenis usaha di beberapa negara di ASEAN dan dengan demikian memiliki potensi untuk memengaruhi kekuatan ekonomi di negara tersebut dan kekuatan kompetisinya di kawasan. Namun di sisi lain, UMKM juga diidentifikasi sebagai yang paling sedikit memanfaatkan insentif-insentif yang ada dalam MEA, dari segi pinjaman bank untuk modal usaha maupun dari segi partisipasi dalam ekspor impor. Paradoks ini menarik dan menjadi penting untuk dipelajari lebih lanjut, terkait tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh UMKM, terutama ekonomi kreatif tenun untuk berpartisipasi secara aktif dalam MEA.

Satu hal lain yang menarik tentang ekonomi kreatif tenun ini adalah fakta bahwa penenun/pekerja tenun mayoritas adalah perempuan. Menenun bagi perempuan dalam masyarakat tradisional Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya adalah suatu keterampilan sosial dan merupakan penanda kedewasaan. Dalam tradisi masyarakat NTT dan NTB, sebelum menikah seorang perempuan harus bisa menenun terlebih dahulu, untuk kemudian memberikan tenun hasil karyanya kepada calon suami. Meskipun dalam masyarakat modern tradisi tersebut tampaknya berangsur pudar, sebagian masyarakat masih memegang teguh tradisi tersebut. Selain itu, seorang perempuan yang terampil menenun dan dapat menghasilkan karya-karya tenun yang indah dapat menaikkan

status sosial keluarganya, maupun keluarga calon mempelai pria. Gadis “berjari halus dan licin” dalam istilah mereka, dapat mengubah seorang laki-laki menjadi pria yang disegani dan dihormati (Therik, 2012), bahkan lebih dari status sosial karena kelahiran. Menenun adalah warisan budaya yang diturunkan dari ibu ke anak perempuannya dan, dengan demikian, adalah suatu hak istimewa (*privilege*) perempuan.

Dalam pembagian kerja yang klasik, perempuan memiliki beban dan sering kali juga standar ganda. Peran reproduksi perempuan membawa serta seluruh aktivitas melahirkan, merawat, membesarkan anak, serta mengurus keluarga—sebuah kerja krusial yang sering kali tidak mendapatkan apresiasi yang sama dengan tugas-tugas lain dalam keluarga. Di antara peran reproduksi perempuan dalam keluarga dan pengembalian warisan budaya, bagaimana perempuan penenun menyintas dan menghadapi tantangan-tantangan di tengah tarikan beban dan peran gandanya menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Untuk itu, diskusi dalam buku ini menggunakan *framework* Moser Gender Planning (MGP). MGP berpusat pada tiga titik landasan (March dkk., 1999), yaitu

1. peran lipat tiga perempuan;
2. kebutuhan praktis dan strategis gender; dan
3. kategori pendekatan *Women in Development* (WID) atau *Gender and Development* (GAD).

Moser berharap tugas-tugas perempuan dihargai setara dengan tugas-tugas laki-laki, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya Moser (dalam March, 1999) menerangkan bahwa konsep peran memang sentral dalam analisisnya, namun Moser menekankan bahwa peran-peran tersebut perlu dilihat secara jelas dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peran ganda-tiga dalam MGP mencakup peran reproduksi, produksi, dan komunitas/masyarakat. Hal yang menarik dari peran komunitas/masyarakat, Moser menemukan bahwa di banyak masyarakat dengan pendapatan rendah, peran komunitas perempuan sebatas mengelola, sedangkan peran komunitas laki-laki lebih politis (Moser, 1993). Selain itu, kelebihan MGP adalah adaptasi MGP dapat pula digunakan untuk

pemberdayaan laki-laki. Hal-hal inilah yang menjadi alasan pemilihan MGP sebagai alat analisis dalam diskusi tentang isu tenun dan gender ini.

Studi kasus yang diangkat sebagai materi diskusi adalah NTT dan NTB, secara khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur. Kedua kabupaten/kota dan provinsi dipilih utamanya karena angka kemiskinan di kedua provinsi ini di bawah rata-rata nasional, seperti terlihat dalam Tabel 2.1. Sementara kita ketahui bahwa persentase perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan lebih besar dari laki-laki (dapat dilihat pada Tabel 2.2). Dengan demikian, para perempuan di NTT dan NTB yang sebagian besar menenun, merupakan kelompok di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 2.1** Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTT dan NTB 2016–2018

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen)					
	Jumlah					
	2016		2017		2018	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
Nusa Tenggara Barat	16,48	16,02	16,07	15,05	14,75	14,63
Nusa Tenggara Timur	22,19	22,01	21,85	21,38	21,35	21,03
Indonesia	10,86	10,7	10,64	10,12	9,82	9,66

Sumber: Diolah dari Data BPS

Selanjutnya, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) juga merekomendasikan Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan kajian karena kedua daerah ini memiliki kelompok dampingan—yang disebut Jaringan Perempuan Usaha Kreatif (Jarpuk)—terbanyak. Selain kedua hal tersebut, kedekatan geografis dan historis kedua provinsi ini memberikan peluang untuk kajian komparatif.

**Tabel 2.2** Persentase Penduduk Perempuan di bawah Garis Kemiskinan 2015–2018

Jenis Kelamin	Persentase Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin (Persen)			
	2015	2016	2017	2018
	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)
Laki-Laki	10,91	10,59	10,39	9,59
Perempuan	11,54	11,14	10,89	10,06

Sumber: Diolah dari Data BPS

Pendahuluan bab ini telah mengetengahkan konteks dan menjelaskan latar belakang secara singkat. Menenun adalah kegiatan ekonomi kreatif, yang sejauh ini berbentuk usaha rumahan/mikro dan UKM. Apabila tenun akan dikembangkan untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam MEA, penting bagi kita untuk melihat sejauh mana kebijakan dan/atau program yang dilakukan telah mempertimbangkan peran ganda-tiga perempuan, dan kebutuhan praktis-strategis gender. Dengan kata lain, apakah kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional terkait tenun telah responsif gender. Apakah peran lipat tiga perempuan telah dimasukkan dalam pertimbangan? Apakah kebutuhan program-program pemerintah maupun sektor swasta telah mengenali kebutuhan praktis dan

strategis gender? Apakah perempuan dilibatkan dalam forum-forum perencanaan untuk pembangunan? Beberapa pertanyaan utama tersebut menjadi hal yang didiskusikan dalam buku ini. Bab ini secara khusus berupaya menelisik perhatian dan perhatian *stakeholders* khususnya pemerintah yang terwujud dalam kebijakan atau program yang dibuat pemerintah terkait tenun. Untuk memperkaya diskusi, bab ini juga akan mencakup kebijakan dan program nonpemerintah lain yang turut berkontribusi dalam mendorong ekonomi kreatif tenun di NTT dan NTB.

## **B. Analisis Umum Kebijakan Terkait Tenun**

Secara nasional, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mewajibkan semua departemen melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Demikian halnya dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tenun yang diatur dalam beberapa kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang ekonomi kreatif tenun, namun menjadikan pengembangan usaha tenun sebagai salah satu pokok bahasannya.

Mengacu pada konsep ganda-tiga, kebijakan-kebijakan ini merujuk pada aspek peran produktif. Pemerintah memandang kain tenun sebagai barang seni yang strategis untuk dikembangkan. Ini terdapat pada salah satu klausul yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industrial yang menyatakan bahwa mengembangkan produk kerajinan dan barang seni berbasis budaya (contohnya batik, tenun tradisional, bordir, dan sulaman) menjadi salah satu target dalam penguatan, pendalaman, dan penumbuhan 6 klaster industri prioritas. Tanggung jawab untuk membina industri pertenunan dimandatkan kepada Direktorat Industri Tekstil dan Aneka di bawah Direktorat Jenderal Basis Industri

Manufaktur. Ketentuan tersebut ada di lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 64/M-IND/PER/7/2011.

Dilihat dari sisi teknis pelaksanaannya, pengembangan usaha tenun menggunakan pendekatan kelompok. Ini ditegaskan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa pengembangan UMKM dilaksanakan melalui pendekatan koperasi, sentra, kluster, dan kelompok. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi rujukan bagi pengembangan industri di daerah, dan bahwa pembangunan industri nasional berdasarkan RT/RW nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, pemerintah pusat menerapkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi keberadaan industri atau usaha tenun melalui kebijakan impor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil menyatakan bahwa benang tekstur, tenunan polos, tenun ikat, dan kain tenunan lainnya termasuk produk tekstil yang dibatasi impornya. Peraturan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik. Peraturan tersebut membatasi impor batik dan motif batik yang meliputi kain tenunan dari sutra atau sisa sutra, kain tenunan dari linen, kain tenunan dari serat jute atau dari serat kulit pohon lainnya, kain tenunan dari serat nabati, kain tenunan dari benang filamen artifisial.

Kebijakan pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi kreatif tenun juga telah dilakukan dalam aspek peran komunitas/masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah dua di antara kebijakan yang relevan. Kebijakan ini menjadikan kain tenun sebagai salah satu bahan bagi Pakaian Dinas Harian (PDH) di lingkungan Pemerintah Provinsi. Secara eksplisit disebutkan bahwa PDH terdiri dari

1. PDH warna khaki; dan
2. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.

Kebijakan ini sudah diterapkan oleh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Harapannya di samping melestarikan kain produksi budaya bangsa Indonesia serta menambah nilai ekonomisnya, kebijakan ini juga meningkatkan pendapatan para perajinnya.

### **C. Kebijakan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu pusat ekonomi kreatif tenun di Indonesia. Sayangnya, belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur keberadaan tenun di Kabupaten Lombok Timur. Pengaturan terhadap keberadaan kain tenun hanya tercantum pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012–2032. Pasal 29 ayat 1 (b) menyatakan bahwa pengembangan sentra industri kecil (rumah tangga) tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan potensi yang dapat dikembangkan adalah industri pandai besi, industri kain tenun, industri konveksi, pembuatan garam kasar dan halus, industri bata genteng, industri kerajinan gerabah, industri pengolahan ikan, industri pembuatan minyak kelapa, industri kerupuk, industri kerajinan anyaman bambu dan daun lontar, serta industri kerajinan sabut kelapa. Merujuk pada peran ganda-tiga, kebijakan ini masuk ke dalam peran produktif. Kebijakan terkait perempuan pada aspek peran reproduktif dan peran komunitas/masyarakat belum teridentifikasi.

Di level provinsi, kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif tenun (peran produktif) baru berupa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pasal 11A ayat 1 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa PDH Batik/Tenun digunakan pada hari Kamis dan dapat digunakan pula pada (a) acara resmi tertentu di luar hari kerja; (b) kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau

(c) sesuai dengan ketentuan acara. Selibuhnya, kebijakan pada aspek peran produktif berupa kebijakan yang mengatur kegiatan ekonomi produktif secara umum, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengembangan Koperasi; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Kredit bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

Sementara itu, kebijakan pada aspek peran reproduktif di Provinsi NTB sudah memiliki keberpihakan pada kaum perempuan. Kebijakan tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita;
4. Surat Edaran Gubernur NTB Nomor SE/150/1138/KUM tahun 2014 tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.

Keberadaan kebijakan-kebijakan tersebut mendukung peningkatan kesehatan, kesehatan reproduksi, dan posisi tawar perempuan terhadap laki-laki dan daya tawar di tempat kerja.

## **D. Kebijakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)**

Sama halnya dengan Kabupaten Lombok Timur, Kota Kupang juga mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan pakaian sipil harian (PSH) dari tenun ikat motif daerah NTT. Ketentuan tersebut

diatur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dan Surat Edaran Gubernur Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT (Babo, 2020). PSH berbahan tenun ikat motif daerah NTT tersebut dikenakan pada hari Rabu dan Kamis, pada acara resepsi dengan tamu dari dalam dan luar negeri, pada pertemuan di luar jam dinas dan pada malam hari, serta pada upacara peringatan HUT Kota Kupang setiap tanggal 25 April. Kebijakan ini mendukung aspek peran produktif pada ekonomi kreatif tenun yang dilakukan oleh kaum perempuan penenun di Kota Kupang. Kebijakan pada aspek peran reproduktif adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita.

Di tingkat provinsi, pengembangan ekonomi kreatif tenun tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2010–2030. Poin a pasal 33 menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan peruntukan industri kain tenun terdapat di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. Kebijakan lainnya lebih pada aspek peran reproduktif, meliputi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

Ulasan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut menyiratkan bahwa kebijakan-kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tenun di Provinsi NTB dan NTT belum secara langsung dan terintegratif berperspektif gender. Kebijakan berperspektif gender masih merupakan payung kebijakan di tingkat nasional. Penerjemahannya di tingkat daerah masih berjalan sendiri-sendiri. Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif tenun menjadi bagian dari kebijakan pengembangan industri dan usaha ekonomi produktif pada umumnya, sedangkan kebijakan berperspektif gender lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kaum perempuan secara umum.

## E. Analisis Kebijakan Responsif Gender

Riset dan literatur terkait analisis kebijakan berbasis gender memunculkan beberapa klasifikasi kebijakan. United Nations Development Program (UNDP, 2012) mengelompokkan jenis kebijakan menjadi 3, yaitu *gender-blind policy*, *gender-neutral policy*, dan *gender-responsive policy*. Kebijakan yang *gender-blind* tidak menghiraukan perbedaan situasi, peran, kebutuhan atau kepentingan perempuan, laki-laki, atau gender ketiga, dewasa atau anak-anak. Sementara itu, kebijakan yang netral gender tidak mengindahkan dan juga tidak berupaya untuk memengaruhi perbedaan-perbedaan yang ada. Kebijakan yang responsif gender mempertimbangkan dan menysar perbedaan situasi, peran, kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok gender dan usia. Panduan penilaian kebijakan berbasis gender yang dikeluarkan oleh WHO (2011) membagi skala responsivitas menjadi 5, yaitu

1. *gender-unequal* (tidak setara);
2. *gender-blind* (buta gender);
3. *gender-sensitive* (peka gender);
4. *gender-specific* (khusus gender); dan
5. *gender-transformative* (transformatif gender).

Tabel 2.3 menjelaskan perbedaan kelima level ini. Istilah kebijakan yang *gender-responsive* juga dikenal dengan sinonim *gender-informed* dalam panduan World Bank (2005) untuk analisis kebijakan sosial. Kebijakan *gender-responsive/gender-informed* ini muncul merespons perkembangan dalam kajian gender yang mengenali peningkatan kapasitas, dan kapabilitas serta keterampilan dan sumber daya yang dimiliki perempuan dalam pembangunan, sehingga menuntut pelibatan aktif perempuan dalam peran kepemimpinan dan konsultatif.

**Tabel 2.3** Skala Pengukuran Responsivitas Kebijakan

Level	Kategori	Indikasi
1	Tidak Setara ( <i>gender-unequal</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melestarikan ketidaksetaraan gender dengan memperkuat norma, peran dan hubungan yang tidak seimbang.</li><li>• Hak istimewa laki-laki atas perempuan (atau sebaliknya).</li><li>• Sering kali menyebabkan satu jenis kelamin menikmati lebih banyak hak atau kesempatan daripada yang lain.</li></ul>
2	Buta Gender ( <i>gender-blind</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengabaikan norma, peran dan hubungan gender.</li><li>• Sangat sering memperkuat diskriminasi berbasis gender.</li><li>• Mengabaikan perbedaan dalam kesempatan dan alokasi sumber daya untuk perempuan dan laki-laki.</li><li>• Sering kali dibangun berdasarkan prinsip “adil” dengan memperlakukan semua orang dengan sama.</li></ul>
3	Peka Gender ( <i>gender-sensitive</i> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mempertimbangkan norma, peran, dan hubungan gender.</li><li>• Tidak membahas ketidaksetaraan yang disebabkan oleh norma, peran, atau hubungan yang tidak setara.</li><li>• Menunjukkan kesadaran gender, meskipun sering kali tidak ada tindakan perbaikan yang dikembangkan.</li></ul>

Level	Kategori	Indikasi
4	Khusus Gender ( <i>gender-specific</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan norma, peran, dan hubungan gender bagi perempuan dan laki-laki dan bagaimana mereka memengaruhi akses dan kendali atas sumber daya.</li> <li>• Mempertimbangkan kebutuhan khusus wanita dan pria.</li> <li>• Secara sengaja menargetkan dan menguntungkan kelompok perempuan atau laki-laki tertentu untuk mencapai kebijakan atau program tertentu.</li> <li>• Tujuan atau memenuhi kebutuhan tertentu.</li> <li>• Mempermudah perempuan dan laki-laki untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan kepada mereka berdasarkan peran gender mereka.</li> </ul>
5	Transformatif Gender ( <i>gender-transformative</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan norma, peran, dan hubungan gender bagi perempuan dan laki-laki dan bahwa ini memengaruhi akses dan kendali atas sumber daya.</li> <li>• Mempertimbangkan kebutuhan khusus wanita dan pria.</li> <li>• Mengatasi penyebab ketidaksetaraan kesehatan berbasis gender.</li> <li>• Termasuk cara-cara untuk mengubah norma, peran, dan hubungan gender yang berbahaya.</li> <li>• Tujuannya sering kali untuk mempromosikan kesetaraan gender.</li> <li>• Termasuk strategi untuk mendorong perubahan progresif dalam hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.</li> </ul>

Sumber: Dirangkum dan diterjemahkan dari WHO (2011)

Mengacu pada definisi dan pengukuran responsivitas gender di atas, kajian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan lokal dan nasional terkait tenun di Indonesia telah memenuhi kualifikasi *gender-responsive*, pada tataran *gender-specific*. Artinya, kebijakan dan regulasi terkait tenun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah telah mencoba menyasar dan mempertimbangkan perbedaan yang ada antarkelompok gender dan usia, alih-alih memperlakukan semuanya sama. Regulasi dan kebijakan yang kami temukan juga mengindikasikan adanya kesadaran gender, yang muncul sebagai hasil kampanye dan dorongan berbagai pihak untuk menerapkan pengarusutamaan gender secara nasional.

Akan tetapi, kebijakan dan regulasi yang secara khusus terkait dengan pengembangan UMKM dan/atau industri rumahan tenun belum secara khusus menargetkan penenun perempuan yang merupakan mayoritas. Dengan memperhatikan data statistik mengenai kemiskinan serta marginalitas perempuan dalam aktivitas perekonomian, kebijakan yang akan mampu merespons kebutuhan ini adalah kebijakan yang secara khusus mempertimbangkan faktor-faktor, seperti peran ganda, akses, dan kontrol atas sumber daya, serta relasinya dengan kelompok gender yang lain. Selain itu, belum ada data pilah terkait kelompok tenun tersendiri dalam program-program untuk UMKM, meskipun seperti yang telah diutarakan di bagian pendahuluan buku ini, UMKM memiliki proporsi tenaga kerja yang sangat besar dalam tenaga kerja Indonesia. Artinya, untuk menumbuhkan ekonomi kreatif tenun yang ramah perempuan dan anak, serta sensitif terhadap relasi gender di dalam masyarakat, kebijakan-kebijakan nasional, dan lokal perlu secara spesifik dirancang untuk menyasar kebutuhan khusus penenun perempuan, serta meningkatkan peran penenun perempuan dalam pengambilan keputusan. Bab-bab selanjutnya dalam buku ini akan menganalisis temuan penulis menggunakan kerangka analisis Moser (1993).

## **F. Kebijakan Pendukung Usaha Tenun di Konteks ASEAN dan (Pasca) Pandemi Covid-19**

Pada bagian awal buku ini penulis telah menyetengahkan pentingnya ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi ekonomi nasional maupun regional. Kami juga telah menyampaikan argumen bahwa usaha tenun merupakan salah satu sektor UMKM yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti bahwa usaha ini secara tradisional merupakan aktivitas perempuan, sehingga usaha untuk mengembangkan UMKM tenun merupakan usaha mendukung peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan ekonomi keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Bagian berikut ini adalah tambahan dari edisi pertama. Penulis menganggap penting untuk membahas tenun dalam konteks kebijakan di level ASEAN, terutama di masa pandemi Covid-19 dan setelahnya.

Seperti kita semua ketahui, pandemi Covid-19 membawa disrupsi yang luar biasa di semua sendi kehidupan. Meskipun data pilah terkait dampak pandemik pada usaha tenun di dua provinsi dalam diskusi buku ini tidak kami temukan, Asian Development Bank (ADB) melaporkan industri kreatif dan budaya secara umum menyusut sebesar US\$750 miliar di 2020 (Sonobe, 2022). Penyusutan ini menggarisbawahi dua pertanyaan yang sudah ada sebelumnya: mampukah UMKM tenun menjadi kegiatan ekonomi berbasis sosial budaya yang terus berkembang dan berkelanjutan (*sustainable*); dan seberapa lincahkah UMKM tenun menghadapi disrupsi, seperti krisis Covid-19? Tentunya semua ini makin menguatkan alasan pentingnya dukungan pemerintah dan/atau aktor regional, seperti ASEAN dalam bentuk kebijakan maupun aksi nyata yang lain.

ASEAN menanggapi cukup cepat keprihatinan akan nasib UMKM di era pandemi Covid-19. Tiga dokumen yang menunjukkan perhatian dan rekomendasi ASEAN tentang ekonomi kreatif (termasuk tenun) dan pemulihan pascapandemi.

1. ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts 2016–2025 yang diterbitkan tahun 2016.

2. ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) yang diterbitkan tahun 2020.
3. the ASEAN Creative Economy: Culture, Identity, and the Business of Creativity yang diterbitkan tahun 2021.

Penulis akan menyampaikan beberapa poin penting dari ketiga dokumen ini yang relevan dengan pembahasan di buku ini dan yang akan menarik untuk dikaji lebih lanjut.

*Poin pertama* adalah terkait istilah. Dalam dokumen-dokumen tersebut, tenun dirujuk menggunakan dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, yaitu *ekonomi* kreatif dan *industri* kreatif. Dokumen Association of Southeast Asian Nations (ASEAN, 2016) menggunakan istilah ‘industri kreatif’, sementara dokumen ACRF (ASEAN, 2020) menggunakan dua istilah seperti terlihat dalam kutipan di Tabel 2.4.

**Tabel 2.4** Penggunaan Istilah Ekonomi dan Industri Kreatif dalam Dokumen Terkait

No.	Key Priorities	Initiatives and Programmes	Output and Deliverables
3.g.	<i>Accelerating sectoral recovery (tourism, SMSEs) and safe-guarding employment in most affected sectors</i>	<i>Exploring the development of a platform to harness the contribution of the creative industries [penekanan ditambahkan] towards innovations, generating livelihoods and supporting economic development in ASEAN Member States.</i>	<i>ASEAN Regional Workshop on Creative Economy (ARWCE), Yogyakarta 2021 Inter-pillar, cross-sectora discussions on the possibility and modality of establishing an ASEAN Working Group on Creative Economy/ Industry [penekanan ditambahkan]</i>

Sumber: ASEAN (2020)

Perbedaan istilah ini mungkin tidak berpengaruh secara signifikan di level praktis, tetapi penggunaan istilah yang berbeda meletakkan topik ini dalam kelompok diskusi yang berbeda. Penulis berpendapat ekonomi merujuk kepada kegiatan manusia untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan berbagai kebutuhan (biologis, apresiasi seni, dan sebagainya), sementara istilah industri mengajak kita membayangkan sebuah kegiatan berskala besar yang bertumpu pada modal besar. Penulis memilih menggunakan istilah ekonomi sebagai bagian dari advokasi berdasarkan kajian berbasis *gender responsive framework*. Selain penggunaan dua istilah yang rawan beda interpretasi, kedua frasa belum memiliki definisi pasti setidaknya yang disahkan untuk berlaku di ASEAN (Sioson & Tiong dalam ASEAN, 2021).

Buchoud (2022, 1) dalam dokumen terbitan Asian Development Bank Institute berjudul *Creative Economy 2030* menggunakan definisi ekonomi kreatif dari UNCTAD dan UNDP yang berbunyi “*an evolving concept based on creative assets potentially generating economic growth and development*”. Dalam dokumen ini, sekali lagi dua istilah ini—industri kreatif dan ekonomi kreatif—digunakan. Beberapa penulis, seperti Rosyadi dkk. (2022) dan Marzaman (2013) mengutip definisi Howkins (2001, 8) berikut ini: “*a transactional activity of creative products which are goods and services that have economic value*”. Sebagai sebuah organisasi multilateral, ASEAN dapat memutuskan istilah yang mana yang tepat untuk mencerminkan arah kebijakan ASEAN dan merumuskan sendiri definisi istilah tersebut sesuai dengan konteks regional dan negara-negara anggotanya dengan mempertimbangkan beberapa definisi yang telah muncul di literatur.

*Poin berikutnya* adalah terkait fokus rekomendasi ASEAN pada pemanfaatan teknologi digital. Terobosan digital dapat sangat membantu untuk kegiatan ekonomi dan industri kreatif yang lain, tetapi berbicara dalam kaitannya dengan konteks NTT dan NTB, penulis berpendapat bahwa ide tersebut kurang tepat sasaran sehingga berisiko menjadi tidak efektif atau malah membawa dampak marginalisasi lebih lanjut. Ini tidak hanya tentang infrastruktur, seperti tiang siar atau koneksi internet, yang mana merupakan hal dasar dan perlu dipenuhi.

Hal yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah tingkat literasi teknologi digital para perempuan penenun ini, serta pemikiran bahwa dukungan yang tepat adalah yang menempatkan penenun ini pada posisi sentral, bukan marginal. Penggunaan teknologi digital mengasumsikan kompetisi terbuka, gerakan serba cepat dan akses “24 jam” yang mengesampingkan satu aspek penting dalam kegiatan menenun di NTT dan NTB, yakni para penenun di kedua daerah ini mayoritas adalah perempuan berkeluarga dengan beban ganda-tiga. Menurut penulis, walaupun terobosan digital akan diterapkan, sebuah pendekatan dengan interpretasi khusus dibutuhkan.

*Poin ketiga* berhubungan dengan yang disampaikan di bab lain di buku ini, yaitu bahwa kebijakan untuk mendukung usaha tenun perlu terintegrasi utamanya dengan usaha pengentasan kemiskinan. Riset yang mengkaji tenun di Indonesia mayoritas berbicara dari perspektif pengembangan usaha ekonominya. Meskipun menyuarakan hal yang sama, penulis menemukan belum ada yang dengan cukup baik mengkaji dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif tenun dengan kebijakan pengentasan kemiskinan. Satu buku yang dengan baik membahas ekonomi pedesaan di Indonesia suntingan Leinbach (2004) bisa menjadi salah satu rujukan untuk mengkaji tenun menggunakan kacamata yang sesuai dengan kekhasan ekonomi pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Penulis menyebut topik ini bukan tanpa alasan, sebuah makalah karya Corner (1997) yang diterbitkan oleh UNIFEM berjudul "Rural Development and Poverty Alleviation in ASEAN: A Gender Perspective" banyak membantu penulis dalam kajian tenun di NTT dan NTB. Mempertimbangkan hasil observasi di NTT dan NTB, kebijakan yang mengintegrasikan tenun sebagai kegiatan ekonomi sosial budaya yang berpusat pada perempuan dengan pengentasan kemiskinan akan membawa manfaat bagi nilai publik (*public value*) yang terbesar.

## DAFTAR PUSTAKA



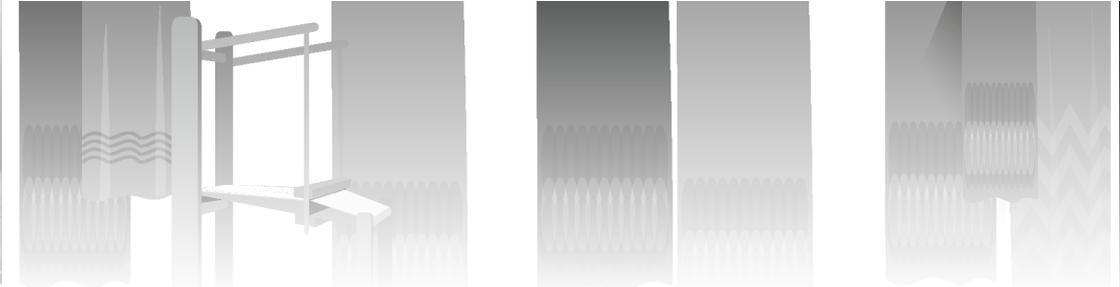
- Association of Southeast Asian Nations (2016). *ASEAN strategic plan for culture and arts 2016 – 2025*. The ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Strategic-Plan-for-Culture-and-Arts-2016-2025.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations (2020). ASEAN comprehensive recovery framework: Implementation plan. The ASEAN Secretariat. <https://asean.org/book/asean-comprehensive-recovery-framework-implementation-plan/>
- Association of Southeast Asian Nations (2021). The ASEAN creative economy: culture identity and the business of creativity. The ASEAN Secretariat. <https://theaseanmagazine.asean.org/edition/creative-economy/>
- Babo, G. (2020, 28 Agustus). Dibalik bersarung tenun di lingkup ASN Pemerintah Provinsi NTT. *BKD Prov NTT*. <https://bkd.nttprov.go.id/article/dibalik-bersarung-tenun-di-lingkup-asn-pemerintah-provinsi-ntt>
- Buchoud, N. J. A. (2022). A creative recovery: A G20 roadmap and special focus on Indonesia. Dalam T. Sonobe, N. J. A. Buchoud, T. G. Tiong, S. Baek, N. S. Hendriyetty, & E. P. Sioson (Eds.), *Creative economy 2030: imagining and delivering a robust, creative, inclusive, and sustainable recovery* (1–9). Asian Development Bank Institute.
- Corner, L. (1997, Oktober). *Rural development and poverty alleviation in ASEAN: A gender perspective*. A background paper to the ASEAN Senior Officials Meeting on Poverty Alleviation and Rural Development, Kuala Lumpur.
- Howkins, J. (2001) *The creative economy: How people make money from ideas*. Allen Lane.
- Leinbach, T. R. (Ed.). (2004). *The Indonesian rural economy: mobility, work and enterprise*. Institute of Southeast Asian Studies.

- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). *A guide to gender analysis frameworks*. Oxfam GB.
- Marzaman, A. (2013). Indonesia's creative industry towards the ASEAN economic community. *Journal of World Trade Studies*, 4(1), 67–79.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice & training*. Routledge.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. (2011). [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/8%20Sumba%20Timur/P\\_NTT\\_1\\_2011%20rencana%20tata%20ruang%20daerah.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/8%20Sumba%20Timur/P_NTT_1_2011%20rencana%20tata%20ruang%20daerah.pdf)
- Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/93331/pergub-prov-nusa-tenggara-barat-no-14-tahun-2>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (2009). [https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2009/PERMENDAGRI/Permen\\_53\\_2009.doc](https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2009/PERMENDAGRI/Permen_53_2009.doc)
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128975/permendag-no-52m-dagper72015-tahun-2015>
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5349/pp-no-17-tahun-2013> Peraturan Walikota

- Kupang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. (2010). <https://docplayer.info/40479851-Walikota-kupang-peraturan-walikota-kupang-nomor-5-tahun-2010.html>
- Rosyadi, S., Kusuma, A.S., Fitrah, E., Zayzda, N.A. & Pimoljinda, T. (2022), Barriers of public policy faced by SMEs of creative economy in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 64(1), 32–48. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0061>
- Sonobe, T. (2022). Preface. Dalam T. Sonobe, N. J. A. Buchoud, T. G. Tiong, S. Baek, N. S. Hendriyetty, & N., E. P. Sioson (Eds.), *Creative economy 2030: imagining and delivering a robust, creative, inclusive, and sustainable recovery* (xviii). Asian Development Bank Institute.
- Therik, J. (2012). *Ragam-ragam tenunan Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- UNDP (2012). *Gender and economic policy management initiative: Asia and the Pacific*. <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/gepmi-module-02-%E2%80%93-gender-responsive-policy-analysis>
- World Bank. (2005). *Gender responsive social analysis: A guidance note*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/217381468313758622/pdf/351370REV0GenderGuidelines0SANS.pdf>
- World Health Organization. (2011). Gender mainstreaming for health managers: A practical approach. *World Health Organization*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44516>



Buku ini tidak diperjualbelikan.



# BAB 3

## GENDER DALAM EKONOMI KREATIF TENUN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

*Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati*

### **A. Pengantar**

Perkembangan kain tenun di Indonesia bukan hal baru ketika tenun mulai diminati saat ini. Bahkan, banyak deretan nama desainer ternama yang menggunakan kain tenun untuk karya-karya yang diciptakannya. Kain tenun merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Indonesia yang sangat berharga serta memiliki keunikan tersendiri. Tak hanya memiliki unsur keindahan dan komersial saja, tenun juga memiliki nilai kearifan budaya lokal yang tinggi. Penggunaan kain tenun yang semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat menunjukkan bahwa kain tenun memiliki nilai estetika, budaya, dan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Pernahkah mendengar kebijakan pemerintah lokal untuk menggunakan tenun sehari dalam seminggu?

---

©2023 P. R. N. Rimbawati  
Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: putrirakhmadhani@gmail.com

Rimbawati, P. R. N. (2023). Gender dalam ekonomi kreatif tenun di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (57–89). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c671 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Semakin meluasnya penggunaan kain tenun sekaligus menawarkan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Direktur Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) mengatakan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan ASEAN Studies Center UGM bahwa kebijakan tersebut ternyata sudah dimiliki oleh bupati dan gubernur dari pemerintah lokal. Kebijakan tersebut tak hanya memiliki tujuan untuk melestarikan budaya lokal, tetapi lebih dari itu untuk membantu meningkatkan perekonomian penenun yang mayoritas adalah perempuan. Kebijakan tersebut dilakukan satu hari dalam seminggu, yang biasanya di hari Kamis atau Jumat. Sejumlah daerah telah menunjukkan keseriusan memberlakukannya, seperti Lombok Tengah; Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat; Sulawesi Tengah; hingga Klaten, Jawa Tengah.

“Tujuannya ya untuk mengangkat tenun, seperti batik. Tenun sudah saatnya memiliki posisi yang sama seperti batik. Di sejumlah daerah tertentu sudah ada kebijakan pemerintah setempat untuk menggunakan tenun satu hari dalam seminggu, dengan itu kami juga mulai membuat tenun itu dengan bahan yang nyaman sehingga dapat digunakan sehari-hari” (MA, FGD dengan ASEAN Studies Center UGM, 17 Januari, 2018).

Kebijakan yang sudah berlaku itu dapat membantu masyarakat untuk mengenali lambang atau ciri khas dari daerahnya. Hal itu karena tenun memiliki ciri khas pada motif yang menjelaskan soal daerah masing-masing. Dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan ASEAN Studies Center UGM, Direktur ASPPUK ini menjelaskan sejauh ini kebijakan tersebut juga memiliki nilai tambah karena telah memberikan dampak positif terhadap penghasilan penenun. Perkembangan dunia fesyen saat ini pun tak luput dari perhatian, mereka juga menyadari soal pentingnya bahan dari kain tenun agar dapat memiliki daya saing dalam ekonomi kreatif. Para penenun juga menggunakan bahan-bahan alami untuk menghasilkan kecenderungan warna yang lebih lembut karena terbuat dari pewarna alami, seperti kulit kayu banten, bakau, dan kunyit.

“Mungkin dulu banyak orang yang enggan menggunakan baju dengan bahan tenun karena dianggap tebal dan panas, tetapi sekarang sudah jauh berubah. Penenun sudah memahami soal penggunaan benang yang lebih bagus sehingga tidak membuat kain tenun begitu tebal. Mereka juga mulai minat dengan penggunaan pewarna alami yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan.” (MA, FGD dengan ASEAN Studies Center UGM, 17 Januari, 2018).

Seperti yang diharapkan, kebijakan tersebut pun mendapatkan sambutan baik dan antusiasme dari masyarakat. Perkembangan pembuatan kain tenun mengikuti minat pasar dan sudah modern sehingga masyarakat tidak canggung lagi dalam menggunakannya. Tidak hanya itu, warna-warni yang khas dari kain tenun yang dikenakan dapat menjadikan kebanggaan tersendiri bagi penggunanya. Untuk menarik minat berbagai kalangan konsumen, saat ini penenun cukup kreatif dengan mengemas tenun menjadi produk-produk fesyen dan aksesoris, seperti gelang, ikat kepala, peci, dan tas. Meskipun demikian, menurut MA kebijakan tersebut masih berlaku di wilayah lokal dan belum terjadi secara nasional.

MA menilai sejauh ini belum ada perubahan signifikan, pemerintah cenderung lebih mengutamakan soal kain batik. Seperti diketahui, kain batik sudah berkiprah hingga dunia internasional. Bahkan, batik menjadi ciri khas dari Indonesia. Memang tidak dapat dimungkiri untuk membuat kain tenun digunakan dalam kegiatan sehari-hari dibutuhkan campur tangan desainer supaya kain tenun dapat terlihat trendi dan mengikuti keinginan konsumen. Selain itu, dukungan konsumen dalam negeri juga perlu ditingkatkan dengan kecintaannya terhadap produk dalam negeri. Tentu hal ini akan menyokong kemampuan pelaku usaha dan penenun menjadi tuan di negeri sendiri.

## **B. Ekonomi Kreatif Tenun Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Peran ekonomi kreatif dapat meningkatkan ekonomi secara global (Manurung, 2013). Sebagian orang berpendapat bahwa kreativitas

manusia adalah sumber daya ekonomi utama. Saat ini banyak sektor ekonomi kreatif yang lahir dari kreativitas dan inovasi dari setiap individu. Di Indonesia terdapat berbagai macam sektor yang termasuk ke dalam ekonomi kreatif dan perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat.

Pelaku usaha di Indonesia perlu menyadari bahwa potensi ekonomi kreatif masih besar untuk digarap dan masih bisa terus digali untuk dikembangkan, namun mensyaratkan adanya kreativitas tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Aufa dan Mulyati (2008) yang menegaskan bahwa industri kreatif berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan, atau desain fesyen, dan termasuk layanan kreatif antarperusahaan seperti iklan (Aufa & Mulyati, 2008). Ekonomi kreatif merupakan kegiatan usaha yang fokus pada kreasi dan inovasi. Provinsi Nusa Tenggara Barat kaya akan budaya serta tradisi yang bisa menjadi sumber kreativitas.

Sektor kerajinan merupakan jenis ekonomi kreatif yang memerlukan pengembangan. Sektor kerajinan meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari suatu produk kerajinan yang dihasilkan. Sektor kerajinan ini dibuat oleh tenaga perajin, mulai dari desain sampai proses hasil penyelesaiannya. Sektor kerajinan memanfaatkan serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, dan kayu serta nantinya akan dibuat menjadi seni kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Sektor tenun termasuk ke dalam sektor ekonomi kreatif. Aneka ragam tenun di Provinsi NTB dapat dikembangkan melalui ekonomi kreatif tenun yang memiliki pasar tersendiri baik di Indonesia maupun di internasional. Sektor tenun ini meliputi dari proses pembuatan tenun khas daerah, hingga pemasaran produk di Indonesia. Sektor tenun di Indonesia sudah memiliki pasar yang luas dan juga sudah bisa bersaing dengan pasar ritel modern. Sektor kuliner menjadi ekonomi kreatif yang cukup menjanjikan saat ini karena memiliki nilai ekonomis namun tetap memiliki keuntungan.

Sektor kerajinan dan kuliner dalam perkembangannya ikut andil memajukan pariwisata di NTB, seperti kerajinan tenun, serta kuliner yang mengalami perkembangan pesat. Ekonomi kreatif di NTB akan

besar dan bisa terus berkembang sebagai bisnis utama yang harus dikelola serius, dari bisnis kecil dengan pencatatan keuangan sederhana menjadi bisnis dengan pencatatan akuntansi profesional, dari bisnis kecil tanpa target menjadi bisnis dengan strategi tahunan yang nyata.

Selain itu, pemerintah menunjukkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif tenun (peran produktif) berupa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pasal 11A Ayat 1 dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa PDH Batik/Tenun digunakan pada hari Kamis dan dapat digunakan pula pada: a. acara resmi tertentu di luar hari kerja; b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau c. sesuai dengan ketentuan acara. Meskipun demikian, pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan dari pemerintah yakni dengan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, selain itu harus ada upaya kemudahan memperoleh bahan baku bagi pelaku ekonomi kreatif.

Tidak dapat dimungkiri, peran media sosial sangat memberikan potensi besar bagi pelaku bisnis, tak terkecuali pelaku ekonomi kreatif. Pelaku bisnis bisa menawarkan barang untuk dijual melalui media sosial sehingga ikut membantu dalam perkembangan ekonomi kreatif.

Saat ini sektor ekonomi pertanian dan ekonomi kreatif mulai lesu di NTB karena karakteristiknya yang *non-renewable*. Oleh karena itu, ekonomi kreatif di sektor kerajinan dapat diandalkan. Bidang ekonomi kreatif yang mengandalkan ide dan kreativitas dapat diandalkan sebagai sumber ekonomi tanpa batas.

NTB memiliki begitu banyak keanekaragaman kerajinan tangan khas daerah, salah satunya tenun. Selain sebagai kearifan budaya lokal, menenun juga menjadi sumber ekonomi masyarakat. Sebagian besar warga di NTB terutama para wanita berprofesi sebagai penenun, di sejumlah teras warga terdapat alat tradisional untuk menenun (*gedogan*). Hampir semua ibu-ibu bisa menenun dan diajarkan secara turun-temurun ke anak gadisnya.

Potensi kerajinan yang dimiliki oleh NTB merupakan modal untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang terus ditekuni oleh

perajin. Salah satunya adalah kerajinan tenun NTB yang terus bertahan hingga sekarang.

Ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Timur mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakkan roda pembangunan perekonomian di daerah tersebut. Peran tersebut tidak hanya terwujud dalam bentuk peningkatan jumlah industri dan nilai tambah produksi, tetapi juga mampu menyediakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara luas ke berbagai wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap kecamatan di kabupaten tersebut.

Dalam indikator perusahaan/usaha industri formal menurut cabang industri di Kabupaten Lombok Timur dalam Tabel 3.1 menunjukkan penyerapan jumlah tenaga kerja pada cabang agro industri sebanyak 11.734 paling banyak dibandingkan cabang industri lainnya di Kabupaten Lombok Timur. Meskipun demikian, cabang industri hasil hutan, kimia dan tekstil juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

**Tabel 3.1** Indikator Perusahaan/Usaha Industri Formal Menurut Cabang Industri di Kabupaten Lombok Timur 2016

Cabang Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Logam, Mesin dan Perekayasaan	19	367	26	393
Elektronik dan Aneka	23	363	25	388
Tekstil	240	630	683	1.313
Alat Pengangkutan	39	569	12	581
Kimia	175	1.646	314	1.960
Agro Industri	839	6.688	5.046	11.734

Cabang Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hasil Hutan	1.051	6.214	847	7.061
Jumlah	2.386	15.807	6.860	23.430

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (2017)

Hal tersebut selaras dengan Tabel 3.2 yang menunjukkan perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2011 hingga 2016. Jumlah UKM mikro dan kecil, penyerapan tenaga kerja, dan aset yang mengalami peningkatan tajam dari 2011 hingga 2016 dapat dilihat secara detail dalam Tabel 3.2.

**Tabel 3.2** Perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur 2011–2016

Tahun	Mikro			Kecil		
	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Aset (dalam Juta Rupiah)	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Aset (dalam Juta Rupiah)
2011	2.369	8.002	127.275	1.971	7.116	207.222
2012	2.660	8.944	131.509	2.337	8.857	215.272
2013	2.951	9.886	140.560	2.703	10.598	274.118
2014	3.085	9.622	149.612	3.804	12.881	332.963
2015	3.195	9.909	155.393	4.414	15.557	495.524
2016	11.475	11.475	89.679.350	5.930	11.860	73.149.768

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (2017)

**Tabel 3.3** Tabel Lanjutan Perkembangan dan klasifikasi UKM di Kabupaten Lombok Timur 2011–2016

Tahun	Menengah			Jumlah		
	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Asset (dalam Juta Rupiah)	Jumlah UKM	Tenaga Kerja	Asset (dalam Juta Rupiah)
2011	58	981	230.630	4.398	16.099	565.127
2012	80	1.250	230.630	5.077	19.051	577.411
2013	102	1.519	268.883	5.756	22.003	683.561
2014	80	1.250	307.137	5.077	19.051	683.561
2015	102	1.519	268.883	7.711	26.985	683.561
2016	219	657	8.130.975	17.624	23.992	170.960.093

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (2017)

Dalam beberapa tahun ke depan, potensi pengembangan industri kecil di berbagai bidang usaha masih terbuka lebar. Selain itu, perkembangan dan klasifikasi UKM juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur terjadi pertumbuhan selama tahun 2011 sampai 2016. Sesuai dengan hasil pemetaan usaha kecil dan menengah kerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB tahun 2015 bahwa jumlah UKM sebanyak 7.711 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.985 unit, kemudian meningkat tajam data tahun 2016 menurut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB jumlah UKM sebanyak 17.624 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 23.992 unit dan total aset 170.960.093 juta rupiah seperti tampak pada Tabel 3.3.

Keberhasilan pembinaan usaha kecil dan menengah sangat ditentukan oleh pendayagunaan secara optimal sumber daya yang tersedia seperti pendayagunaan sumber daya alam dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola UKM, pembinaan secara terpadu dari pemerintah serta dukungan masyarakat. Di samping

itu, dalam rangka pembinaan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu partisipasi /koordinasi asosiasi-asosiasi pengusaha kecil dan menengah yang ada. Usaha mikro dan menengah berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan Bergeraknya sektor UKM, diharapkan kesejahteraan masyarakat turut meningkat.

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak dan penguat ekonomi bangsa Indonesia karena bergerak di sektor riil yang melibatkan banyak warga tingkat bawah. UKM juga kini sudah banyak tumbuh subur di tengah masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, pertumbuhannya harus dikawal agar dapat tumbuh kembang dan menjadi daya tahan kemajuan ekonomi bangsa.

Bank Indonesia kantor perwakilan Nusa Tenggara Barat mendorong ekonomi kreatif di sektor UMKM, salah satunya dengan membentuk kluster tenun di Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat, PO, mengharapkan kluster tersebut bisa menjadi desa percontohan bagi desa lainnya. PO menegaskan bahwa dengan keterlibatan lima kelompok di Desa Pringgasela ini diharapkan dapat sebagai tempat belajar, juga dapat dijadikan sebagai pendukung pariwisata khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi NTB (Septarini, 2016).

Program ini dilakukan dalam rangka mendukung target penyaluran kredit UMKM sebesar 20% pada 2018, seperti tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk menjaga konsistensi kemajuan UKM juga harus diikuti dengan pendampingan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta akses pasar yang terbuka. Keberadaan UKM cukup strategis dalam menjaga serta memajukan ekonomi ini sehingga pemerintah perlu terus memberikan perhatian. Pelatihan dan pendampingan terhadap UKM akan terus dilakukan, termasuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi pelaku UKM. Namun, maju tidaknya sebuah usaha akan sangat bergantung dari kesungguhan pelakunya.

Untuk bisa memajukan usaha ini, pelaku UKM harus memiliki mitra dan jejaring usaha yang berfungsi memasarkan produk. Membangun jejaring saat ini sangat mudah dengan kemajuan teknologi informasi.

Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, PSA, mengatakan ekspor NTB sampai sekarang masih banyak didominasi sektor pertambangan, sementara sektor lain, seperti sektor pertanian termasuk UMKM masih sangat rendah. “Ekspor kita paling besar masih didominasi sektor pertambangan, sementara sektor UKM masih sangat rendah, hanya 0,10 persen” (PSA, Wawancara Agustina Kustulasari dan Putri Rakhmadhani ASC UGM dengan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, 17 Juli 2017). Padahal dari segi potensi, produksi UKM kita sangat potensial dan menjanjikan, baik berupa produk olahan maupun produk kerajinan yang dihasilkan para pelaku UKM. Ia mencontohkan produk tenun, Kabupaten Lombok Timur. Dahulu pasarannya melejit dan menjadi salah satu tujuan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, tetapi semenjak kasus bom Bali pada 2001, usaha kerajinan tenun seakan mati suri. Oleh karena itu, harus ada perubahan *mindset* di antara para pelaku UKM, bagaimana meningkatkan nilai jual produk yang dihasilkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas penjualan.

Salah satu terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai jual dan ekspor hasil produk UKM di NTB adalah dengan mengubah pola penjualan dan transaksi dari tunai menjadi nontunai melalui *digital banking*. Selain itu transaksi melalui nontunai juga memungkinkan masyarakat pelaku UKM bisa terhindar dari risiko kejahatan, seperti penipuan, uang palsu, dan kejahatan lain.

Ditambahkan, beberapa produk UKM yang telah menerapkan transaksi *digital banking* adalah kerajinan mutiara Sekarbela, Kota Mataram; kerajinan ketak, Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah; kerajinan tenun, Desa Sukarara Lombok Barat; dan kerajinan Cukli dari Desa Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Mataram. Untuk membantu mengakomodasi produk UKM NTB yang telah melakukan ekspor, Disperindag NTB pada 17 Agustus lalu telah meluncurkan *e-shop* sebagai media transaksi penjualan bagi pelaku UKM dengan menggandeng PT Pos Indonesia.

### **C. Peran Perempuan dalam Ekonomi Kreatif Tenun di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Perubahan sistem perekonomian dalam masyarakat membawa perubahan pula pada alokasi ekonomi keluarga. Hal tersebut berdampak pada perubahan peran kaum perempuan dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga.

Partisipasi perempuan di pasar kerja diduga akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesempatan mengenyam pendidikan, menurunnya jumlah anak yang dilahirkan, serta berbagai kemudahan teknologi yang membantu perempuan untuk menjalankan dua peran sekaligus, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan bekerja.

Bagi keluarga kelas bawah, keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam bidang ekonomi sangat berarti. Bagi mereka yang tinggal di wilayah tertinggal dan status ekonomi miskin, peran ganda bukan suatu hal yang baru. Bahkan bagi perempuan, berperan ganda sudah ditanamkan semenjak mereka kecil oleh orang tua. Para remaja putri tidak dapat bermain bebas seperti layaknya remaja lainnya karena terbebani kewajiban bekerja untuk membantu perekonomian keluarga (Soetrisno, 1997). Para perempuan, khususnya pada keluarga miskin tidak terlalu memedulikan pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh dengan gaji rendah, seperti pembantu rumah tangga dan pekerjaan jasa domestik lainnya (Mudzhakar dkk., 2001).

Di Desa Pringgasela, Lombok Timur, NTB juga demikian. Namun, yang membedakan perempuan di desa ini adalah jenis pekerjaan yang digeluti. Perempuan Desa Pringgasela mayoritas bekerja di bidang ekonomi kreatif sebagai perajin tenun/penenun. Sebagian dari mereka bekerja berkelompok berdasarkan ikatan kekerabatan keluarga. Selain merupakan keahlian yang diperoleh turun-temurun, membuat tenun juga merupakan salah satu strategi ekonomi bagi mereka. Tingginya angka perempuan yang berstatus janda dan perempuan yang ditinggal oleh suami untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI mendorong pe-

rempuan di Desa Pringgasela untuk menekuni profesi sebagai pembuat tenun.

Salah satu studi tentang peran perempuan yang bekerja pada ekonomi kreatif tenun menyebutkan bahwa faktor utama yang mendorong perempuan bekerja pada ekonomi kreatif tenun adalah faktor ekonomi. Semakin sempitnya lahan pertanian dan berkurangnya kepemilikan lahan membuat pertanian dinilai tidak mampu lagi menjadi sumber mata pencaharian pokok keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan ekonomi di luar pertanian yang dapat menopang perekonomian keluarga, seperti industri rumah tangga atau industri kecil.

Mengingat pekerjaan di sektor pertanian yang bersifat musiman maka memungkinkan bagi keluarga petani untuk melakukan kegiatan non pertanian untuk menambah penghasilan keluarga. Walaupun dalam kasus Desa Pringgasela para perempuan perajin bukan berasal dari keluarga petani, dorongan ekonomi tetap menjadi alasan utama perempuan bekerja sebagai penenun.

Faktor alokasi waktu pun menjadi alasan yang rasional bagi perempuan untuk menggeluti usaha ini. Perempuan dinilai memiliki keleluasaan dalam penggunaan alokasi waktu karena peran domestik yang dimiliki. Para perempuan perajin bekerja setelah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga. Rata-rata mereka bekerja 7–8 jam sehari, baik yang bekerja di rumah sendiri maupun bekerja di tempat pengusaha tenun yang masih kerabat. Dari wawancara dengan perempuan penenun, mereka menyatakan bahwa membuat tenun adalah kegiatan yang menyenangkan dan tidak merasa terbebani. Hal tersebut karena selain mendapatkan penghasilan, mereka bekerja tidak terikat dengan waktu dan tidak meninggalkan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.

Potensi sumber daya kaum perempuan di Desa Pringgasela disadari merupakan modal dasar peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Namun, mayoritas perempuan di desa ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut berdampak pada kemampuan yang sangat terbatas dalam manajemen usaha, akses terhadap informasi harga, dan keterampilan bernegosiasi.

Selama ini ekonomi kreatif terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi yang melahirkan wujud kreativitas baru dalam bentuk ekonomi kreatif berdasarkan budaya lokal dan ilmu pengetahuan. Ekonomi kreatif tidak hanya mengenai penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya, dan lingkungan.

Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah yang ada di NTB mutlak dilakukan dan diperlukan keseriusan pemerintah secara konsisten untuk terus melakukan evaluasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif sehingga nantinya dapat bersaing di pasar lokal bahkan internasional.

Di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, perempuan-perempuan mengoperasikan alat tenun tradisional di depan rumah mereka. Hasil kerajinan mereka adalah kain tenun ikat dan songket tenun. Desa wisata berbasis ekonomi kreatif, seperti Desa Pringgasela di Lombok Timur layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat untuk dikembangkan.

Menenun adalah sebuah kewajiban yang harus dikuasai oleh gadis di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur. Kemampuan menenun merupakan salah satu bagian dari kebudayaan kearifan lokal Desa Pringgasela.

Sebelum menikah, seorang gadis harus membuat sebuah tenunan untuk calon suaminya nanti. Selebar kain yang menjadi lambang cinta dan kepatuhan. Dengan menenun, seorang perempuan bisa membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan hidup.

Di Desa Pringgasela ini, pembeli atau pengunjung dapat mengikuti proses penenunan yang dilakukan oleh perempuan penenun. Mulai dari memintal benang, mengikat benang untuk mendapatkan motif, pewarnaan, hingga menenun. Semua itu dilakukan ketika seorang perempuan mempunyai waktu luang, setelah menyelesaikan pekerjaan rutin di rumah.

Kerajinan tangan yang berbasis ekonomi kreatif berupa kain tenun Pringgasela ini banyak dikenal di kalangan luas, tidak hanya di Indonesia. Kain tenun Pringgasela banyak dikenal di negara lain,

bahkan ada yang secara khusus datang dari luar negeri, yakni Jepang datang khusus ke desa ini untuk belajar membuat kain tenun. Jika potensi yang dimiliki Desa Pringgasele diberdayakan maka dapat mengembangkan ekonomi berbasis kreatif yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Kain tenun di Lombok terdiri dari dua jenis, yaitu tenun ikat dan songket. Kain tenun ikat dikerjakan oleh para lelaki dan dalam sehari mereka bisa menghasilkan hingga tiga meter kain tenun ikat. Adapun para perempuan penenun songket dalam sehari mereka hanya mampu menenun maksimal 15 cm songket.

Lombok memiliki dua jenis tenun, yaitu songket dan ikat. Tenun songket hanya dibuat oleh para perempuan dengan alat manual. Tenun ikat dibuat oleh para lelaki dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Kain songket biasa digunakan oleh para perempuan. Ciri khasnya, kain songket ini memiliki sisi depan dan sisi belakang. Songket biasanya menggunakan benang emas sebagai campuran dari bahan katun yang biasa dipakai.

Pembuatannya pun berbeda. Paling sulit dari pembuatan songket ini terletak pada penentuan motif. Pengerjaannya yang manual membuat waktu tenun menjadi lama. MH, penenun dari Lombok Timur ini menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan satu songket bisa selesai dalam satu bulan (Wawancara dengan MH, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017). Bahkan, ada tenun songket yang baru selesai dalam waktu dua setengah bulan apabila motifnya rumit dan pengerjaannya tidak rutin.

NN, juga menambahkan bahwa para perempuan yang bekerja menenun songket dari pukul 08.00 hingga 17.00 biasanya hanya mencatat kemajuan tipis. “Sehari itu mereka bisa menenun minimal 10 sentimeter hingga maksimal 15 sentimeter. Panjang rata-rata tenun songket ini sekitar 12 sentimeter per hari” (Wawancara dengan NN, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017)

Biasanya para perempuan menenun songket dengan lebar 60 sentimeter dan panjang empat meter. Setelah selesai, songket itu akan dipotong dan disambungkan sehingga menjadi kain dengan panjang 2

meter dan lebar 120 sentimeter. “Ciri khas lainnya adalah sambungan di tengah untuk menyatukan dua kain itu” (Wawancara dengan NN, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017). Penyambungan kain itu tentu saja dilakukan oleh penjahit yang terampil agar motif dua belahan kain ini bisa menyatu sempurna. “Satu keluarga biasanya memiliki empat atau lima motif yang khas” (Wawancara dengan NN, Penenun Lombok Timur, NTB, 17 Juli 2017).

Adapun tenun ikat memiliki waktu produksi yang lebih singkat. Satu hari, penenun ikat dapat menyelesaikan hingga panjang 3 meter tenun ikat per hari dengan ATBM. Tenun ikat memiliki motif bolak-balik sehingga tidak dibedakan antara bagian depan dan bagian belakang. Tenun ikat hanya menggunakan bahan dari kain katun saja. Proses awalnya dimulai dari pemintalan benang. Setelah benang dipintal, benang-benang itu digambar motif dengan pensil. Motif tersebut lalu diikat dengan tali rafia untuk kemudian dicelupkan pada pewarna untuk dasarnya.

Perempuan dan tenun di Desa Pringgasela, Lombok Timur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ekonomi kreatif tenun bagi kaum perempuan bukan hanya sekadar keahlian yang diperoleh melalui garis keturunan, melainkan juga sebagai identitas sosial dan kultural masyarakat Pringgasela yang dinamis dan berkesinambungan.

Kedinamisan dan kesinambungan ekonomi kreatif tenun di Desa Pringgasela terlihat jelas dari transformasi fungsional tenun yang berawal dari pemenuhan kebutuhan adat budaya, berubah menjadi komoditas pasar hingga diekspor ke mancanegara.

Perubahan ekonomi kreatif tenun tersebut secara langsung dirasakan berpengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya lokal. Perubahan yang terjadi juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan seni itu sendiri. Seperti dikemukakan Bakker (1984), perubahan itu berasal dari pengalaman baru, pengetahuan baru, teknologi baru, dan akibatnya dalam penyesuaian cara hidup dan kebiasaan pada situasi baru. Namun, di sisi lain, seni gerabah juga mengandung nilai kontinuitas. Kontinuitas berarti

keberlangsungan kebiasaan-kebiasaan lama yang dipertahankan atau dipelihara oleh tradisi sosial yang ditanamkan pada generasi penerus melalui sosialisasi, renovasi, dan inovasi.

Pandangan masyarakat lokal bahwa membuat tenun adalah pekerjaan perempuan secara tidak langsung juga menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi kreatif tenun. Cara pandang masyarakat lokal yang bias gender terkait beban kerja, meminimalisasi campur tangan kaum laki-laki dalam proses pembuatan tenun. Kaum suami yang ikut membuat tenun dipandang sebagai laki-laki yang kurang maskulin oleh masyarakat karena mengerjakan pekerjaan perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang memakan waktu lama untuk mengubah cara pandang masyarakat lokal bahwa ekonomi kreatif tenun bukan hanya domain perempuan, laki-laki pun dapat berkontribusi di dalamnya. Hal ini menjadi penting, mengingat jenis pekerjaan pada setiap proses pembuatannya membutuhkan tenaga yang cukup besar. Dengan mendapat bantuan dari tenaga kerja laki-laki dapat meringankan beban perempuan perajin dalam berproduksi.

#### **D. Ekonomi Kreatif Tenun Berperspektif Gender di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Berdasarkan *framework* Moser (1993), ada enam *tools* dalam analisis gender terhadap kebijakan terkait ekonomi kreatif kain tenun di Kabupaten Lombok Timur, NTB, yaitu

1. *Gender roles identification-triple role*—peran lipat tiga;
2. *Gender needs assessment*—kebutuhan praktis dan strategis gender;
3. *Disaggregating control of resources and decision-making within the household*—siapa yang memiliki kontrol terhadap sumber daya dalam rumah tangga dan siapa yang memiliki *power* untuk membuat keputusan;
4. *Planning for balancing the triple role*—mengkaji dampak intervensi atau program pada peran *triple* perempuan;

5. *Distinguishing between different aims in interventions*—antara matriks kebijakan WID dan GAD; serta
6. *Involving women, and gender-aware organizations and planner, in planning*—melibatkan partisipasi perempuan, serta organisasi dan perencana yang sadar gender, dalam perencanaan.

## 1. Peran Lipat Tiga (*Triple Role*) di Kabupaten Lombok Timur

Di Lombok Timur menenun menjadi kegiatan mayoritas perempuan lintas usia (anak, remaja, dan dewasa). Menenun merupakan kerajinan turun-temurun yang tanpa dibina pun sejak umur 12 perempuan Lombok Timur sudah bisa melakukannya. Pada mulanya, tenun merupakan kegiatan adat yang dikerjakan di sela kesibukan utama para perempuan mengurus rumah tangga. Namun, sekarang tenun telah menjelma menjadi sumber penghasilan yang dapat menopang perekonomian rumah tangga selain dari bertani. Ibu-ibu penenun mengharapkan dari bertenun bisa membiayai sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, tenun tidak lagi menjadi kegiatan sampingan semata bagi perempuan di Lombok Timur, namun telah menjadi kegiatan rutin. Meskipun begitu, perempuan Lombok Timur tidak begitu saja melupakan tanggung jawabnya mengurus rumah tangga.

“Dari bangun pagi menyiapkan sarapan dulu. Waktu tidur, anak subuh sudah bangun. Setelah itu beres-beres rumah dulu, buat siapin sarapan, selesai itu tenun kita siapkan. Dari situ ada berapa jam setelah sarapan, masuk tenun. Sekitar jam 10–11, keluar lagi untuk masak makan siang keluarga. Setelah itu salat, masuk lagi menenun. Begitu setiap hari kita lakukan di desa kita. Begitu seterusnya, sampai asar lagi. Keluar dari tenun lagi, salat, istirahat sebentar, kadang-kadang masuk lagi ke tenun. Nah, baru malamnya kita istirahat. Tapi kadang-kadang ada juga yang masih nenun malam harinya gitu. Apa ya? Dibilang kerjaan samping-sampingan *full* ga ada istirahatnya maksudnya gitu. Terus-menerus kita kerjakan

kan karena pembuatannya cukup lama ya.” (MM, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Pentingnya peran perempuan dalam keluarga diistilahkan sebagai “tiang desa”.

“ . . . satu desa tidak akan kuat kalau tidak ada ibu, negara tidak akan kuat kalau tidak ada ibu. Kalau di desa dia mendirikan tiang desa, kalau di kabupaten Ibu Bupati jadi dutawan. Saya bukan tanpa dasar berbicara seperti itu, di rumah itu kalau ibu tidak perhatian pada anak, anak menjadi nakal. Karena bapak hanya keluar tidak peduli, dan perasaannya ya sedikit, kalau ibu sampai mati. Nah karenanya, dengan dasar karena dia tiang, makanya perlu kita jaga dengan baik. Kita buat dia wadah, kita satukan dia, kita bikinkan dia kegiatan, kita buat dia jadi penghasil.” (SH, Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli, 2017).

Tak hanya melakukan aktivitas produksi tenun, ibu-ibu penenun memanfaatkan jaringan seperti bergabung dalam koperasi perempuan untuk memasarkan hasil tenunnya.

“Kita di Pringgasela kan ada 6 kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh LPSDM. Dulu tahun 2013 itu kita dibentuk kelompok, di setiap kelompok itu ada dua puluh orang dan di setiap kelompok juga memiliki pengurus, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, di situ kita diajarkan membentuk koperasi kecil-kecilan mungkin istilahnya. Kita juga mengeluarkan simpanan pokok, simpanan wajib juga ada di setiap kelompok.” (MM, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

Meskipun sibuk dengan kegiatan reproduktif dan produktifnya, penenun perempuan di Lombok Timur tidak melupakan pentingnya kehidupan bermasyarakat. Mereka terlibat dalam forum-forum dengan pemerintah seperti Musrenbang Perempuan untuk menyampaikan aspirasi, tergabung dalam Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan koperasi perempuan.

“Sementara ini dalam bentuk koperasi, jadi dibina dalam bentuk koperasi. Jadi dia bentuk koperasi perempuan istilahnya, di samping menampung dalam bentuk tabungan, dia juga memberi bantuan dalam bentuk tunai. Tentunya dalam aturan mereka, itu koperasi punya itu saya tidak bisa menjawab. Jadi di samping mereka membantu modal, peralatan juga dibantu, promosi juga ikut membantu sama dengan kita. Kerja sama, kolaborasi iya.” (SH, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli, 2017).

Di Lombok Timur terdapat Musrenbang khusus perempuan yang prakarsai oleh LPSDM dan kemudian diakui oleh pemerintah daerah karena melihat respons dan dampak sosial yang dihasilkan cukup baik.

“... melalui Bappeda itu bisa terlaksana Musrenbang Perempuan, itu kan sudah ada, tapi perdanya tidak ada, sudah tidak penting perdanya saya katakan, yang penting dilaksanakan. Jadi, sudah empat tahun terlaksana Musrenbang Perempuan dan kemudian kita juga menginisiasi untuk di Lombok Utara. Jadi, dua kabupaten ini punya Musrenbang Perempuan. Bahkan pembelajaran dari Musrenbang Perempuan sudah diadopsi oleh Bappenas sebagai pembelajaran untuk mengisi laporan Indonesia dalam mengatasi capaian SDGs. Ini untuk menjawab bahwa perempuan-perempuan dari kelompok miskin dan marginal itu terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan melalui Musrenbang Perempuan. Jadi, ini suatu kebanggaan bagi Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Lombok Timur sudah empat kali Musrenbang Perempuan dan nanti tahun depan akan sampai tingkat desa. Tapi, kemudian rencana-rencana yang sudah diusulkan oleh para ibu-ibu di sini dari berbagai unsur ini tidak bisa dikawal. Ada beberapa usulan yang ditolak dan dihapus karena dianggap tidak penting. Padahal sebetulnya penguatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya perempuan terutama, baik itu di ekonomi, pelayanan konseling, pendidikan politik, itu semuanya masuk. Tapi, yang *goal* tahun ini hanya pendidikan politik.” (RN, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Kondisi sosial dan ekonomi selama ini menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sehingga dampak kebijakan publik terhadap dua kelompok gender ini—sebagaimana pada kelompok etnis, ras, usia, daerah—berbeda. Analisis gender menentang pandangan *gender-neutrality*, dan membantu peneliti membandingkan bagaimana laki-laki dan perempuan terpengaruhi oleh suatu kebijakan (Status of Women Canada, 1996). Melalui analisis berbasis gender, perbedaan dampak sosial-ekonomi dapat diidentifikasi dan, pada gilirannya, dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan dan perumusan kebijakan berdasarkan bukti atau *evidence-based policy*.

Lalu, bagaimana peran laki-laki di Lombok Timur? Seperti pada umumnya, laki-laki di Lombok Timur melakukan aktivitas produksi seperti bertani, berkebun, dan tak jarang mereka terlibat dalam proses menenun, seperti membeli benang, menyiapkan alat tenun, dan membantu pemasaran hasil tenun.

“Jadi dalam mendidik anak itu siapa yang sempat memberi perhatian, dalam pembiayaan secara bersama-sama, tetap itu di bapak. Syukur kalau menghasilkan ibu-ibu, dengan demikian bapak juga pengertian jangan “Eh jangan kerja itu.” Tidak, mana dia memberi perhatian seperti membeli benang, membeli alat, bapaknya yang keluar. Kemudian yang memasarkan bapaknya.” (SH, Wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Menurut hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 2% laki-laki terlibat dalam proses produksi tenun meskipun dengan ATBM. Ini berbeda dengan kebiasaan penenun perempuan yang menggunakan alat tenun tradisional.

“Tenun ini diproduksi rata-rata oleh perempuan, itu 98% perempuan jadi 2% nya laki. Yang laki pun itu bukan tenun yang tradisional, tapi tenun yang ATBM, sudah berkembang dari yang tradisional ke yang lebih maju. Berikutnya karena ini ditangani perempuan, yang namanya perempuan kan kalau tidak didampingi lemah, tidak punya pekerjaan kan lemah ya. Harganya juga lebih rendah kalau dia

sudah punya kesibukan, industri tenun nilai perempuannya semakin meningkat, semakin dihargai oleh orang lain.” (SH, dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Para lelaki ini juga memegang peran sebagai pemangku atau pemimpin baik di rumah maupun di masyarakat. “Kebanyakan perempuan ya yang menenun. Cuma yang jadi pemangku laki-laki.” (HI, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

## 2. Kebutuhan Praktis Gender di Lombok Timur

Beberapa kebutuhan praktis gender yang dibutuhkan oleh masyarakat Lombok Timur terutama penenun, di antaranya (a) penyediaan layanan kesehatan yang memadai, (b) peluang untuk mendapatkan penghasilan dari tenun, (c) penyediaan tempat tinggal dan kebutuhan dasar, dan (d) kebutuhan strategis gender.

### a. Penyediaan Layanan Kesehatan

Penyediaan pelayanan kesehatan bagi para perempuan, khususnya penenun di NTB sangatlah diperlukan karena pekerjaan yang mereka geluti membuat mereka harus duduk lama berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan untuk membuat satu helai kain tenun. Untuk melihat akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan, penulis melakukan wawancara dengan pihak dinas terkait, serta melihat tanggapan dari para penenun melalui FGD yang dilakukan di Lombok Timur, NTB.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di NTB, pembahasan akses pelayanan kesehatan hanya ditemukan dari hasil FGD yang dilakukan bersama para penenun dan LSM pendamping. Berikut potongan wawancara yang memberikan tanggapan terkait pelayanan kesehatan bagi para perempuan di NTB:

“... Pemeriksaan HIV-AIDS itu *delete*, coba? Pemeriksaan IVA dan *pap smear*, *delete*. Lah kalau ini semua usulan ibu-ibu sudah bersemangat untuk itu, tapi di *delete-delete-delete*, apa dong?...” (HI, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

Berdasarkan penggalan wawancara tersebut, terlihat bahwa beberapa pelayanan kesehatan IVA dan *pap smear* bagi perempuan di NTB telah dihapuskan sehingga memunculkan kekecewaan dari berbagai pihak untuk kembali memperjuangkan hak perempuan.

Pemeriksaan IVA dan *pap smear* sendiri sangat dibutuhkan perempuan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Kanker serviks ini menjadi penyebab utama kematian perempuan nomor dua di dunia setelah penyakit jantung koroner. Setiap dua menit satu perempuan meninggal karena kanker tersebut. Di Indonesia, kanker serviks menjadi penyebab kematian utama dan terdapat lebih dari 15.000 kasus dan kurang dari 8.000 kematian per tahun. Jelas bahwa pemeriksaan IVA dan *pap smear* sangat dibutuhkan oleh para perempuan. Dengan dihapuskannya layanan tersebut, pemerintah telah memotong dan lalai dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi perempuan.

Penulis pun belum menemukan pemeriksaan kesehatan dan pelayanan khusus bagi para penun perempuan di NTB. Pelayanan kesehatan yang diberikan masih berupa pelayanan umum bagi para perempuan. Itu pun mengalami penghapusan pada pemeriksaan IVA dan *pap smear* sehingga terlihat bahwa kesejahteraan para penun perempuan belum menjadi perhatian utama pemerintah.

#### b. Peluang untuk Mendapatkan Penghasilan

Para perempuan di NTB mengawali menenun sebagai pekerjaan sampingan, tetapi lama-kelamaan pekerjaan menenun ini pun menjadi pekerjaan utama. Pekerjaan menenun ini sangat membantu beberapa penun perempuan yang memang berekonomi lemah. Pekerjaan menenun kemudian dikembangkan lebih intensif di kedua daerah tersebut sehingga para penun perempuan ini pun mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dan membantu membiayai sekolah anak-anak. Para suami mereka pun mengizinkan istri mereka untuk ikut menenun karena memang pekerjaan ini dapat membantu meningkatkan perekonomian.

### c. Penyediaan Tempat Tinggal dan Kebutuhan Dasar

Akses yang terbuka bagi para perempuan di NTB untuk ikut membantu perekonomian keluarga menimbulkan problem lain, yakni mereka tetap harus melayani suami, mengurus anak, dan rumah tangga. Di lain pihak, mereka juga harus tetap berkonsentrasi untuk menyelesaikan tenunan dengan durasi yang cukup lama untuk sehelai kain tenun. Tidak jarang beberapa penenun perempuan yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, menitipkan anak mereka pada sanak famili karena mereka harus segera menyelesaikan tenunan mereka.

### d. Kebutuhan Strategis Gender

Kebutuhan strategis gender yang dibutuhkan oleh masyarakat Lombok Timur terutama penenun, di antaranya 1) pembagian kerja gender, 2) pengurangan beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, 3) penghapusan diskriminasi, serta 4) ancaman kekerasan laki-laki.

#### 1) Pembagian Kerja Gender

Penenun di NTB didominasi oleh para perempuan baik itu yang masih remaja maupun sudah berkeluarga. Para suami bekerja di ladang, kuli bangunan, dan pekerjaan lainnya. Namun, para suami tetap terlibat dalam proses menenun, seperti yang dapat digambarkan pada kutipan berikut:

*“Asalamualaikum wr.wb. Peran suami saya sangat banyak membantu, ketika saya masuk menenun ya saya meminta bantuannya sedikit. Kan ada prosesnya banyak sekali, ketika dia tidak bekerja dia bantu melinting. Kan kita udah di dalem, pas gesek papannya habis, papan kan yang masukan benang itu. Itu kalau sudah habis pas kita udah duduk, dia kita suruh bantu. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita disuruh buat itu, kita keluar, kopi, buat makan, setelah itu kita masuk lagi. Suami bekerja kuli bangunan, serabutan. Kalau pas ada kerjaan dia tidak bantu, kalau pas tidak ada kerjaan dia kita suruh bantu. Mau sih tapi, sama sebenarnya, kalau pas dia lagi butuh mau dibeliin rokok ya kita bantu dia beliin rokok. Sebenarnya pas dia keluar gaji sebulan, kadang dua bulan, apalagi kalau penghasilan*

tenun tidak mencukupi. Apalagi wajib kita keluarkan 15 ribu per-pagi, itu wajib siang atau malam, paginya belum, ngajinya belum. Belum anaknya minta dua atau tiga ribu, kan penghasilan kita satu kain tenun dua minggu itu 400 kalau kita jual, kalau dia laku lagi. Kadang dua minggu kadang satu bulan jadinya, tergantung kita masuk. Kalau kita masuk jam enam pagi keluar jam 10 pagi bisa itu jadi dua minggu ...” (HI, FGD di Lombok Timur, 18 Juli, 2017).

## 2) Pengurangan Beban Pekerjaan Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak

Para perempuan penenun di NTB bertanggung jawab sepenuhnya pada pengasuhan anak dan pekerjaan rumah. Mereka pun tetap harus menenun.

“... Dari bangun pagi menyiapkan sarapan dulu. Waktu tidur, anak subuh sudah bangun. Setelah itu beres-beres rumah dulu, buat siapin sarapan, selesai itu tenun kita siapkan. Dari situ ada berapa jam setelah sarapan, masuk tenun. Sekitar jam 10–11, keluar lagi untuk masak makan siang keluarga. Setelah itu salat, masuk lagi menenun. Begitu setiap hari kita lakukan di desa kita. Begitu seterusnya, sampai asar lagi. Keluar dari tenun lagi, salat, istirahat sebentar, kadang-kadang masuk lagi ke tenun. Nah baru malamnya kita istirahat, tapi kadang-kadang ada juga yang masih nenun malam harinya gitu...” (IS, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Berdasarkan penggalan wawancara tersebut, tergambar bahwa belum ada bantuan yang cukup dari para suami terhadap pekerjaan di rumah.

## 3) Penghapusan Diskriminasi

Berdasarkan hasil wawancara di NTB, ditemukan bahwa NTB belum memiliki progres dan respons yang cukup baik terhadap perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa diperlukan adanya prioritas program yang memang melindungi para perempuan dari diskriminasi

baik dalam politik maupun ekonomi. Seperti contohnya program tersebut, antara lain

- a) pelatihan anggaran berbasis gender (*gender budget statement*);
- b) pelatihan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan dana usaha kepada kelompok usaha dibantu oleh PKK;
- c) kegiatan PUG yang mencakup pelatihan tentang gender analisis kebijakan; dan
- d) pelatihan *public speaking* dan manajemen kepemimpinan bagi para perempuan.

#### 4) Ancaman Kekerasan Laki-laki

Pembahasan tentang kekerasan di rumah tangga yang dilakukan oleh suami terdapat pada hasil wawancara dengan Dinas Sosial NTB. Menurut Dinas Sosial NTB jarang sekali ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para suami kepada istrinya.

### 3. Sumber Daya di Lombok Timur

Faktor pertama adalah sumber daya alam. Sementara itu, untuk sumber daya alam, ekonomi kreatif tenun memiliki beberapa keterbatasan untuk menciptakan ekonomi kreatif yang masif. Kurangnya perkebunan kapas di daerah membuat ekonomi kreatif yang banyak digeluti perempuan ini sulit untuk mendapatkan sumber daya apalagi berkembang. Perkebunan kapas telah menurun drastis selama dekade terakhir. Dengan demikian, kebutuhan perempuan untuk mendapatkan sumber daya didapatkan dari luar daerah. Pada awal tahun 1900, ada berbagai perkebunan kapas di NTB. Namun, karena kurangnya dukungan dan pasar pemerintah, banyak petani memutuskan untuk menutup perkebunan tersebut. Pemerintah sebagai aktor terkemuka di ekonomi kreatif ini tidak melakukan apa pun jika menyangkut penurunan sumber daya alam. Perkebunan kapas merupakan sumber daya alam utama dalam ekonomi kreatif tenunan. Untuk mengolah ekonomi yang sehat, pemerintah perlu mendukung ekonomi lokal, dalam hal ini, ekonomi kreatif tenunan. Singkatnya, baik pria maupun wanita

kurang dalam mengakses sumber daya. Untuk menghasilkan, penenun perlu mengimpornya dari wilayah lain. Dengan demikian, membuat mereka sangat rentan terhadap gangguan pasokan sumber daya.

Faktor kedua adalah pelatihan. Ada berbagai pelatihan yang diberikan kepada para penenun perempuan, mulai dari peningkatan kapasitas hingga keterampilan administrasi. Setiap daerah memiliki kebijakan sendiri—bergantung pada institusi dan departemen. Di NTB, misalnya, ada beberapa pelaku yang terlibat dalam penguatan kapasitas penenun perempuan di NTB, salah satunya adalah Bank Indonesia. Alih-alih memberi mereka uang, Bank Indonesia mengambil pendekatan yang berbeda, mereka memperkuat kemampuan perempuan dalam bidang tenun melalui pelatihan. Dengan demikian, mereka akan bisa mendukung diri mereka di masa depan. Ada juga upaya untuk membentuk persatuan antara penenun perempuan untuk memajukan minat mereka terhadap ekonomi kreatif tenun. *Union* memungkinkan mereka memiliki daya tawar yang lebih tinggi kepada pemerintah.

Faktor ketiga adalah modal. Ada upaya dari pemerintah untuk menempatkan perempuan pada serikat perempuan, yang memungkinkan mereka mengakses pinjaman dari sektor swasta atau pemerintah. Sulit bagi penenun individu untuk mendapatkan pinjaman karena mereka dianggap kurang kompeten dibandingkan serikat pekerja. Dalam serikat, aktivitas mereka bisa diukur. Ini akan menjadi gerakan berisiko untuk meminjamkan seseorang karena tidak ada yang bertanggung jawab jika ada yang salah arah. Lebih jauh lagi, akan lebih mudah bagi debitur untuk mengawasi kemajuan yang dibuat oleh individu yang menjadi anggota serikat pekerja.

Di NTB, faktor pinjaman lebih mudah karena pemerintah tidak mewajibkan mereka untuk berada dalam serikat pekerja. Karena kebijakan yang berbeda di institusi tersebut, Pemerintah NTB mengizinkan penenun perempuan untuk menerima pinjaman berdasarkan penampilan mereka dan bukan berdasarkan pada apakah mereka anggota serikat atau tidak. Pemerintah mengakui bahwa ada beberapa kendala dalam membantu masyarakat, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola uang di masyarakat.

Faktor keempat adalah pemasaran. Pemasaran telah lama menjadi faktor yang menentukan keberhasilan satu produk, ekonomi kreatif tenunan tidak terkecuali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah NTB menghasilkan solusi yang berbeda. Perempuan yang membuat tenunan sering tidak mendapatkan keuntungan sebanyak kolektor karena kurangnya pengetahuan manajerial dan pemasaran. Selanjutnya, kolektor adalah orang yang bertanggung jawab menjual produk tenunnya ke dunia luar. Para kolektor sering membeli produk tenunan dengan harga terendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dengan demikian, NTB bermaksud untuk mengajarkan alat pemasaran agar perempuan di ekonomi kreatif tenunan dapat menunjang dirinya di masa depan. Di beberapa tempat, pemasaran ditangani oleh Kepala, yang berarti laki-laki. Wanita yang menciptakan tenun dan pria menjualnya. Di NTB, pemerintah antusias dalam mempromosikan ekonomi kreatif tenun melalui pameran, baik lokal maupun internasional.

#### **4. Menyeimbangkan Peran dan Perencanaan Intersektoral di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Kondisi yang relatif sama terkait fasilitas permodalan juga terjadi di NTB meskipun dukungan koperasi di NTB belum terlihat kuat. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah komitmen dan perhatian pemerintah daerah NTB yang cenderung mengarah kepada sektor pariwisata sebagai kekuatan ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. Hal yang menarik untuk disoroti dari berbagai intervensi yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur dan di level provinsi di NTB adalah program-program yang mendukung penyampaian aspirasi penenun. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan Musrenbang Perempuan adalah dua contoh kuat dari keberhasilan advokasi organisasi masyarakat sipil di NTB untuk mendorong pemerintah melibatkan (penenun) perempuan dalam perencanaan pembangunan.

Forum PEL adalah forum lintas dinas dan sektoral yang meskipun digagas oleh LSM, telah disambut baik dan menjadi komitmen

Bappeda Provinsi. Forum ini mempertemukan pihak-pihak terkait pembangunan ekonomi secara rutin sehingga menjadi tempat menyampaikan aspirasi yang sangat baik bagi perwakilan penun perempuan. Musrenbang Perempuan juga adalah inisiatif yang digagas oleh LSM dan dimulai di Lombok Timur, tetapi kini telah menjadi model bahkan di daerah lain seperti Aceh.

Kedua provinsi telah menunjukkan berbagai contoh intervensi yang dilaksanakan guna mendorong produksi tenun, dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan para perempuan pelaku usaha rumah tangga/mikro. Beberapa hal, seperti yang telah diungkapkan, perlu terus menjadi perhatian bagi pelaku, pengamat, dan utamanya pembuat kebijakan di NTB. Program intervensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan peran ganda-tiga perempuan sehingga program/proyek yang dilaksanakan tidak memberi beban atau tekanan tambahan bagi perempuan di salah satu peran dan menghambat penyeimbangan aktivitas di peran yang lain. Selain itu, dibutuhkan lebih banyak program yang bersifat intersektoral yang responsif gender sehingga perencanaan gender dalam pembangunan dapat mewujudkan emansipasi perempuan dari subordinasi mereka, serta menuju *equality*, *equity*, dan *empowerment*.

## **5. Peningkatan Peran Wanita dan Gender dalam Pembangunan di Lombok Timur**

Peningkatan peran wanita dan gender dalam pembangunan di Lombok Timur dapat ditingkatkan dengan beberapa rencana, seperti kesejahteraan, ekuitas, anti-kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan.

### **a. Kesejahteraan**

Kesejahteraan kesehatan perempuan di NTB kurang menjadi fokus utama karena seperti telah disebutkan pada *tools 2*, pelayanan IVA dan *pap smear* telah dihapuskan di NTB.

## b. Ekuitas

Kesetaraan gender di NTB dapat terlihat pada akses organisasi yang diberikan kepada perempuan sehingga para perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam Musrenbang dan koperasi, seperti halnya yang dilakukan oleh bapak-bapak.

## c. Anti-kemiskinan

Program peningkatan dan pemberdayaan ekonomi sudah dijalankan di kedua daerah tersebut. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah NTB adalah

- 1) pemberian pelatihan untuk meningkatkan produktivitas penenun; dan
- 2) pembentukan koperasi penenun perempuan.

Namun, program-program ini tidak didukung dengan pemberian dana kepada para pelaku usaha kecil tersebut.

## d. Efisiensi

Seperti yang telah diketahui pada beberapa poin sebelumnya bahwa perempuan diberikan akses untuk berorganisasi. Sayangnya, partisipasi perempuan dalam berorganisasi ini pun terlihat tidak efisien karena pada akhirnya urusan keluarga yang akan terlebih dahulu diutamakan.

“...Semua keinginan sudah dituangkan, hanya realisasinya belum. Lebih diutamakan bapak-bapak, karena mereka bilang harus sawah yang diutamakan dulu. Jadi, ada realisasi pengerjaan saluran irigasi sudah dikerjakan semua. Mama-mama punya permintaan masih belum terjawab.” (IS, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli, 2017).

Selain permintaan, kebutuhan dan kepentingan perempuan yang belum lancar jalannya di organisasi, pemberdayaan ekonomi dengan adanya pelatihan dan pembinaan pun dapat dinilai kurang efisien karena permasalahan yang paling penting adalah pemasaran

produk. Para penenun menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk setelah produksi tenun mereka jadi. Terkadang mereka harus menjual tenun mereka dengan harga murah karena membutuhkan uang dengan cepat. Hal ini menjadi pilihan utama mereka karena jika menjual di toko souvenir maka akan membutuhkan waktu hingga produk mereka terjual. Bahkan, harga jualnya pun bervariasi, ada yang tinggi yang pastinya menguntungkan para penenun, tetapi ada juga yang memberikan harga rendah.

#### e. Pemberdayaan

Program pemberdayaan ekonomi khusus ekonomi kreatif tenun perempuan belum terlihat di NTB. Program yang dijalankan pemerintah lebih kepada ekonomi kreatif secara umum. Bahkan, berdasarkan FGD di NTB, anggaran dinas pemberdayaan perempuan lebih kecil daripada alokasi infrastruktur.

## **6. Pelibatan Perempuan dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Pelibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur, NTB menggambarkan vitalnya peran forum yang diinisiasi oleh pemerintah daerah yang berfungsi memberi masukan bagi pemerintah daerah. Salah satu forum tersebut adalah forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

“...Forum Pengembangan Ekonomi Lokal *konsen* mengangkat tenun menjadi produk unggulan. Perempuan, ibu-ibu juga menjadi *konsen* kami, karena kita melihat kalau ini kita angkat menjadi produk unggulan, berarti itu akan memberi ruang bagi para ibu-ibu penenun untuk tenun itu sudah tidak menjadi usaha sampingannya. Ini sebenarnya di tingkat kabupaten sudah mendiskusikan bagaimana mendudukkan para *stakeholder-stakeholder*, misalnya *art shop-art shop* itu untuk membangun kesepakatan harga misalnya. Supaya antar *art shop* satu dengan *art shop* lainnya tidak berbeda, tetapi kita

punya standar gitu.” (RR, FGD di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 18 Juli 2017).

Selain forum yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, kelompok atau organisasi masyarakat sipil yakni LPSDM juga turut serta dalam menginisiasi dan memfasilitasi pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi kreatif tenun. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran kelompok–kelompok penenun di Pringgasea.

Secara substansi (konten), isu kepentingan perempuan terkait dengan ekonomi kreatif tenun juga sudah diartikulasikan oleh perempuan melalui forum perencanaan (Musrenbang). Untuk itu, pemerintah dan instansi terkait terus mendorong berkembangnya ekonomi kreatif tenun di Lombok Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memperkenalkan dan mempromosikan toko kerajinan atau *art shop* yang bergerak di bidang kerajinan tenun dan suvenir.

## E. Penutup

Pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Lombok Timur NTB dapat terus dikembangkan sebagai tulang punggung ekonomi kreatif. Dukungan dapat diberikan dengan memfasilitasi para pelaku UKM kreatif secara khusus melalui peningkatan keterampilan di bidang permodalan. Ekonomi kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menciptakan kesejahteraan di daerah. Ekonomi kreatif merupakan hasil dari kreativitas dan daya cipta setiap individu.

Penenun perempuan telah menunjukkan geliatnya dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur NTB. Perempuan-perempuan merupakan kelompok yang proaktif dalam peningkatan kesejahteraan, paling tidak di keluarganya. Mereka merupakan kelompok yang aktif karena berani mengambil inisiatif dalam pengembangan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Penguatan terhadap kapasitas perempuan perajin juga harus tetap diagendakan. Hal ini karena pelaku utama ekonomi kreatif tenun adalah perempuan. Strategi yang paling umum dilakukan adalah menempatkan perempuan secara langsung sebagai penerima manfaat utama (Holmes & Jones, 2010). Bentuk bimbingan langsung kepada perempuan penenun berupa pelatihan teknis pembuatan, desain, dan pemasaran dinilai sukses meningkatkan kapasitas perempuan di desa Pringgasela. Selain itu, hasilnya juga terlihat dari munculnya kader-kader perempuan yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu untuk menjadi *leader* dalam pemberdayaan perempuan. Perempuan yang berdaya dapat menjadi agen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa melakukan investasi melalui pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan satu langkah ke depan untuk mewujudkan kesetaraan gender, mengentaskan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

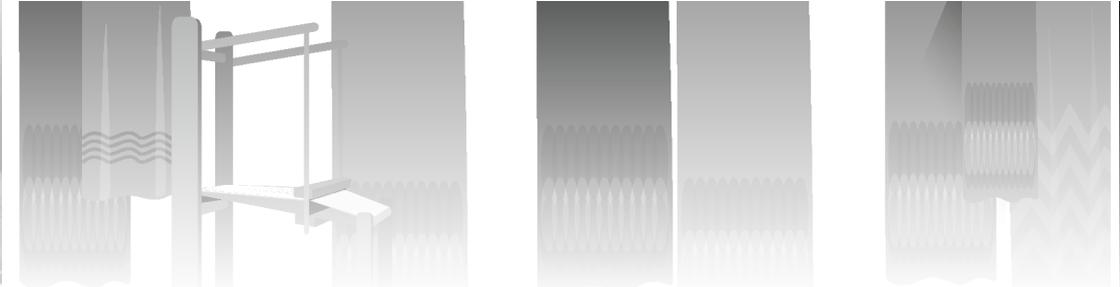
## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2015). *ASEAN economic community blueprint 2025*.  
[https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP\\_2025r\\_FINAL.pdf](https://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf)
- Aufa, F & Mulyati, S. (2008). *Ekonomi kreatif: Perekonomian berbasis seni sebagai alternatif pembangunan perekonomian Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2017). *Kabupaten Lombok Timur dalam angka 2017*. <https://lomboktimurkab.bps.go.id/publication/2017/08/11/64ed2d794d5335ba27991438/kabupaten-lombok-timur-dalam-angka-2017.html>
- Bakker, S. (1984). *Filsafat kebudayaan: sebuah pengantar*. Kanisius.
- Holmes, R., & Jones, N. (2010). *Rethinking social protection using a gender lens : Working Paper 320*. Overseas Development Institute.

- Manurung, M. E. (2013). Peran perempuan dalam membangun kewirausahaan kreatif busana muslim dan film di Bandung. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXII(1), 1–20.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: theory, practice & training*. Routledge.
- Al-Hibri, A., Mudzhar, M. A., & Abdullah, M. A. (Ed). (2001). *Wanita dalam masyarakat Indonesia*. Sunan Kalijaga Press.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2016). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Nusa Tenggara Barat. (2016). [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Pergub%20No.%2010%20Tahun%202016.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20No.%2010%20Tahun%202016.pdf)
- Septarini, E. C. (2016, Desember 14). *Dorong UMKM kreatif, Bank Indonesia NTB bentuk klaster tenun*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161214/87/612010/dorong-umkm-kreatif-bank-indonesia-ntb-bentuk-klaster-tenun>
- Soetrisno, L. (1997). *Kemiskinan perempuan dan pemberdayaan*. Kanisius.
- Status of Women Canada. (1996). *Gender-based analysis: a guide for policy making*. Staigh Associates Limited.
- Throsby, D. (2010). *The economics of cultural policy*. Cambridge University Press.
- UNDP (2012, 27 Juli). *Gender and economic policy management initiative: Asia and the Pacific*. <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/gepmi-module-02-%E2%80%93gender-responsive-policy-analysis>
- World Health Organization. (2011). *Gender mainstreaming for health managers: a practical approach*. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064\\_eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501064_eng.pdf)



Buku ini tidak diperjualbelikan.



# BAB 4

## MEMAHAMI DINAMIKA GENDER DALAM EKONOMI KREATIF TENUN DI KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA Tenggara Timur

*Longgina Novadona Bayo*

Bab ini bertujuan memahami dinamika gender dalam pengembangan industri kreatif tenun di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Seiring dengan upaya industrialisasi guna mempopulerkan kain tenun di kancah industri kreatif nasional maupun internasional, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan perhatian dengan membangun ekonomi kreatif berbasis kain tenun, salah satunya di Provinsi NTT. Namun, industrialisasi kain tenun ini perlu dibarengi dengan desain kebijakan terintegratif lintas sektor yang berpihak pada perempuan sehingga industrialisasi kain tenun tidak menambah beban bagi perempuan. Oleh karena itu, kerangka kebijakan pengembangan industri tenun yang memiliki perspektif gender menjadi salah satu kunci untuk pengembangan industri berbasis budaya ini.

---

©2023 L. N. Bayo

Universitas Gadjah Mada, *E-mail*: novabayo@ugm.ac.id

Bayo, L. N. (2023). Memahami dinamika gender dalam ekonomi kreatif tenun di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (91–118). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c672 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tulisan ini terbagi dalam empat bagian. Bagian pertama memaparkan peran tenun sebagai identitas kultural masyarakat NTT dengan perempuan berperan sentral sebagai agensi kebudayaan. Bagian kedua memotret kondisi kekinian terkait kebijakan pengembangan industri kreatif tenun di Kota Kupang. Bagian ketiga mendiskusikan kerangka Moser dalam menganalisis kebijakan pengembangan tenun di NTT, membicarakan hasil analisis gender terhadap praktik kebijakan industri kreatif tenun di Kota Kupang, termasuk juga menjelaskan perihal tantangan dan prospek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekonomi kreatif tenun yang berperspektif gender, sedangkan pada bagian terakhir adalah kesimpulan.

## **A. Tenun dan Identitas Kultural: Perempuan sebagai Agensi Budaya**

Bagi masyarakat di Provinsi NTT, kain tenun memiliki makna tersendiri dalam budaya dan keseharian mereka. Menurut penulis, setidaknya ada dua fungsi kain tenun bagi masyarakat NTT. *Pertama*, tenun sebagai fungsi budaya. Tenun adalah identitas budaya NTT. Pengetahuan menenun diwariskan ke anak perempuan sebagai bagian dari pemagangan mereka hingga dewasa, sebagaimana yang diharapkan oleh pola budaya yang berlaku. Dengan kata lain, menenun adalah penanda kedewasaan seorang perempuan sehingga ia siap untuk menikah atau hidup berumah tangga. Dalam upacara perkawinan misalnya, seorang perempuan harus membalas pemberian dari pihak pria (*belis* atau *mas kawin*) dengan kain tenun. Salah satu buku karya Ferry Purnawan (2004) menggambarkan tradisi tersebut sehingga bukunya diberi judul *Kain untuk Suami: Tenun Tradisional Nusa Tenggara Timur*. Namun, lebih dari itu, kain tenun adalah identitas budaya orang NTT karena nyaris seluruh kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari kain tenun. Kehidupan masyarakat NTT terkait erat dengan kain tenun dalam setiap siklus kehidupan. Dalam upacara perkawinan maupun kematian, tenun adalah hantaran yang wajib ada, bahkan sering kali dalam jumlah yang besar. Di samping itu, dalam kehidupan sehari-

hari tidak jarang denda atau sanksi adat juga mensyaratkan kain tenun sebagai simbol rekonsiliasi konflik antarpihak yang berkonflik.

*Kedua*, kain tenun sebagai penanda kelas sosial (*social prestige*). Khususnya di Timor, tradisi menenun adalah tradisi yang dihidupkan oleh kalangan bangsawan. Kain tenun awalnya tidak diperuntukkan bagi rakyat biasa, namun diprioritaskan untuk kelompok bangsawan dan keturunannya. Motif-motif kain tenun baru ada sekitar awal tahun 1990-an. Bahkan, warna kain tenun pun adalah simbol strata sosial seseorang. Misalnya, warna merah pada motif kain tenun melambangkan strata teratas seseorang (baca: bangsawan), sedangkan warna hitam melambangkan strata terbawah seseorang (baca: hamba). Namun, dengan perkembangan kemampuan menenun di masyarakat, motif tenun mulai beragam.

Jika secara umum kain tenun memiliki dua fungsi (fungsi identitas budaya dan fungsi penanda kelas) bagi masyarakat NTT, bagi kaum perempuan kain tenun memiliki fungsi yang lebih spesifik, yakni ruang narasi perempuan. Sebagai warisan budaya, kain tenun sangat dekat dan berhubungan erat dengan perempuan. Perempuan berperan sentral dalam rantai produksi tenun. Cerita seorang perempuan terefleksikan dalam selembar kain tenun. Karenanya, selain menggambarkan aspek *tangible* (yakni bahan dan keunikan tenun), di dalam kain tenun tersimpan aspek *intangible*, yakni kearifan lokal/nilai lokal yang tertanam dalam proses, narasi lisan maupun legenda daerah. Fenomena tenun sebagai ruang narasi perempuan ini juga terdapat di belahan dunia lain, salah satunya di Peru. Penenun perempuan di Peru mengatakan bahwa proses menenun adalah refleksi dari hidup keseharian para penenun. Setiap tenunan mengandung kisah hidup mereka, memanasikan pengalaman khas dari kehidupan mereka, keluarga mereka, dan komunitas mereka (Van Etten, 2010). Sebagaimana Ulos di Sumatra Utara (Nugroho dkk., 2021), tenun dengan demikian adalah alat utama untuk menampilkan tradisi dan ritual bagi masyarakat NTT sehingga kerajinan tenun menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan perempuan. Tenun digunakan dalam ritual kelahiran, perkawinan hingga kematian seseorang. Dengan demikian, konteks dan motif menjadi penting ketika seorang perempuan menenun.

Melihat sentralnya peran perempuan dalam menenun tersebut, perempuan adalah agen budaya dan transformasi yang memberikan informasi yang terkait konteks lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan kondisi alam di mana perempuan tersebut hidup. Merujuk Del Solar (2019), posisi perempuan sebagai agen budaya di Peru mengilustrasikan tentang situasi sosial, seperti mobilitas sosial, pernikahan, kematian, dan bentuk lain dari organisasi sosial, tanpa kehilangan kontak dengan komunitas mereka sendiri (Del Solar, 2019). Hal serupa juga disampaikan oleh Franquemont dan Isbell (1992) dalam studinya di Andes, yakni bahwa “bagi orang Andes menenun adalah salah satu sarana terpenting untuk mempelajari, mengomunikasikan, dan mereproduksi nilai-nilai estetika dan budaya” (Franquemont & Isbell, 1992, dalam Del Solar, 2019). Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, metafora kain tenun, khususnya motif tenun, banyak digunakan untuk merepresentasikan fenomena sosial.

Karena tenun juga cerminan dari konteks lingkungan di mana ia hidup, pada dasarnya tenun adalah cara mendasar untuk mengekspresikan perubahan dari waktu ke waktu, khususnya di wilayah pedesaan. Di Peru sebagai contoh, tenun menjadi ruang negosiasi budaya antara kolonial (Spanyol) dan *indigenous people*. Pada *post hispanic*, kain tenun di Peru kemudian mengalami perubahan dengan mengadaptasi budaya Spanyol baik dalam aspek motif maupun teknik/keterampilan pengerjaan kain tenun (Del Solar, 2019). Meskipun begitu, masih banyak perempuan desa, khususnya di dataran tinggi di Peru yang masih menenun dengan teknik dan motif tradisional. Representasi dari perubahan identitas, terutama sebagai konsekuensi dari (atau sebagai reaksi terhadap) ketegangan dan negosiasi dari waktu ke waktu. Mereka diekspresikan melalui sarana artistik, dalam hal ini melalui kain yang ditenun.

Melihat fungsi tenun sebagai identitas budaya tersebut, menenun bagi perempuan NTT pada awalnya memang bukan untuk memenuhi keinginan pasar, melainkan untuk kebutuhan adat-budaya. Bagi perempuan, menenun adalah untuk menghidupi budaya. Perempuan dengan demikian adalah *heritage bearer* atau penjaga tradisi. Pengutamaan nilai kain tenun sebagai nilai budaya tersebut perlu digarisbawahi oleh

para pengampu kebijakan ketika mendesain pengembangan industri kain tenun di NTT. Intensifikasi kain tenun untuk melayani kebutuhan pasar bukanlah nalar menenun perempuan NTT. Kebanyakan dari mereka akan menjual hasil tenunan mereka jika kebutuhan untuk adat sudah terpenuhi. Nalar budaya tersebut lebih dominan daripada nalar ekonomis yang berada di balik sebuah kain tenun.

Oleh sebab itu, jika ingin mengembangkan industri kreatif tenun di NTT dalam rangka peningkatan ekonomi, nalar budaya dan nalar ekonomi ini harus dikelola secara seimbang. Guna pemberdayaan ekonomi perempuan melalui produksi kain tenun, kelompok-kelompok tenun ikat banyak yang diberdayakan menjadi industri kecil menengah di bawah arahan pemerintah daerah. Belajar dari komunitas-komunitas tenun di Peru, mereka sangat terlibat dengan komersialisasi produk tenun sebagai sarana untuk mencari nafkah. Akan tetapi, para penenun di Peru tersebut sama sekali tidak meninggalkan kain tradisional (tenun) mereka, dan tetap menggunakannya untuk representasi ritual serta dalam hal pakaian dan identitas. Mereka lebih menggunakan kain tenun itu dalam konteks formal lokal dan di luar daerah mereka, dan tenun ini masih memiliki makna yang kuat dalam hal menunjukkan identitas etnik mereka (Del Solar, 2019).

**Tabel 4.1** Corak Kain Tenun dari Daerah-Daerah di NTT

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/Pattern
1.	Kabupaten Manggarai	Cibal, Reok, Satar Mese	Tenun Songke
		Satar Mese Barat	Tenun Todo
2.	Kabupaten Manggarai Barat	Lembor	Songke Mata Manuk
			Wai Manu
3.	Kabupaten Ngada	Bajawa	Jara
			Gajah
			Lawo Biri-Pisa
			Lawo Butu

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/ <i>Pattern</i>
4.	Kabupaten Ende	Ndona	Semba
			Mata Rote
		Onelako & Kota Ende	Lawo Jara Nggaja
			Lawo Soke
			Lawo Soke Mata Ria
			Lawo Soke Mata Loo
			Lawo Jara
		Wolojita	Lawo Pundi
			Lawo Manu
		Lio	Lawo Nepa Mite
		Lio Timur	Lawo Nepa Te'a
			Senai/Luka
		Nangapanda	Lawo Mangga
			Mberhe Arhe/Bele Kale
Wolowaru	Lawo Keli Mara		
	Lawo Gami Tera Esa		
	Lawo Mata Anggo		
Ndona & Wolojita	Lawo Mata Sinde		
Nangapanda & Ndona	Lawo Pea Kanga		
Ndona	Lawo One Mesa		

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/Pattern
5.	Kabupaten Flores Timur	Larantuka	Bunga Belah Ketupat
		Demo Pagong	Kolon Matan Ula Age
		Lewolema	Keniren Keroko
		Ilebura	Lakin Puhun
		Adonara Barat	Niwan
		Adonara Timur	Lurik Watowiti
		Ile Boleng	Lako Dowa Ikan Pari
		Solor Barat	Kelisin Diken Belen
		Solor Selatan	Nigen Belen
		Titehena	Mowah Ina
6.	Kabupaten Alor	Pantar Barat	Mau Behi Seng Watola Tanapi
		Alor Barat Laut	Sarung Gajah Nilung Sisa Matang Ikan Balohing Tanapi Balohing
		Alor Barat Daya & Mataru	Kui (Nawon Akan) Ken Alona Kui Suku Kapitan
		Alor Selatan	Batulolong
		Alor Timur	Gebitir Keti Limi Geweng

No.	Kabupaten	Kecamatan/Suku	Motif/ <i>Pattern</i>
7.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Insana	Buna
			Sotis
		Biboki	Ikat Biboki
		Miomafo	Ikat Miomafo
			Mafauf
8.	Kabupaten Rote Ndao	Nusak Landu	Landu
		Nusak Renggo	Renggo
		Nusak Bilba	Bilba
		Nusak Diu	Diu
		Nusak Lelenuk	Lelenuk
		Nusak Bokai	Bokai
		Nusak Termanu	Termanu
		Nusak Korbafo	Korbafo
		Nusak Thie	Thie
		Nusak Keka	Keka
		Nusak Talae	Talae
		Nusak Ba'a	Ba'a
		Nusak Lole	Lole
		Nusak Dengka	Dengka
Nusak Oenale	Oenale		
			Dela
			Ndao
9.	Kabupaten Sumba Barat	Kota Waikabubak	Mamoli
			Lekota
			Ketupat
			Uma Kalada
			Kuda Pasola

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam budaya NTT, tenun tradisional juga melambangkan identitas suku atau subetnis yang ada di NTT. Hampir semua daerah (21 kabupaten/kota) di NTT memiliki corak atau motif tenunnya masing-masing sehingga sudah menjadi kewajiban bersama antara pemerintah daerah setempat dan masyarakatnya untuk terus memelihara warisan leluhur tersebut. Apalagi, para penenunnya adalah perempuan. Bagi perempuan di NTT, selain sebagai ruang narasi perempuan, sektor kerajinan tenun ini juga berpotensi bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sayangnya, sebagian besar motif tenun sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.1 tersebut belum memiliki *property right* sehingga belum bisa disikapi oleh pemerintah lokal sebagai bagian dari IK.

## **B. Potret Kebijakan Ekonomi Kreatif Kain Tenun di Nusa Tenggara Timur (NTT)**

Meskipun kerajinan tenun tradisional ini punya banyak motif dan berpotensi menarik banyak tenaga kerja perempuan, menopang perekonomian masyarakat, serta memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga saat ini Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota di provinsi tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perda) spesifik yang berkenaan dengan pelestarian dan pengembangan tenun ikat. Padahal, keberadaan Perda ini penting dan dibutuhkan guna menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan komitmen yang jelas dalam pengembangan industri yang berbasis budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nong, 2012, dalam Setiawan & Suwarningdyah, 2014).

Sejauh ini kebijakan pemerintah Kota Kupang yang terkait dengan tenun masih berwatak pelestarian budaya, yaitu dengan mewajibkan pegawai negeri sipil menggunakan pakaian sipil harian (PSH) dari tenun ikat motif daerah NTT. Kewajiban tersebut tersurat dalam Peraturan Walikota Kupang No. 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Dalam pasal 11 Perwakot Kupang tersebut disebutkan adanya

imbauan penggunaan Pakaian Sipil Harian Tenun Ikat Motif Daerah NTT pada hari-hari tertentu, yaitu

1. hari Rabu dan Kamis;
2. acara resepsi dengan tamu dari dalam dan luar negeri;
3. pertemuan di luar jam dinas dan pada malam hari; dan
4. upacara peringatan HUT Kota Kupang tiap tanggal 25 April.

Diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai respons regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui dan Surat Edaran Gubernur Nomor BO.165/III/2019 tentang Penggunaan Sarung Tenun Ikat Motif Daerah NTT bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Di samping watak kebijakan yang bertujuan preservasi budaya, kedua kebijakan ini mendukung aspek peran produksi pada industri kreatif tenun di Kota Kupang, sedangkan perhatian Pemerintah Kota Kupang pada aspek peran reproduksi perempuan tercermin pada beberapa kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dan anak. Kebijakan yang terkait proteksi terhadap hak-hak anak tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Kupang. Regulasi ini rupanya menjadi salah satu pintu masuk untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Layak Anak. Dalam perkembangan selanjutnya, di tahun 2019 misalnya, Kota Kupang terpilih menjadi satu-satunya kabupaten/kota di NTT yang sudah diakui oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menuju kota layak anak. Prestasi tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Kota Kupang yang telah mengimplementasikan ragam program untuk melindungi hak-hak anak, seperti Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak.

Sementara itu, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang terkait dengan isu perlindungan perempuan dapat ditemukan pada Perda No. 7, 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita. Perda tersebut sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang bertujuan untuk menurunkan

angka kematian Ibu melahirkan dan bayi yang lahir. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota di NTT untuk melaksanakan gerakan Revolusi Kesehatan Ibu Anak (Revolusi KIA). Kebijakan ini menuntut semua persalinan wajib dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan dan melarang persalinan yang dibantu dengan dukun beranak (Wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA, Kota Kupang, NTT, 13 Juli 2017).

Pada level provinsi, pada tahun 2017 telah terbangun komitmen untuk mengatasi persoalan perlindungan perempuan dan anak melalui penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Peraturan tentang PUG di NTT tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2015. Melalui komitmen tersebut, semua perangkat daerah dan perangkat PPPA di NTT dapat mampu membentuk forum data, menyusun profil gender dan statistik gender, penguatan kelompok ekonomi perempuan melalui akses terhadap pelatihan, permodalan, dan pemasaran berbasis potensi lokal, membuat NTT menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, serta dilibatkan dalam Musrenbang yang berperspektif anak. Pada level perencanaan pembangunan, NTT juga telah menerapkan *Gender Budget Statement* (GBS) dalam perencanaan penganggaran di setiap dinas yang ada di NTT.

Di tingkat provinsi, pengembangan industri kreatif tenun tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2010–2030. Poin a pasal 33 menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud terdiri atas kawasan peruntukan industri kain tenun yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. Kebijakan lainnya lebih pada aspek peran reproduktif meliputi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Anak

yang Bekerja; dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak.

Terlihat bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Kupang meletakkan perhatian yang cukup serius untuk menopang peran-peran reproduksi perempuan. Hanya saja, implementasi dari kebijakan-kebijakan yang apik tersebut perlu mendapatkan pengawasan ketat dari kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan isu-isu tentang perlindungan perempuan dan anak seperti isu perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran dan isu kekerasan berbasis gender masih sangat menonjol di NTT. Atensi kebijakan terhadap peran reproduksi hendaknya perlu dibarengi dengan kebijakan yang berwatak melindungi peran produksi perempuan dalam melakukan pekerjaan menenunnya, yakni dengan menciptakan iklim kebijakan peningkatan ekonomi perempuan yang ramah pada perempuan dan tidak menambah beban ganda perempuan. Kebijakan di sektor produksi, yaitu pengembangan industri kreatif tenun inilah yang kiranya masih absen.

**Tabel 4.2** Kelompok Penenun Formal Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Provinsi NTT

No.	Nama IKM Kelompok Tenun	Jumlah Anggota	Alamat
1	Tenun Ikat “Ina Ndao”	10 orang	Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja
2	Tenun Ikat “Tulu Ruba”	10 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
3	Tenun Ikat “Cinta Karya”	6 orang	Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja
4	Tenun Ikat “Ruba Deo”	7 orang	Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak
5	Tenun Ikat “Bahagia”	8 orang	Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak
6	Tenun Ikat “Cendana”	6 orang	Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa

No.	Nama IKM Kelompok Tenun	Jumlah Anggota	Alamat
7	Tenun Ikat "Venty"	7 orang	Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa
8	Tenun Ikat "Mandiri"	5 orang	Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa
9	Tenun Ikat "Lamaholot"	5 orang	Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa
10	Tenun Ikat "Ruba Muri"	5 orang	Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak
11	Usaha Tenun Ikat	5 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
12	Tenun Ikat "St. Yosep 7"	4 orang	Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak
13	Tenun Ikat "Sadi Soda 1"	2 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
14	Tenun Ikat "Sadi Soda 2"	2 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
15	Tenun Ikat "Sadi Soda 3"	3 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
16	Tenun Ikat "Sadi Soda 4"	3 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
17	Tenun Ikat "Sadi Soda 5"	3 orang	Kelurahan Oesapa, Kecamatan Lima
18	Tenun Ikat "Sutra Mandiri"	3 orang	Kelurahan Alak, Kecamatan Alak
19	Tenun Ikat "Bougenvile"	5 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa
20	Tenun Ikat "Intan Indah"	5 orang	Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa

Ket.: Diolah dari Hasil Wawancara Kelompok Penenun Formal Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Provinsi NTT (15 Juli 2017).

Sumber: Wawancara dengan Kelompok Penenun (2017)

Secara umum, kondisi penenun di Kota Kupang terbagi menjadi penenun formal, yakni mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok tenun dan berada di bawah binaan Pemerintah Kota Kupang, serta penenun lepas, yakni mereka yang tidak tergabung dalam kelompok tenun yang dibina langsung oleh Pemerintah Kota Kupang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang mencatat terdapat 20 kelompok dengan jumlah penenun sebanyak 104 penenun formal yang rutin memproduksi dan masuk dalam pembinaan mereka, sedangkan jumlah penenun lepas tercatat sebanyak 552 penenun. Walaupun demikian, diakui masih banyak penenun di Kota Kupang yang belum terdaftar dalam pangkalan data pemerintah daerah setempat. Berikut ini data kelompok penenun formal yang berada dalam binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

**Tabel 4.3** Temuan Terhadap Dinamika Gender dalam Kebijakan Pengembangan Tenun di NTT

Perangkat	Keterangan	Temuan
<b>Tahapan 1: Analisis Pola Pembagian Kerja melalui curahan kerja (Profil Kegiatan)</b>		
Perangkat 1	Pengidentifikasi peran gender ( <i>triple role</i> )	<i>Triple role</i> yang tidak seimbang: dominasi peran reproduksi.
Perangkat 2	Penilaian kebutuhan gender: kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender	Kebutuhan praktis gender: penyediaan pelayanan kesehatan sudah relatif memadai, perempuan didorong juga sebagai penopang ekonomi keluarga (namun masih <i>secondary</i> sifatnya) namun karena kurangnya kesadaran/kesetaraan gender maka perempuan justru terbebani oleh <i>triple role</i> -nya.  Kebutuhan strategis gender: masih perlu kesadaran akan kesetaraan gender dalam relasi perempuan dan laki-laki baik di ranah domestik/privat maupun publik.

Perangkat	Keterangan	Temuan
<b>Tahapan 2: Analisis Profil Akses/Peluang dan Kontrol</b>		
Perangkat 3	Pemisahan secara gender terhadap kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga	Perempuan belum memiliki kontrol terhadap sumber daya alam yang mendukung pengembangan usaha tenun ikat ( <i>the declining of natural resources</i> ). Akses terhadap sumber daya finansial melalui koperasi.
Perangkat 4	Perencanaan untuk menyeimbangkan peran gender	Perencanaan intersektoral yang tidak sinkron dan semakin membebani <i>triple role</i> perempuan.
<b>Tahapan 3: Analisis faktor-faktor yang memengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol</b>		
Perangkat 5	Pembedaan berdasarkan tujuan yang berbeda dalam intervensi: Matriks Kebijakan WID/GAD	Pendekatan kesejahteraan ( <i>welfare approach</i> ) dominan dan diikuti dengan pendekatan kebijakan keseimbangan ( <i>equity approach</i> ).
Perangkat 6	Pelibatan perempuan dan organisasi/perencana yang sadar gender dalam perencanaan	Partisipasi perempuan dalam perencanaan gender masih bersifat konsultatif (ruang politik terbuka, ruang sosial yang ter subordinasi).

Ket.: Diolah dari Hasil Wawancara Kelompok Penenun Formal Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Provinsi NTT (15 Juli 2017).

Sumber: Wawancara dengan Kelompok Penenun (2017)

## C. Analisis Gender dalam Kebijakan Ekonomi Kreatif Tenun di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT): Peta Persoalan

Sebagaimana yang telah disampaikan di bagian pendahuluan, keenam *tools* yang diperkenalkan oleh Moser (1993) berguna dalam analisis gender terkait kebijakan tenun di NTT. *Tools* pertama sampai dengan ketiga dalam Framework Moser berguna untuk mengidentifikasi *triple role* perempuan dan laki-laki; mengidentifikasi kebutuhan praktis dan strategis perempuan; dan pemilahan kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, sedangkan *tools* keempat sampai keenam berfungsi menjajaki bentuk-bentuk intervensi yang selama ini dilakukan dan mengenali arah tujuannya dari perspektif *Women in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD), serta upaya melibatkan perempuan dalam *gender planning*. Tabel 4.3 merangkum asesmen tentang analisis gender terhadap kebijakan pengembangan tenun di NTT, khususnya di Kota Kupang.

Berikut ini beberapa analisis berdasarkan Tabel 4.3 terkait dengan identifikasi problem dan karakter intervensi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kota Kupang.

### 1. Analisis Pembagian Kerja: Antara Peran Reproduksi dan Produksi

Pada fase Analisis Pembagian Kerja, salah satu problem mendasar yang dihadapi perempuan adalah ketidakseimbangan tiga peran perempuan (*triple roles*), dengan peran reproduksi yang masih sangat dominan. Implikasinya jika perempuan ingin dipekerjakan sebagai penenun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar (industri), pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana alternatif strategi yang mampu meringankan peran reproduksi perempuan sehingga perempuan tidak justru bertambah beban kerjanya.

Dalam konteks produksi tenun, perempuan memiliki fungsi yang besar dalam peran produksi. Namun, karena fungsi produksi ini berada pada ranah privat—secara kultural adalah kewajiban perempuan

untuk menenun bagi laki-laki—maka peran produksi perempuan tidak dinilai dalam konteks kapitalisme industri. Dengan kata lain, ketertarikan perempuan untuk menenun bukanlah semata-mata karena uang, melainkan karena menenun adalah identitas budaya perempuan NTT. Salah satu perempuan justru mengatakan bahwa ketertarikan untuk menenun juga didorong oleh kesukaannya pada seni.

“... Saya penenun, ketertarikan saya menenun bukan karena uang. Tapi karena mau mengungkapkan rasa seni. Seni itu kita tuangkan dalam motif-motif kain. Jadi, banyak belajar dari teman lain, kemudian saya merasa bahwa ternyata bisa cari uang dengan cara ini...” (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

Persoalan lainnya, perempuan masih dibebani dengan fungsi-fungsi reproduksi dalam rumah tangga sekaligus dengan peran komunitasnya. Hal ini dikarenakan ada pembagian kerja yang mulai *rigid* antara perempuan dan laki-laki akibat pengaruh dari industrialisasi, di mana domain domestik adalah ranah perempuan, sedangkan domain publik merupakan ruang bagi laki-laki. Hasilnya, perempuan dominan dalam urusan reproduksi. Namun, perempuan juga memiliki peran di komunitas juga, walau berbeda perannya dengan peran laki-laki di ranah komunitas.

“... Saya mau cerita susahny ada anak di rumah. Ketika sudah menenun, walaupun kita sudah kasih makan tapi pada saat mereka menangis, mereka mau gendong maka kita mau marah tidak bisa. Apalagi kalau mereka tarik itu alat kita, susah sekali. Jadi sebagai ibu, kita harus prioritaskan, kita mau urus anak atau urus tenun. Karena uang juga butuh, tapi anak juga butuh kita. Misal satu hari kita satu hari bisa satu helai, tapi kalau ada anak kita menangis, maka itu kita tidak dapat kerja. Jadi kita harus prioritaskan kerja atau prioritaskan anak, tidak mungkin dia tidur dan makan sendiri, karena biasanya bapaknya ke kebun dan kita tidak ada pengasuh...” (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

Peran dalam komunitas relatif berimbang antara perempuan dan laki-laki. Keterlibatan mereka dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu *community-managing activities* yang menjadi bagian dari kegiatan reproduktif dan *community politics* yang mengambil bagian dalam organisasi politik formal di tingkat nasional maupun daerah. *Community-managing activities* di Kota Kupang diikuti oleh para perempuan penenun, seperti koperasi kelompok penenun, kegiatan di kantor desa, dan gereja. Melalui kegiatan organisasional tersebut para penenun dapat memperoleh ilmu, menyampaikan aspirasi, mempromosikan hasil karya, dan membantu pengelolaan keuangannya. Sementara itu, *community politics* atau keterlibatan dalam organisasi politik di tingkat formal perempuan penenun berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai cara untuk menyalurkan aspirasi mereka. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politis memang tidak terlalu jauh mengingat kesibukan mereka dalam mengurus rumah tangga dan menenun.

“Kalau Musrenbang, kami para mama di desa juga tidak aktif. Kemudian kami mungkin karena partisipasinya, tapi partisipasi aktif kami masih kurang ... Karena bapak-bapak banyak omong-omong. Kita tanya, kalau begini banyak kegiatan yang bisa dilakukan perempuan termasuk pertanian, tapi yang omong itu sawahnya saja jadi hanya untuk pembangunan fisiknya saja. Jadi, pembangunan itu hanya fokus untuk fisik-fisik seperti itu. Artinya, untuk sementara kelompok perempuan masih baik tapi saya lihat belum muncul banyak (realisasi program untuk kelompok perempuan-red.). Jadi, kita sudah bicara, tetapi dampaknya belum banyak untuk dapat prioritaskan kegiatan perempuan...”. (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

## **2. Analisis Akses/Peluang Sumber Daya: Keterbatasan Sumber Daya**

Persoalan fundamental pada fase analisis akses atau peluang sumber daya yang dihadapi perempuan penenun adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya alam yang berupa bahan baku untuk tenun ikat

maupun sumber daya lainnya berupa modal atau kapasitas finansial. Dari sisi sumber daya alam, ekonomi kreatif tenun memiliki beberapa keterbatasan jika ingin menciptakan industri yang masif. Kebun kapas merupakan sumber daya alam utama dalam industri tenun. Minimnya kebun kapas di daerah setempat menyulitkan perempuan di sektor industri ini untuk mendapatkan sumber daya dengan sendirinya. Pada awal tahun 1900 terdapat berbagai perkebunan kapas di seluruh NTB dan NTT. Namun, karena kurangnya dukungan pemerintah dan permintaan pasar pada waktu itu, banyak petani yang memutuskan untuk menutup perkebunan.

Di satu sisi, perkebunan kapas atau hutan yang memiliki pohon penghasil kapas ini terancam dengan adanya intervensi sektor pertambangan di beberapa daerah di NTT. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) misalnya, tambang telah mengancam hutan di mana banyak perempuan yang menggantungkan hidupnya dengan bertenun dari pohon kapas dan dedaunan yang dapat menghasilkan pewarna alami. Beberapa perempuan pun melakukan perlawanan terhadap masuknya tambang di wilayah hutan adat mereka dengan duduk menenun di hutan. Kisah para penenun di TTS ini kemudian berhasil mengusir perusahaan tambang. Namun, ini adalah salah satu kisah sukses di atas jamak kisah kegagalan dalam proteksi kebun kapas. Padahal, guna mewujudkan ekonomi kreatif kerajinan, pemerintah perlu mendukung sektor penopang produksi kain tenun ini.

Terkait dengan sumber daya modal, salah satu kendala yang dihadapi perempuan penenun adalah akses terhadap modal. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi akses perempuan terhadap modal dalam sektor tenun ini adalah dengan membentuk kelompok penenun perempuan atau mengakui keberadaan kelompok tenun yang telah ada di desa-desa. Hal ini memungkinkan kelompok tersebut untuk mengakses pinjaman baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Biasanya, kelompok penenun akan lebih mudah mengakses bantuan dari pemerintah dibandingkan individu penenun. Dengan berkelompok, aktivitas penenun dapat terukur dan bantuan tersebut akan lebih mudah dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Pemantauan terhadap kemajuan kinerja kelompok juga akan mudah dimonitor jika dilakukan berkelompok.

### 3. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profil Kegiatan serta Profil Akses dan Kontrol

Terdapat dua kendala utama yang terdapat dalam fase analisis faktor-faktor yang memengaruhi profil kegiatan serta profil akses dan kontrol, yakni ketidaksinkronan perencanaan lintas sektor dan keterlibatan perempuan dalam forum perencanaan yang masih bersifat konsultatif.

#### a. Perencanaan Intersektoral yang Belum Sinkron

Analisis permasalahan pada sub-bagian ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar, seperti apakah ada perencanaan intersektoral yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk menyeimbangkan tugas-tugas mereka dengan lebih baik; apakah ada program/proyek yang menghambat karena tidak memperhatikan keterkaitan antara peran lipat tiga perempuan; dan apakah suatu intervensi yang sudah dilakukan atau sedang direncanakan menambah beban kerja di salah satu peran perempuan dan menghambat peran yang lain?

Terdapat beberapa instansi pemerintah setempat yang memiliki kewenangan dalam pembangunan ekonomi kreatif berbasis tenun di Provinsi NTT, khususnya di Kota Kupang, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindag); Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA); Dinas Sosial; serta Dinas Pariwisata. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang yang berfungsi sebagai *leading sector* dalam pengembangan tenun, arah kebijakan pemerintah setempat berupaya mentransformasikan format kelompok tenun yang merupakan usaha kecil masyarakat menjadi berbadan koperasi. Perubahan format ini bertujuan mempermudah kelompok tenun untuk dapat mengakses sumber daya, seperti akses terhadap modal usaha. Untuk itu, pemerintah setempat berusaha menjadikan tenun bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi sampingan perempuan, melainkan tenun sebagai aktivitas utama perempuan.

"Kalau untuk sementara ini program kami masih berfokus pada pengembangan tenun ikat ini dari usaha kecil menengah sampai bisa menjadi koperasi. Karena kebanyakan industri tenun ikat ini masih

bersifat tradisional, alat-alatnya masih menggunakan tradisional, cuma hanya ada satu atau dua saja yang sudah menggunakan yang sudah bisa menggunakan atau mengikuti alat-alat modern, tetapi yang tradisional itu kalah bersaing. Justru kualitas mereka jauh lebih bagus karena dikelola oleh tahapan yang tradisional dan mutunya bisa dijamin lebih bagus." (Wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Jika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkonsentrasi pada upaya mentransformasikan kelembagaan kelompok tenun, Dinas PPPA fokus pada program-program pelatihan dalam rangka pemberdayaan perempuan sekaligus pemberian bantuan modal kepada 25 kelompok tenun. Beberapa pelatihan itu meliputi pelatihan pewarnaan alami (ramah lingkungan) dan pelatihan manajemen kelompok usaha. Ada sinkronisasi program antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Dinas PPPA. Pelatihan manajerial yang dilakukan oleh Dinas PPPA berfungsi menopang transformasi kelembagaan kelompok tenun yang diskemakan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Berbeda dengan kedua dinas ini, program yang dimiliki oleh Dinas Perindag lebih berfokus pada aspek pengawasan terhadap pengembangan industri tenun di Kota Kupang. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi Perindag sehingga mereka belum memiliki skema atau program khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas (dan kuantitas) kain tenun maupun meningkatkan kesejahteraan penenun. Dinas Perindag pun lebih banyak melakukan koordinasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang. Dekranasda kemudian menindaklanjuti dengan memberikan bantuan kepada kelompok tenun, seperti bantuan benang dan bantuan alat tenun. Belum terlihat adanya koordinasi, kerja sama, maupun sinkronisasi program lintas sektoral yang dibangun oleh Dinas Perindag dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas PPPA untuk menjawab persoalan tentang tantangan pengembangan tenun. Misal, dari beberapa wawancara tim peneliti di lapangan, ditemukan bahwa pemasaran hasil tenun menjadi salah satu kendala utama. Belum

ada skema bersama dari dinas-dinas terkait untuk mempersiapkan pengembangan ekonomi kreatif berbasis tenun ini dari hulu hingga hilir meskipun semua dinas tersebut mengamini pemasaran sebagai salah satu tantangan. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi program antarinstansi pemerintah masih lemah.

Sementara itu, konsentrasi peningkatan kesejahteraan kelompok usaha yang digagas oleh Dinas Sosial pun masih belum menyentuh tenun sebagai kelompok usaha perempuan. Kelompok tenun belum menjadi prioritas pendampingan ataupun asistensi dari Dinas Sosial dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mereka. KUBE lebih menasar pada usaha pengolahan bahan makanan, seperti pembuatan keripik, maupun usaha membuka kios sehingga kelompok tenun belum dapat mengakses fasilitas modal dari KUBE. KUBE hadir dengan didukung dana oleh Kementerian Sosial. Program ini memberikan bantuan modal kepada pengusaha rumah tangga/mikro berjangka satu tahun dengan harapan dapat meningkatkan proses produksi. Padahal karakter produksi tenun berbeda dengan karakter ekonomi produktif lainnya.

Ke depan, jika gagasan dari pemerintah setempat untuk menjadikan tenun sebagai aktivitas utama perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, hendaknya kebijakan ini perlu ditopang dengan ragam kebijakan lainnya sehingga aktivitas produksi perempuan ini justru tidak menambah beban perempuan yang secara sosial maupun kultural telah terbebani oleh peran-peran reproduksi dan komunitas mereka.

#### **b. Pelibatan Perempuan dalam Forum Perencanaan Pembangunan yang Masih Bersifat Konsultatif**

Pengalaman pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Kota Kupang dalam proses teknokratis—dalam hal ini adalah forum perencanaan pembangunan (Musrenbang)—menunjukkan indikasi adanya keleluasaan atau terbukanya ruang politik bagi perempuan untuk dapat terlibat langsung dalam forum perencanaan. Jika dilihat dari sudut pandang negara, maka pemerintah daerah Kota Kupang sebenarnya sudah memenuhi prasyarat partisipasi bisa berlangsung.

Secara teoretik partisipasi bisa berlangsung apabila memenuhi dua kondisi, yakni sebagai berikut.

- 1) Kesiediaan dan kepercayaan (Hanif & Kurniawan, 2009), yaitu bahwa partisipasi hanya akan berlangsung bila ada kesiediaan dari kedua belah pihak baik pemerintah daerah maupun warga masyarakat; dan
- 2) keleluasaan, hal ini terkait dengan adanya dua ruang di ranah sosial politik yang harus dibuka, yaitu ruang politik dan ruang sosial. Ruang politik terkait dengan upaya pemerintah mengembangkan struktur kesempatan politik yang mampu memfasilitasi proses partisipasi agar bisa berjalan dan berkembang secara optimal, sedangkan ruang sosial terkait struktur sosial yang memungkinkan partisipasi dapat bekerja, yaitu bahwa partisipasi hanya bisa berjalan baik bila struktur sosial yang ada di dalam masyarakat bersifat egaliter. Bila dalam struktur sosial sebuah masyarakat masih kental dengan nuansa patron-klien dan sangat elitis maka proses pembuatan keputusan tidak akan mungkin bersifat partisipatif atau sangat potensial terjadinya *elite capture*.

Akan tetapi, pengalaman pelibatan perempuan dalam forum Musrenbang di Kota Kupang, pemerintah sudah membuka ruang politik, yaitu dengan memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk ikut terlibat dalam proses Musrenbang di tingkat desa sehingga para ibu bisa mengartikulasikan kepentingannya, seperti mengidentifikasi kebutuhan yang mereka perlukan dalam rangka mengembangkan potensi sosial ekonomi yang mereka miliki. Hal ini dimungkinkan karena beberapa perempuan sudah memiliki kapasitas untuk bisa menyuarakan kepentingannya. Kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan perempuan yang berprofesi guru dan tenaga medis. Kelompok kelas menengah baru di dalam struktur sosial masyarakat di Kota Kupang inilah yang mengambil peran sebagai mediator antara suara perempuan di level *grass-roots* dan struktur kekuasaan sehingga suara perempuan dari Musrenbang ditingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten/kota bisa diartikulasikan. Dalam hal terkait dengan tenun, misalnya, perempuan sudah dapat menyuarakan

kepentingannya, misalnya kebutuhan tentang bantuan modal untuk para penenun dalam forum Musrenbang.

Hal yang menjadi persoalan adalah ketika ruang politik yang sudah terbuka tersebut tidak dibarengi dengan ruang sosial yang masih terdominasi oleh struktur dan kultur patriarkat yang kental di Kupang secara khusus dan di NTT secara umum. Alhasil, dalam proses Musrenbang tersebut walaupun perempuan bisa mengartikulasikan kebutuhannya karena kuatnya dominasi laki-laki, prioritas program yang kemudian diputuskan dalam Musrenbang tersebut pada realitasnya kalah bersaing dengan kebutuhan atau prioritas program atau kegiatan yang diusulkan oleh suara laki-laki. Beberapa catatan FGD mengungkapkan bahwa program infrastruktur, pengerjaan irigasi, persawahan misalnya, yang diusulkan oleh laki-laki cenderung akan menjadi prioritas dalam Musrenbang dibandingkan program pemberdayaan sosial ekonomi yang diajukan oleh perempuan. Realitas ini menggambarkan bahwa ruang sosial masih tersubordinasi oleh dominasi laki-laki mengingat struktur sosial masyarakat NTT yang patriarkat, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki masih jauh panggang dari api.

“... Saya lokasinya dengan Mama Marta, hanya dusunnya berbeda, saya di bagian atas di Dendeng. Di situ memang perempuan dilibatkan dalam Musrenbang, tetapi bapak-bapak lebih dominan. Semua keinginan sudah dituangkan, hanya realisasinya yang belum. Yang lebih diutamakan adalah aspirasi bapak-bapak, karena mereka bilang harus sawah yang diutamakan terlebih dahulu. Jadi, ada realisasi pengerjaan saluran irigasi sudah dikerjakan semua. Mama-mama punya permintaan masih belum terjawab...” (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli 2017).

“... Dalam usulan-usulan yang kebetulan diusulkan di Musrenbang itu sudah ada soal beberapa kegiatan perempuan. Saya mengikuti dengan baik. Kemudian, saya tanya ke Pak Lurah: ‘Pak Lurah, kapan usulan kelompok perempuan dilaksanakan? Kalau memang mau dilaksanakan maka akan kami siapkan.’ Jadi, kalau setelah usul maka kita (perempuan) harus mengikuti pelaksanaannya jika tidak ikuti

jejaknya (kegiatan perempuan), kegiatan itu akan hilang jejak...” (FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 15 Juli, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa derajat partisipasi perempuan dalam forum perencanaan sebenarnya masih bersifat *konsultatif* (belum bersifat kuasa kewargaan). Fenomena pelibatan perempuan di Kota Kupang menggambarkan bahwa kontrol perempuan terhadap isu yang disuarakan dalam proses pengambilan kebijakan masih sangat lemah karena masih belum mampu memengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Derajat partisipasi publik dikatakan bersifat kuasa kewargaan apabila kehadiran partisipasi publik tidak hanya terlembagakan secara apik, tetapi juga sudah mampu memengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai tingkat tertinggi partisipasi karena selain ada mekanisme yang informatif dan mekanisme yang konsultatif, pemerintahan daerah sudah membuka keterlibatan aktif dari masyarakat. Tingkat kemampuan masyarakat untuk memilih dan memberi pengaruh kepada pembuat kebijakan sebagai pengejawantahan kebutuhan mereka, sudah tinggi. Artinya, masyarakat sudah memiliki suara, akses, pilihan, dan pengaruh. Sementara itu, dalam konsep partisipasi publik, derajat partisipasi publik bersifat konsultatif apabila masyarakat sudah memiliki mekanisme yang terlembaga untuk memberi usulan dan kritik terhadap pemerintah, namun belum mampu memengaruhi seluruh proses kebijakan yang ada. Dalam konteks pelibatan perempuan di NTT dalam forum perencanaan publik, perempuan sebenarnya sudah memiliki akses, suara, dan pilihan, namun belum memiliki pengaruh.

Perlu menjadi catatan kritis pula bahwa partisipasi yang berlangsung masih bersifat *invited space*. Pengalaman pelibatan perempuan menunjukkan bahwa suara perempuan sudah diartikulasikan dalam mekanisme teknokratis pemerintah (terbukanya ruang politik), yakni melalui forum perencanaan (Musrenbang). Akan tetapi, forum-forum yang merupakan inisiasi dari warga sendiri (*popular space*), masih sangat terbatas. Dengan kata lain, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan masih bersifat *invited space* (karena diundang oleh negara/pemerintah) dan belum menampakkan adanya

kesadaran dari akar rumput (masyarakat) untuk menciptakan *popular space*. Konsekuensinya, apabila negara tidak membuka ruang politik maka kepentingan warga bisa jadi tidak terakomodasi dalam proses kebijakan. Dari sudut pandang demokrasi, partisipasi yang berbasiskan pada *popular space* inilah yang menjadi penanda demokratisasi sedang berlangsung.

## D. Penutup

Kebijakan ekonomi kreatif tenun di Kota Kupang, jika dianalisis dengan menggunakan *framework* Moser, dapat disimpulkan bahwa kendala utamanya adalah kebijakan atau program yang didesain oleh pemerintah kurang memperhitungkan kalkulasi beban terhadap perempuan yang justru semakin bertambah. Ketika kemudian perempuan penenun dihadapkan pada tuntutan pasar untuk makin terus meningkatkan produktivitasnya tanpa adanya dukungan sistem yang membantu perempuan penenun dalam menjalankan peran reproduksi dan peran komunitasnya maka yang terjadi justru beban kerja perempuan yang bertambah. Apalagi dalam konteks masyarakat patriakis yang masih memandang perempuan bekerja yang menghasilkan uang sebagai ekonomi sekunder.

Walaupun begitu, pihak Pemerintah Kota Kupang patut diapresiasi karena minimal Pemerintah Daerah (Pemda) sudah memiliki data terpilah (laki-laki dan perempuan) dan *database* kelompok tenun sudah mulai terkonsolidasi dengan baik oleh Pemda. Untuk ke depannya, kebijakan tenun yang berperspektif gender perlu dibenahi dengan serius dengan memperhatikan beberapa hambatan sebagai berikut. Pertama, hambatan kultural berupa struktur patriarki yang masih kuat dan kesadaran gender yang timpang. Beban perempuan atau *triple role* semakin bertambah justru ketika perempuan menjadi penenun untuk menopang ekonomi keluarga. Kedua, hambatan struktural, di mana kebijakan pemerintahan (melalui intervensi program untuk pengembangan tenun tradisional) masih belum sampai pada fase *empowerment* atau memberdayakan dan melindungi perempuan dari diskriminasi gender yang masih tumbuh subur di masyarakat.

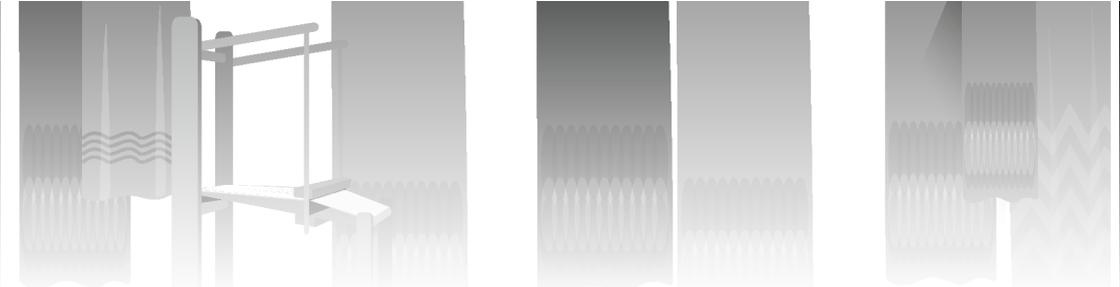
Transformasi gender baru berhasil ketika laki-laki juga memiliki kesadaran gender. Wilayah ini perlu digarap oleh pemerintah dan kalangan masyarakat sipil supaya transformasi gender melibatkan dua pihak (laki-laki dan perempuan).

Akhirnya, bahasan ini sekali lagi ingin menegaskan bahwa pengembangan industri tenun saat ini jika tidak hati-hati maka hanya akan menjebak perempuan dalam habitus kapitalisme. Menjadikan tenun sebagai industri (*mass production*) ketika belum ada transformasi relasi gender di masyarakat, bisa jadi justru memperkosa *triple role* perempuan guna memuaskan hasrat pasar global. Sebaliknya, bahasan ini mendukung tenun sebagai ekonomi kreatif yang bukan bersifat *mass production*, yang menempatkan perempuan sebagai subjek dan bukan objek dari persaingan ekonomi dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

## DAFTAR PUSTAKA

- Babo, G. (2020, 28 Agustus). Dibalik bersarung tenun di lingkup ASN Pemerintah Provinsi NTT. *BKD Prov NTT*. <https://bkd.nttprov.go.id/article/dibalik-bersarung-tenun-di-lingkup-asn-pemerintah-provinsi-ntt>
- Del Solar, M. E. (2019). Highland peasant weavers: Empowered women, heritage keepers and home providers. Incakunaq Ruwaynin Project, Cusco, Peru. *TEXTILE*, 17(2), 168–181.
- Hanif, H., & Kurniawan, N. I. (2009). Menuju bekerjanya tata pemerintahan lokal yang baik: Partisipasi, transparansi, akuntabilitas. *Monograph on Politics and Government*, 3(1), 1–84.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Sinergi Pemerintah, LSM, dan masyarakat adalah kunci pengentasan masalah perempuan dan anak*. Diakses pada 27 Januari 2020, dari <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1417/sinergi-pemerintah-lsm-dan-masyarakat-kunci-pengentasan-masalah-perempuan-dan-anak>

- March., C., Smyth, I., & Mukhopadhy, M. (2000). *A guide to gender-analysis framework*. Oxfam GB.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice & training*. Routledge.
- Nugroho, C., Nurhayati, I. K., Nasionalita, K., & Malau, R. M. U. (2021). Weaving and cultural identity of Batak Toba women. *Journal of Asian and African Studies*, 56(6), 1165–1177.
- Purnawan, F. (2004). *Kain untuk suami*. Indofood Sukses Makmur.
- Seko, S. (2019). *Kota Kupang kembali raih trofi Kota Layak Anak*. Diakses pada 12 April 2022, dari <https://kupang.tribunnews.com/2019/07/24/kota-kupang-kembali-raih-trofi-kota-layak-anak>
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010–2030. (2011). [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/8%20Sumba%20Timur/P\\_NTT\\_1\\_2011%20rencana%20tata%20ruang%20daerah.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SKPT/8%20Sumba%20Timur/P_NTT_1_2011%20rencana%20tata%20ruang%20daerah.pdf)
- Peraturan Walikota Kupang No. 5 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang. (2010). <https://adoc.pub/download/walikota-kupang-peraturan-walikota-kupang-nomor-5-tahun-2010.html>
- Setiawan, B., & Suwarnigdyah, R. N. (2014). Strategi pengembangan tenun ikat Kupang provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(3), 353–367.
- Van Etten, S. (2010). Weaving development: Cultural preservation and economic improvement in Cochabamba, Bolivia. *Anthropology Honors Projects*, 6. [https://digitalcommons.maclester.edu/anth\\_honors/6](https://digitalcommons.maclester.edu/anth_honors/6)



# BAB 5

## NARASI PEREMPUAN DALAM EKONOMI KREATIF KAIN TENUN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN KOTA KUPANG

*Kurniawati Hastuti Dewi*

### A. Pendahuluan

Bab terdahulu dalam buku ini telah menyajikan analisis kebijakan pengelolaan ekonomi kreatif kain tenun dengan perspektif gender di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan menggunakan *Moser Gender Planning Framework* (MGP), bab terdahulu menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kota Kupang serta masyarakat setempat untuk mengangkat dan mengembangkan kain tenun sebagai ekonomi kreatif bagian daya tarik wisata lebih kuat dibandingkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Timur, kain tenun belum diletakkan sebagai bagian daya tarik wisata lokal yang diunggulkan dan lebih menitikberatkan pada pengembangan pariwisata alam. Meskipun demikian, sebenarnya

---

©2023 K. H. Dewi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *E-mail*: kurniawati.hastuti.dewi@brin.go.id

Dewi, K. H. (2023). Narasi perempuan dalam ekonomi kreatif kain tenun di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Kupang. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (119–150). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c673 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kedua pemerintah daerah baik di Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur sama-sama belum memiliki peraturan daerah yang khusus mendorong pengembangan ekonomi kreatif kain tenun dengan perspektif gender. Apalagi yang secara khusus melindungi hak-hak perempuan yang terlibat pada pembuatan dan pemasaran kain tenun.

Selain menyajikan analisis mengenai kebijakan berperspektif gender dari kedua pemerintah daerah dalam ekonomi kreatif kain tenun, diperlukan juga analisis yang menyajikan suara dan narasi perempuan yang terlibat dalam pembuatan dan pemasaran kain tenun. Hal ini didasari pemikiran bahwa berbagai kerangka analisis (seperti Harvard, Moser, Longwe) memang berguna menemukan sejauh mana program, kebijakan, atau riset berperspektif gender. Namun, jika tidak berhati-hati dan jeli, suara atau narasi dari para perempuan dalam komunitas yang diteliti justru tertutupi oleh berbagai alat/kerangka analisis yang dipakai. Maka dari itu, bab ini akan menyajikan suara dan narasi para perempuan dalam pembuatan dan pemasaran kain tenun di kedua daerah tersebut karena di balik setiap kain tenun terdapat cerita kehidupan perempuan.

Bab ini ditulis dengan didasarkan pada metodologi riset feminis (*feminist research methodology*) yang berfokus pada pengalaman personal perempuan dalam konteks spesifiknya, untuk memperoleh pengetahuan atas dasar pengalaman nyata kehidupan mereka (Harding, 1987). Penulis percaya pengalaman para perempuan yang terlibat dalam pembuatan dan pemasaran kain tenun sebagai sebuah sumber pengetahuan yang harus dimengerti, dipertimbangkan, dan diperhatikan dalam menyusun kebijakan yang berperspektif gender. Penulis menerjemahkan “narasi” perempuan yang akan dikemukakan dalam bab ini sebagai juga narasi politik dengan “p” kecil yang berarti narasi terkait relasi gender yang sebenarnya merupakan hubungan kekuasaan dalam konteks spesifik kehidupan mereka. Ini untuk membedakannya dengan “Politik” dengan “P” besar yang bermakna dalam perspektif struktur kelembagaan politik formal.

Pendapat penulis dalam mengungkapkan narasi perempuan dalam konteks ekonomi kreatif kain tenun sebagai sebuah relasi gender yang merupakan relasi kekuasaan (*power relations*), didasari oleh dua hal:

pertama, Connell (2008) yang mendefinisikan gender sebagai “*gender relations*” atau “*Gender is, above all, a matter of the social relations within which individuals and groups act*”. Connell (2008) mengatakan *gender relations* atau hubungan gender adalah hubungan sosial dengan individu dan kelompok bertindak berupa hubungan langsung atau interaksi tidak langsung antara perempuan dan laki-laki, atau di antara laki-laki, atau di antara perempuan dalam kehidupan sehari-hari, seputar pengaturan gender dalam kehidupan sosial masyarakat (misalnya dilingkupi oleh struktur sosial agama, politik, kekerabatan, dan budaya). Kedua, posisi penulis juga didasari slogan “*personal is political*”, yaitu slogan gerakan perempuan gelombang kedua akhir tahun 1960-an yang dipopulerkan oleh Carol Hanisch (sebagaimana catatan Eisenstein, 1984). Slogan ini pada intinya hendak menekankan bahwa pengalaman individual atau pribadi sangat terkait dengan struktur sosial dan politik yang lebih luas dalam masyarakat; dan menurut Kate Millet (sebagaimana catatan Eisenstein, 1984) slogan ini dapat dimaknai bahwa hubungan dalam ranah privat antara laki-laki dengan perempuan sebenarnya sangat erat terkait dengan dimensi politik karena di dalam ranah privat itu terjadi juga kontrol laki-laki terhadap perempuan yang kemudian merambah ke ranah yang lebih luas di arena publik. Jadi, ulasan penulis mengenai narasi perempuan dalam ekonomi kreatif kain tenun di Kota Kupang dan Kabupaten Lombok Timur akan erat mengeksplorasi relasi gender antara perempuan dan laki-laki, atau antara sesama perempuan dari kelas sosial yang berbeda, yang semuanya dilingkupi oleh struktur sosial ekonomi, politik, pemerintahan, serta adat istiadat yang melingkupinya.

## **B. Narasi Perempuan Penenun dalam Konteks Kekinian: Relasi Gender yang Berubah?**

Tenun di NTB dan NTT pada mulanya dibuat sebagai bagian penting dalam sebuah upacara adat untuk menjaga tradisi dan kearifan lokal. Pada mulanya menenun bukanlah sebuah kegiatan yang berorientasi ekonomi, tetapi lebih merupakan kegiatan menjaga tradisi dan ritual adat setempat termasuk dalam mengatur relasi perempuan dan laki-

laki. Dalam hal ini, perempuan di NTB maupun di NTT memegang peranan penting dan dominan dalam pekerjaan menenun. Perempuan menenun dan menghasilkan kain tenun untuk berbagai upacara dan ritual adat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perempuan penenun adalah penjaga tradisi. Bahkan dengan berkembangnya kain tenun dengan pewarnaan alami yang ramah lingkungan, para perempuan penenun dapat dikatakan menjadi penjaga kelestarian alam.

Namun, posisi dan makna kain tenun sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kapitalisme, kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan agenda pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu tantangan terkini adalah perkembangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam konteks tantangan terbaru ini, nilai kain tenun mengalami peningkatan tidak sekadar kain tradisional, tetapi menjadi salah satu komoditas unggulan ekonomi kreatif yang dapat bersaing dalam menghadapi MEA.

Dalam konteks tantangan yang baru maka pertanyaan muncul, seperti bila dahulu perempuan penenun ditempatkan sebagai panjaga tradisi dalam sebuah relasi gender konvensional, yaitu posisi dan peran utama perempuan di rumah, sementara laki-laki banyak berperan di luar rumah. Maka dalam konteks kekinian, ketika kain tenun meningkat posisinya sebagai komoditas untuk peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat; apakah relasi gender perempuan dan laki-laki juga mengalami perubahan atau pergeseran? Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan tersebut. Penulis tidak dapat turut melakukan penelitian langsung ke lapangan karena beberapa kendala sehingga sumber utama tulisan ini diperoleh dari transkrip wawancara oleh tim peneliti yang melakukan observasi lapangan. Penggunaan transkrip wawancara telah sepengetahuan para peneliti dan diikuti dengan penyebutan sumber yang jelas dalam pengutipannya. Selain itu juga melalui diskusi dengan anggota tim peneliti dari ASC UGM, narasumber, dan pakar dalam beberapa kesempatan diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discussion/FGD*) di Jakarta dan di Yogyakarta pada tahun 2017.

### **C. Perempuan Penenun di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Pengembangan kain tenun di Lombok Timur didorong ke arah pewarnaan alam sebagaimana dikemukakan AM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur (Wawancara dengan AM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017). Selanjutnya, SH dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur menyatakan peran dominan perempuan dalam ekonomi kreatif tenun di daerahnya, sebagaimana dikatakan:

“... tenun ini diproduksi rata-rata oleh perempuan, itu 98 persen perempuan jadi 2 persen-nya laki. Yang laki pun itu bukan tenun yang tradisional, tapi tenun yang ATBM [Alat Tenun Bukan Mesin], sudah berkembang dari yang tradisional ke yang lebih maju. Berikutnya karena ini ditangani perempuan, yang namanya perempuan kan kalau tidak didampingi lemah, tidak punya pekerjaan lemah ya. Harganya juga lebih rendah kalau dia sudah punya kesibukan, industri tenun nilai perempuannya semakin meningkat, semakin dihargai oleh orang lain. Yang berikutnya, tenun ini diharapkan berkembang oleh pemerintah, kita wujudkan pemerintah di dalam pembinaan-pembinaan. Pembinaannya baik pembinaan produksinya secara teknis, pembinaan manajerialnya, kemudian kita bantu juga promosi dan informasi dalam bentuk ikut memasarkan tenun itu keluar dari wilayah Lombok Timur...” (wawancara dengan SH di Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Melalui kutipan wawancara tersebut, jelas bahwa perempuan memiliki peran dominan dalam pembuatan kain tenun. Selain itu, kain tenun juga telah mengalami perubahan dari sekadar kain tradisional menjadi salah satu sumber mata pencaharian perempuan, didorong pemerintah daerah untuk bernilai ekonomi tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara pengembangan kain tenun adalah dengan membuat kawasan khusus percontohan kain tenun, seperti di Desa Pringgasela. MK, salah satu laki-laki yang bergerak

dalam pemasaran kelompok Srikosa di Desa Pringgasela, memberikan ilustrasi mengenai harapan masyarakat yang ingin menjadikan menenun sebagai sarana menopang hidup dan tidak sekadar pekerjaan sampingan saja:

“Memang semua penenun di Pringgasela itu mayoritas penenun dari umur 12 tahun itu sudah mereka bisa menenun, bu. Karena tenun ini termasuk kerajinan turun-temurun, tanpa dibina mulai dari umur 12 tahun mereka sudah bisa menenun. Nah itu awal mula tenun sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan rumah tangga, namun sekarang mayoritas tenun sebagai penopang hidup masyarakat di desa kami, bu. Terutama sekali untuk biaya hidup ibu-ibu rumah tangga selain dari bergaul dan bertani, mereka mengharapkan dari bertenun itu bisa membiayai anak sekolah, membiayai yang lain, dan untuk makan. Mungkin dari masyarakat yang mayoritas masyarakatnya ekonomi lemah, bertahan hidup susah, Bu. Namun, alhamdulillah, tenun bisa dikembangkan di sana. Maka dari itu, kami katakan tenun ini pekerjaan tetap bukan sampingan. Kalau mereka musim panen, cabe, tembakau, dan lainnya, mereka tetap bekerja....” (MK dalam FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

Melalui petikan wawancara dengan MK, diketahui bahwa menenun adalah kegiatan yang diajarkan turun-temurun dan lazimnya anak-anak perempuan berumur 12 tahun sudah bisa menenun. Kini berkembang harapan di tengah masyarakat untuk menjadikan menenun yang semula pekerjaan sampingan dan tidak bernilai ekonomi, menjadi sumber mata pencaharian (selain bertani) untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup, seperti di Desa Pringgasela. Di Desa Pringgasela, para ibu rumah tangga berperan besar membuat kain tenun dan menghasilkan berbagai produk turunan, seperti baju, tas, sandal, dan sebagainya. Meskipun tampak baik-baik saja, para perempuan ibu rumah tangga dan penenun ini memiliki dinamika relasi gender yang unik untuk dilihat. Beberapa di antaranya dikemukakan berikut ini. IS salah satu perempuan ibu rumah tangga penenun di Lombok Timur mengungkapkan dinamika kesehariannya.

“*Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum wr. wb.* Kami ibu-ibu perajin di Pringgasela ini rata-rata menenun, dari rumah ke rumah pasti ada alat tenun. Disitu dari pukul 17.00 yang muda, yang tua tetap kita utamakan menenun itu. Dari bangun pagi menyiapkan sarapan dulu. Waktu tidur, anak subuh sudah bangun. Setelah itu beres-beres rumah dulu, buat siapin sarapan, selesai itu tenun kita siapin. Dari situ ada berapa jam setelah sarapan, masuk tenun. Sekitar jam 10.00–11.00, keluar lagi untuk masak makan siang keluarga. Setelah itu salat, masuk lagi menenun. Begitu setiap hari kita lakukan di desa kita. Begitu seterusnya, sampai asar lagi. Keluar dari tenun lagi, salat, istirahat sebentar, kadang-kadang masuk lagi ke tenun. Nah baru malamnya kita istirahat, tapi kadang-kadang ada juga yang masih nenun malam harinya gitu. Apa ya? Dibilang kerjaan samping-sampingan, *full* ga ada istirahatnya maksudnya gitu. Terus-menerus kita kerjakan kan karena pembuatannya cukup lama ya. Satu kain itu butuh waktu dua minggu baru jadi minimal itu ada yang satu bulan, ada yang tiga minggu. Minimalnya dua minggu baru jadi satu kain yang panjangnya empat meter, yang lebarnya kurang lebih 62–65 cm paling lebar. Ya kebanyakan 60 lebarnya. Ya seperti itu kita mengerjakan tenun.” (IS, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

IS menunjukkan bagaimana aktivitas menenun adalah hal yang sudah lazim dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari di rumah. Menenun dilakukan oleh perempuan tua maupun muda. Menenun dilakukan oleh perempuan ibu rumah tangga di sela-sela pekerjaan rumah utamanya, yaitu memasak, menyiapkan sarapan, menyelesaikan berbagai urusan rumah, dan melakukan ibadah wajib salat. Di sela-sela waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk istirahat, para perempuan ibu rumah tangga disibukkan dengan aktivitas menenun yang biasanya dilakukan dari jam 10.00 pagi hingga malam. Oleh karena itu, sebagian besar waktunya habis untuk menenun. IS bahkan menyindir sebagaimana dikemukakan di atas bahwa tidak tepat jika dikatakan menenun adalah pekerjaan “sampingan” karena dikerjakan penuh (*full*) tanpa istirahat.

Tidak begitu berbeda dengan IS, HI, salah satu perempuan penenun, mengemukakan hal yang lebih detail mengenai relasi gender dalam keluarga:

*“Asalamualaikum wr. wb. Peran suami saya sangat banyak membantu, ketika saya masuk menenun ya saya meminta bantuannya sedikit. Kan ada prosesnya banyak sekali, ketika dia tidak bekerja dia bantu melinting. Kan kita udah di dalem, pas gesek papannya habis, papan kan yang masukan benang itu. Itu kalau sudah habis pas kita udah duduk, dia kita suruh bantu. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita disuruh buat itu, kita keluar, kopi, buat makan, setelah itu kita masuk lagi. Suami bekerja kuli bangunan, serabutan. Kalau pas ada kerjaan dia tidak bantu, kalau pas tidak ada kerjaan dia kita suruh bantu. Mau sih tapi, sama sebenarnya, kalau pas dia lagi butuh mau dibeliin rokok ya kita bantu dia beliin rokok. Sebenarnya pas dia keluar gaji sebulan, kadang dua bulan, apalagi kalau penghasilan tenun tidak mencukupi. Apalagi wajib kita keluarkan 15 ribu per-pagi, itu wajib siang atau malam, paginya belum ngajinya belum. Belum anaknya minta dua atau tiga ribu, kan penghasilan kita satu kain tenun dua minggu itu 400 kalau kita jual, kalau dia laku lagi. Kadang dua minggu kadang satu bulan jadinya, tergantung kita masuk. Kalau kita masuk jam enam pagi, keluar jam 10 pagi bisa itu jadi dua minggu....”* (HI, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

HI menunjukkan bagaimana relasi gender antara dirinya dan suaminya. Suaminya seorang kuli bangunan serabutan yang kadang kala membantu sedikit pekerjaannya menenun. Meskipun demikian, HI tetap menjaga relasi gender konvensional yang ketika suaminya memintanya untuk membuat kopi ataupun makanan, dia akan berhenti menenun dan melakukan keinginan suaminya. Bahkan, HI juga harus menyediakan kebutuhan suaminya untuk merokok, di samping untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dari penghasilan yang kecil dan tidak menentu dalam penjualan kain tenun, justru HI tidak dapat menikmati apa pun dan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan suami maupun anak-anaknya.

Melalui IS dan HI kini masyarakat setempat mengharapkan menenun bukan lagi sekadar menjaga tradisi dan pekerjaan sampingan, tetapi menjadi mata pencaharian untuk menopang kebutuhan keluarga. Namun sayangnya, meskipun menenun sudah berevolusi dari sekadar pekerjaan tradisional dan sekarang bernilai ekonomi, tidak terjadi perubahan relasi gender di dalam keluarga para perempuan penenun. Perempuan penenun yang juga ibu rumah tangga tetap menjalankan relasi gender konvensional dengan suaminya. Mereka akan memprioritaskan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga yang secara tradisi menjadi tanggung jawab mereka. Mereka akan berhenti menenun jika suaminya meminta mereka memasak, membuat kopi, atau bahkan mencukupi kebutuhan rekreatif suaminya, seperti merokok melalui uang hasil menenun. Padahal bisa saja perempuan penenun dan ibu rumah tangga ini meminta bantuan suaminya melakukan pekerjaan rumah tangga biasa, seperti mencuci, membuat kopi, tanpa merepotkan dan mengganggu pekerjaan istrinya yang menenun untuk menopang kehidupan kerluarga.

Perempuan penenun sekaligus ibu rumah tangga juga menggunakan uang hasil menenun untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dari ilustrasi ini, tampak jelas bahwa sebenarnya para perempuan penenun ini belum mengalami perubahan relasi gender yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki. Bahkan, aktivitas menenun yang sekarang diharapkan menjadi penopang ekonomi keluarga justru membuat perempuan semakin memiliki beban “*triple*” karena dia harus menjadi istri yang melayani kebutuhan suami, ibu rumah tangga yang mengurus berbagai keperluan anak-anak, dan penopang ekonomi kehidupan keluarga melalui menenun.

Menenun sejauh ini belum bisa mengentaskan para perempuan dari kemiskinan mengingat harga jual kain tenun yang sangat murah, tidak sebanding dengan modal dan kerja keras perempuan dalam membuat kain tenun. AT dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) mengatakan para perempuan penenun sering menjual kain dengan harga murah ketika terdesak kebutuhan uang untuk melakukan upacara keagamaan atau ibadah. Harga tenun yang semula Rp450.000,00 dapat dijual dengan harga hanya Rp250.000,00 sampai

Rp300.000,00, padahal seharusnya harganya bisa di atas Rp500.000,00 (AT LPSDM, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017). TH, ibu rumah tangga dari kelompok tenun Tarum, mengungkapkan hal yang sama bagaimana kain tenun dihargai murah, tidak sebanding dengan kerja keras perempuan penenun.

“... perajin saat sangat-sangat butuh uang dimasukkan (standar harga) ke yang paling rendah gitu. Menunggu yang mahal kan lama, misalnya saat itu butuh uang anak sakit, terpaksa kita jual murah, asal bisa aja pakai beli ini, beli itu. Itu kendalanya kita disana. Menyeragamkan harga disitu masih sulit, belum ada. Mungkin disini kita minta pemerintah bagaimana caranya di situ itu untuk pemasaran. Paling tidak sama *art shop-art shop* yang lainlah diambil dari. Sebenarnya, mereka tau yah bahwa lelah, modal, dana buat barang itu mereka tau, cuma ga ngerti juga kenapa mereka bisa beli dengan harga semurah itu. Kita juga bingung, tapi kadang-kadang kita perajin yang penting ada uang, dapet makan aja. Gitu itu masalahnya di kita ya. Minta solusinya disini bagaimana caranya menangani hal seperti itu untuk ibu-ibu perajin biar tidak seperti itu lagi, tidak lapar, sukses dari tenun-tenunnya gitu.” (TH, FGD di Lombok Timur, 18 Juli 2017).

SH dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga menegaskan bahwa meskipun tenun diharapkan menjadi salah satu sumber kenaikan pendapatan masyarakat dan menjadi pekerjaan utama, harga jual kain tenun dirasakan murah dan tidak sesuai ongkos produksi sehingga belum dapat menyejahterakan masyarakat (Wawancara dengan SH Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Di Lombok Timur, kegiatan menenun ternyata belum diringi dengan perubahan relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga meskipun telah meningkat menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Menenun di Lombok Timur jika tidak ditangani dengan baik justru menjebak perempuan ibu rumah tangga ke dalam pusaran beban yang tidak hanya “*double*”, tetapi “*triple*”. Mereka harus menjalankan peran dan tanggung jawab domestik sebagai istri dan ibu yang mengurus

semua urusan rumah tangga, ditambah lagi dengan menenun sebagai penopang kehidupan keluarga. Beban ketiga ini dahulu tidak terjadi ketika menenun masih ditempatkan sebagai sekadar bagian penjaga tradisi. Selain itu, masih murahnya harga kain tenun semakin membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Perempuan ibu rumah tangga dan penenun sulit memperoleh kemandirian finansial, bahkan untuk mengurus keperluan pribadinya. Kain tenun yang dihargai murah hanya cukup dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan suami, anak, dan keperluan ibadah yang tidak ada nilai tambah yang langsung dapat memberdayakan dirinya.

#### **D. Perempuan Penenun di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)**

Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTT berinisial WR mengatakan bagaimana kain tenun mengalami perubahan posisi dan fungsi, dari semula hanya dipergunakan untuk upacara adat kini dilihat sebagai potensi ekonomi.

“Kalau tenun di NTT itu kita menyebutnya dengan tenun ikat. Banyak yang mengatakan dengan banyak istilah tapi kita sepakat dengan tenun ikat. Sejak dahulu kala orang NTT sudah jadikan menenun ini sebagai pekerjaan untuk mengisi waktu luang, setelah mereka pulang dari kebun, mereka akan buat tenunan, yang pada akhirnya akan mereka pakai untuk pakaian sehari-hari maupun acara-acara penting adat atau keagamaan. Itu kalau dari sisi budaya. Sementara kalau dari sisi pariwisata kami melihat ini dari sisi potensi. Potensi yang tidak main-main karena menurut saya kalau tenun ini kita olah lagi akan menghasilkan nilai tambah yang tidak kecil. Jadi, kalau hasil yang ada banyak yang mengatakan bahwa NTT punya hasil industri rumah tangga. Kalau menurut saya tenun itu belum kita katakan sebagai industri rumah tangga. Kalau industri harus punya komponen. Misalnya ada yang mengurus kapas sendiri, kemudian dari kapas ke benang ada kelompok sendiri, kemudian komponen ini disatukan keluar tenun ikat. Tapi kenyataannya di NTT ini buat

tenun satu orang. Jadi, kita belum bisa sebut ini industri. Jadi, nanti kalau orang pesan dengan jumlah besar, jelas tidak ada. Nah sekarang ini orang sudah memberi waktu khusus untuk membuat tenunan. Itupun mereka masih bikin tenunan sendiri. Jadi, itu ibu-ibu atau nona-nona yang bikin tenunan ya paling cepat satu bulan untuk satu kain.” (Wawancara dengan WR, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

WR menjelaskan bagaimana kain tenun ikat NTT belum dapat dikategorikan sebagai industri karena semua komponen proses penenunan dilakukan satu orang. Proses produksi kain masih dalam taraf rumah tangga yang dilakukan sebagai sambilan ibu rumah tangga, dengan proses produksi yang lama, dan volume produksi sedikit.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT berinisial SM mengatakan bahwa pemerintah daerah memang berusaha mengembangkan kain tenun NTT dengan ciri khasnya menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat (Wawancara dengan SM, Kadis Nakertrans Provinsi NTT, 13 Juli 2017). SM juga menceritakan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia perempuan penenun dengan pelatihan tenun ikat selama satu bulan kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk satu tahun anggaran—terdiri atas 20 orang perempuan penenun di satu kabupaten, sebagai upaya menjawab tantangan MEA—(Wawancara dengan SM, Kadis Nakertrans Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

Kepala Bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang berinisial RK mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya, yakni

“...program kami masih berfokus pada pengembangan tenun ikat ini dari usaha kecil menengah sampai bisa menjadi koperasi, karena kebanyakan industri tenun ikat ini masih bersifat tradisional, alat-alatnya masih menggunakan tradisional. Cuma hanya ada 1–2 saja yang sudah menggunakan yang sudah bisa menggunakan atau mengikuti alat-alat modern, tetapi tidak juga yang tradisional itu kalah bersaing justru memang kualitas mereka jauh lebih bagus karena

di kelola oleh tahapan yang tradisional dan mutunya bisa dijamin lebih bagus. Contohnya kalau merendam pewarnaan itu betul-betul menggunakan pewarna yang alamiah, betul-betul diambil dari getah pohon, akar-akaran itu butuh proses panjang, tetapi hasilnya jauh lebih bagus. Kalau yang modern itu kan sehari bisa jadi beberapa warna, tetapi kualitasnya jauh kalah dari yang tradisional. Itu yang selama ini kami masih mencarinya bagaimana sehingga pola tradisional itu masih dipertahankan, tetapi menggunakan alat yang modern sehingga kualitasnya tetap terjamin....” (Wawancara dengan RK, Kepala Bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Lebih jauh RK menjelaskan terdapat 17 orang pendamping di Kota Kupang untuk mendampingi perajin perorangan maupun lima kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas sepuluh perempuan (Wawancara dengan RK kepala bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang, 14 Juli 2017). PE dari Dinas Pariwisata Kota Kupang menuturkan bagaimana kebijakan Walikota Kupang ke arah pengembangan kain tenun sebagai bagian pariwisata sudah mulai dilakukan, sebagai bagian pemberdayaan perempuan. “... Karena yang baru ini mereka sudah lebih fokus ke pariwisata. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Memang pemberdayaan perempuan khususnya, kita memang melihatnya masih punya budaya-budaya konvensional, karena NTT kan masih merasa bahwa perempuan itu di jajaran orang itu dia masih di level kedua. Tapi kan kesini kita sudah semakin maju....” (Wawancara dengan PE dari Dinas Pariwisata Kota Kupang, 14 Juli, 2017). PE kembali menegaskan pentingnya mengangkat kain tenun sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat dengan mengatakan, “Kalau fokus ke ibu-ibu, itu *basic needs*-nya kan hanya untuk mencari sesuap nasi, nah kalau bisa lebih dikembangkan menjadi *main income* akan lebih bagus....” (Wawancara dengan PE dari Dinas Pariwisata Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Dari petikan wawancara tersebut, diketahui bahwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mengupayakan pengembangan kain tenun NTT menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan

masyarakat. Upaya pemerintah Provinsi NTT dengan melakukan pelatihan perempuan penenun juga diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang untuk mengembangkan tenun ikat ini dari usaha kecil menengah sampai bisa menjadi koperasi, selain melestarikan tenun ikat dengan proses dan pewarnaan alami. Meskipun komitmen Pemerintah Provinsi NTT dan Kota Kupang tampak bagus, ada dinamika yang penting dilihat dalam keseharian perempuan penenun dan ibu rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Salah satu perempuan penenun di Kota Kupang berinisial SV mengungkapkan serangkain kegiatan sehari-harinya. “Kegiatan saya pagi-pagi itu kalau anak saya sudah pergi sekolah, saya lalu memasak, atau mencuci, atau kasih makan binatang, dan lain-lain. Lepas itu baru saya bisa menenun. Sorenya nanti anak pulang sekolah, mereka kerjakan tugas lalu saya juga kerjakan tugas lagi” (SV penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017). Melalui cerita SV diketahui bahwa menenun dilakukan di sela-sela kegiatan utamanya dalam mengurus anak-anak dan menyelesaikan beragam urusan rumah tangga. Menenun masih menjadi kegiatan sampingan.

Bahwa menenun menjadi kegiatan sampingan juga dikemukakan oleh DB dari kelompok Bugenvil. DB menenun setelah menyelesaikan semua urusan rumah tangga dari pukul 10.00, termasuk hari Sabtu dan Minggu untuk mengisi waktu. DB sulit menenun dalam waktu lama karena memiliki dua anak kecil berumur sembilan dan empat tahun (DB, FGD di Kota Kupang, 15 Juli, 2017). Hal yang sama dikemukakan oleh DL dari Kupang Timur. DL menenun setelah semua pekerjaan rumah selesai dari pukul 10 dan tidak dapat menenun lama karena memiliki dua anak kecil (DL, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017). Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa menenun masih merupakan pekerjaan sampingan.

Penenun yang lain, SR, mengatakan bagaimana menenun di sela-sela kegiatannya sebagai ibu rumah tangga.

“Pekerjaan saya sehari-hari saya sebagai seorang penenun. Ada suami dan saya punya anak dua. Dan semua ada bagian dalam menenun. Kami punya komitmen dalam berumah tangga, bagaimana harus membangun ekonomi keluarga, karena saya punya prinsip bapak ada uang, saya juga ada uang. Oleh karena itu, saya tekuni tenun ikat ini mulai dari masih sekolah saat usia saya 15 tahun. Dan puji tuhan, dengan adanya pendampingan, dulu dari mulai pewarnaan kimia sudah beralih ke proses pewarnaan alam. Kelompok kami mulai terbentuk tahun 2014 dan bekerja sama dengan ASPPUK dan anggota kelompok kami ada 25 orang dan semuanya penenun. Ketika bergabung dengan yal, banyak hal yang kami dapat. Kalau dulu kami membeli obat kimia dengan sangat mahal. Tapi kalau sekarang kami mulai memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar, kemudian kulit kayu, bahkan bulu kelapa yang mau dibuang kami jadikan pewarnaan alam. Dan pemasaran sudah sampai Eropa, bahkan bulan kemarin ada kunjungan dari Uni Eropa. Kendalanya dalam bentuk pemasaran, karena orang kalau beli kainnya saja mungkin masih kurang, jadi mereka mencari produk yang sudah jadi. Kendalanya hanya itu, bagian pemasaran. Kalau bisa lewat kesempatan ini bagaimana kain-kain ini kita jadikan produk-produk lain” (SR, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Dari cerita SR, diketahui dimensi lain dari menenun bahwa menenun juga dimaksudkan untuk membangun ekonomi keluarga dan membuat dirinya memiliki sumber daya ekonomi sehingga sama dengan suaminya. Cerita yang agak berbeda dari AT penenun yang juga seorang Guru PAUD, sebagaimana dikatakannya:

“Pekerjaan saya sehari-hari sebagai Guru PAUD. Jadi, saya mengelola PAUD. Kegiatan di PAUD ini hanya empat hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadi Jumat-Sabtu itu saya kegiatannya menenun. PAUD itu dari jam 8.00 sampai jam 10.00. Setelah pulang dari mengajar, saya lanjut menenun. Karena kita ada pasaran di beberapa toko yang ada di Kota Kupang, jadi kita harus kerjakan untuk membantu ekonomi. Memang suami juga kerja, tapi kita

harus bantu suami untuk biaya anak sekolah” (AT, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui cerita AT, menenun adalah pekerjaan sampingan yang dikerjakan di sela-sela pekerjaan utamanya sebagai pengajar PAUD. AT juga mengatakan bahwa tujuannya menenun adalah untuk membantu ekonomi keluarga, untuk keperluan sekolah anak-anaknya. Pengalaman lain dikemukakan oleh MA seorang penenun yang mengatakan menenun bukan karena uang.

“Saya penenun, ketertarikan saya menenun bukan karena uang. Tapi karena mau mengungkapkan rasa seni, seni itu kita tuangkan dalam motif-motif kain. Jadi, banyak belajar dari teman lain, kemudian saya merasa bahwa ternyata bisa cari uang dengan cara ini. Kemudian dari tahun 2002, untuk Kabupaten Kupang itu kelompok tenunnya itu beberapa kelompok yang anggotanya 20—30 orang itu penenun. Dalam perjalanannya itu banyak kami dampingi penenun, dan juga ada banyak modifikasi, seperti yang dibilang tadi yang semula menggunakan naptol kita kembali ke celup tradisional. Jadi, kalau kaitannya dengan tenun ikat, memang kalau dulu alasannya modal, kalau sekarang mungkin sudah ada koperasi, kemudian dana ada dana desa, dan sebagainya. Ada kemudahan, tapi bagaimana kita bisa mengakses itu jadi persoalannya. Kita perempuan, jadi kalau kata orang desa itu kita itu tidak bisa, tetapi menurut saya, ada perkembangan baik kalau kita berorganisasi. Untuk itu saya punya saran, nanti kalau tenun ikat ini bisa jadi ikon NTT, memang sekarang orang sudah omong banyak tapi saya kira pasar belum banyak....” (MA, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui cerita AT, diketahui bahwa bagi dirinya menenun tidak hanya sekadar mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi untuk ekspresi seni dan menggarisbawahi pentingnya berorganisasi sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Perempuan penenun yang lainnya, yaitu SL juga mengungkapkan dinamika dan kesulitan dalam menenun dan mengurus anak-anak, seperti yang dikatakan berikut.

“Dalam satu rumah tangga kita ada keluarga, yaitu bapak, anak, mama, jadi malamnya bertemu doa untuk makan bersama di meja makan itu kita punya rencana kerja; anak ke sekolah, bapak ambil dia punya kegiatan sendiri, mama punya kegiatan. Jadi, bangun pagi itu kita musti gumuli itu doakan itu. Jadi, akhirnya *kitong* sebagai mama itu pagi-pagi itu kita yang pertama kali angkat kegiatan, yaitu di tungku, untuk memasak buat anak, buat bapak untuk pergi kerja, menyimpan api, semua itu lalu duduk untuk kerja tenun. Jadi, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini saya sebagai mama harus datang supaya ada pengalaman supaya bisa dibagikan ke kelompok . Mama dari desa lain, menikah dengan orang dari desa lain. Jadi, kita titipkan (anak anaknya) kepada tante-tantanya. Tante-tante dari anggota dari Dasawisma, di kantor desa, di gereja, jadi mama Martha ini memotivasi kita semua dengan kegiatan-kegiatan dalam menghasilkan tenun baru, kain meja, keripik-keripik dari jagung, dari ubi, dari pisang. Jadi, sekarang kelompok ini masuk untuk buat itu. Jadi, kita kalau dalam kelompok kita buat keripik ini, nanti kalau dapat resep baru kemudian kita praktik. Lalu kalau kita bagi ke anggota hasil praktik kita, kira-kira kita satu orang dapat sedikit tapi kita uangkan satu orang lima ribu. Bulan datang kita bawa itu uang kita masukan kas, kalau ada resep lain lagi ya kita bisa buat. Jadi, kemarin kita dua hari ada pembinaan untuk pewarnaan dari ubi daun.” (SV, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui cerita SV, diketahui bahwa menenun dilakukannya setelah dia menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah, seperti memasak dan menyiapkan makanan untuk suami yang pergi kerja. SV juga menggunakan jaringan perempuan, yaitu tante-tante anggota *dasawisma* (adalah bagian program PKK, *dasawisma* merupakan kelompok ibu-ibu yang terdiri dari 10–20 kepala keluarga (KK) dalam satu Rukun Tetangga/RT) untuk membantu menjaga anak-anaknya. Kesulitan dalam menjaga anak-anak sembari menenun juga dikemukakan oleh MA.

“Saya mau cerita. Saya tidak punya anak, tapi ada anak-anak di rumah. Saya mau cerita susahny ada anak di rumah. Ketika sudah menenun, walaupun kita sudah kasih makan tapi pada saat mereka menangis tapi waktu mereka mau gendong dan sebagainya kita mau marah tidak bisa. Apalagi kalau mereka tarik itu alat kita, susah sekali. Jadi, sebagai ibu kita harus prioritaskan, kita mau urus anak atau urus tenun. Karena uang juga butuh, tapi anak juga butuh kita. Misal satu hari kita satu bisa satu satu helai, tapi kalau ada anak kita tidak bisa itu kita dapatkan. Jadi, kita harus prioritaskan kerja atau prioritaskan anak, tidak mungkin dia tidur dan makan sendiri, karena biasanya bapaknya ke kebun dan kita tidak ada pengasuh. Kalau orang punya uang mungkin punya pembantu, tetapi kalau di kampung tidak ada, biasanya tantenya atau neneknya itu yang mau mengasuh kita titip” (MA, penenun di Kota Kupang, FGD di Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui petikan wawancara tersebut, MA memperlihatkan kesulitannya dalam membagi waktu antara perannya sebagai perempuan penenun dan sebagai ibu dalam mengurus anak-anak, karena suaminya tidak mau membantunya. Apabila anaknya memerlukan perhatiannya, dirinya akan berhenti menenun dan memprioritaskan kebutuhan anaknya.

Selain menenun, ada juga perempuan yang aktif menjadi koordinator kelompok penenun sebagaimana kisah WL berikut ini.

“Saya akan menceritakan aktivitas saya dari senin ketemu lain lagi. Kebetulan saya dipercaya jadi ketua RT di wilayah saya. Kegiatan saya sehari-hari saya sebagai pengusaha, kalau sedang tidak keluar biasanya saya mengurus cucu dan ngurus usaha di rumah kebetulan ada kios dan juga kalau ada pesanan di rumah buat produk, saya buat produk, karena disitu saya bergerak di bidang perikanan untuk buat dendeng sama abon dan steak. Jadi, kalau ada pesanan, di samping jaga kios, kita produksi. Ya begitu kegiatan saya kalau tidak ada aktivitas dalam kelompok, kebetulan dalam kelompok saya dipercaya untuk mengkoordinasi kelompok mawar tersebut. Jadi, yang bisa mengatur waktu ya kita sendiri, bagaimana kita bisa meluangkan

waktu untuk bisa membantu orang banyak. Kadang-kadang kalau saya sedang keluar saya kasian juga itu sama masyarakat kalau mereka sedang butuh. Awalnya agak sulit mengubah pemahaman suami bahwa kita jalan itu bukan jalan sembarangan. Saya jalan untuk membantu orang banyak. Tapi dari hari ke hari akhirnya suami mengerti. Sekarang kalau saya bilang besok saya ada kegiatan disini, suami membolehkan, dan kadang-kadang kalau ada motor yang sedang tidak dipakai dia untuk pergi dia bilang pakai saja. Jadi, harus bisa mengatur waktu. Memang awalnya agak berat, karena kami keluar dari pagi sampai malam baru pulang. Tapi lambat laun suami mungkin memahami 'oh ternyata saya punya istri keluar tidak sembarangan, dia keluar untuk membantu banyak orang' Kalau ada telepon besok ada pertemuan disini, sudah dia tidak berkomentar. Kadang-kadang kalau dia punya waktu dia jemput" (WL, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017).

Sebenarnya, dalam rantai proses pembuatan kain tenun, laki-laki juga berperan, seperti "Biasanya ada bapak-bapak kalau ada kerja itu membantu menggulung benangnya itu, benangnya kan dibeli terus datang. Nah, itu digulung oleh bapak-bapak. Jadi, dibantu oleh bapak-bapak terutama dalam menggulung" (Wawancara dengan Asisten Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, 14 Juli 2017). Namun, melalui berbagai petikan wawancara dari para penun dan perempuan yang terlibat dalam pembinaan kelompok penun, dapat dilihat bahwa menenun masih ditempatkan sebagai kegiatan sampingan di Kota Kupang. Meskipun ada harapan kain tenun menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan keluarga, namun masyarakat khususnya kaum perempuan belum mampu menempatkan kegiatan menenun sebagai kegiatan utama.

Sebenarnya, semakin banyaknya perempuan ibu rumah tangga di Kota Kupang yang menenun untuk memenuhi kebutuhan hidup sejalan dengan perkembangan Kota Kupang. Bapak AM, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang menjelaskan, sekarang di Kota Kupang sudah mulai lazim seorang istri juga bekerja di luar rumah, kecuali istri tidak berpendidikan karena sulit bekerja di sektor formal.

Dengan kebutuhan yang meningkat, para istri juga ikut membantu perekonomian keluarga, termasuk menenun, seperti dia contohkan di Yogyakarta (perempuan membatik) (Wawancara dengan AM, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, 14 Juli 2017).

Meskipun perempuan di Kota Kupang makin banyak menjadikan kegiatan menenun sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga, ini tidak berarti mengubah relasi gender dalam keluarga. Perempuan tetap diharuskan menjalankan peran domestik, seperti memasak, menyiapkan makanan dan menjaga anak-anak, serta menyiapkan keperluan suami. Jadi, kemampuan perempuan untuk menghasilkan sumber daya ekonomi baru dalam keluarga melalui menenun ternyata tidak serta merta mengubah relasi gender. Bahkan, perempuan penenun dengan anak-anak kecil menghadapi lebih banyak kesulitan karena harus merawat anak-anak mereka sembari menjalankan kegiatan menenun. Menariknya, para perempuan penenun ini memanfaatkan jaringan perempuan dari ibu dan tante-tante mereka untuk membantu mereka menjaga anak-anak apabila mereka sibuk menenun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di Jawa, sebagaimana temuan Ratna Saptari. Saptari melakukan penelitian di Desa Kayuwangi Malang dan mencatat penggunaan jaringan kerabat (*kin-based networks*) dan jaringan antarkerabat (*inter-household networks*) untuk menyediakan perawatan anak-anak agar perempuan dapat bekerja sebagai buruh pabrik rokok (Saptari, 2000).

Jadi, tidak jauh berbeda dengan pengalaman perempuan penenun di Lombok Timur, perempuan penenun di Kota Kupang juga justru mengalami beban “*triple*” karena harus tetap menjalankan peran menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga sebagai istri, ibu, dan sekarang ditambah lagi dalam ekonomi kreatif tenun untuk menambah penghasilan keluarga. Meskipun tidak semua penenun berorientasi menenun untuk menambah penghasilan keluarga, terdapat juga beberapa penenun yang melakukannya untuk memenuhi rasa seni.

Sedikit terjadi perubahan dalam relasi gender antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana perempuan yang menjadi pendamping kelompok penenun. Kasus WL memperlihatkan bagaimana aktivitasnya berorganisasi mendampingi perempuan penenun setiap hari pada

awalnya tidak didukung suaminya. Namun, ketika perlahan suaminya paham akan kegiatan dan dampak positifnya, secara perlahan suami WL mendukungnya, bahkan tidak segan mengantarkannya. Pada kasus ini, WL yang bukan penenun, tetapi seorang pengusaha dan mendampingi kelompok perempuan penenun, memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada para perempuan penenun. Para perempuan penenun rata-rata dari keluarga ekonomi lemah yang ingin keluar dari kemiskinan. Sementara itu, WL berasal dari kelas menengah yang berkecukupan.

Dalam konteks ini, menenun bagi para penenun perempuan kelas bawah mungkin belum menjadi sarana perubahan relasi gender. Namun, berkembangnya tenun sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat ternyata memberikan dampak positif bagi perempuan kelas menengah karena mereka memiliki sumber daya lebih untuk berkembang. Dengan demikian, perlahan para perempuan tersebut memiliki posisi tawar untuk memperbaiki relasi gender dalam keluarga dan berperan luas di masyarakat.

## **E. Narasi dan Jaringan Perempuan dalam Pemasaran Kain Tenun**

Selain narasi perempuan penenun, yang juga penting untuk diperlihatkan adalah narasi dan peran perempuan dalam pemasaran kain tenun di Lombok Timur dan Kota Kupang. Secara khusus penulis ingin memperlihatkan bagaimana narasi perempuan, jaringan, serta peran perempuan dan peran laki-laki dalam pemasaran kain tenun. Narasi dan jaringan perempuan yang akan dibahas pada bagian ini memperlihatkan interaksi antarkelas sosial para perempuan terjadi dalam pemasaran kain tenun. Selain itu, dikemukakan pula peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemasaran kain tenun. PKK (pada awalnya kepanjangan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah organisasi untuk perempuan yang disokong dan didirikan rezim Orde Baru pada tahun 1972 sebagai upaya merespons perkembangan era Reformasi. PKK melakukan penyesuaian

dan perubahan nama menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada tahun 2000 (Dewi, 2015, 2023).

Di Kabupaten Lombok Timur, upaya memfasilitasi pemasaran para pengusaha kecil menengah termasuk kain tenun dilakukan dengan wadah Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (FPL). Beberapa kegiatan yang dilakukan FPL dalam memperkenalkan produk kain tenun yang memiliki ciri khas berbeda-beda di tiap kecamatan, misalnya melalui pameran, lomba desain, fesyen, dan acara-acara kelembagaan dengan memanfaatkan skema *corporate social responsibility* (CSR) dari BUMN (Wawancara Kustulasari & Rakhmadhani ASC UGM dengan ST, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Pemasaran kain tenun menjadi salah satu persoalan utama di Lombok Timur karena belum dikelola secara baik dan profesional. Beberapa upaya yang telah dilakukan misalnya meminta para pegawai pemerintah daerah mengenakan baju kain tenun pada hari tertentu, membawa kain tenun ke pameran-pameran nasional dan internasional, seperti difasilitasi ASPPUK (Wawancara dengan ST, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga melakukan promosi kain tenun ke luar Lombok Timur melalui berbagai acara (*event*) dan meminta para pegawai menggunakan kain tenun minimal satu kali dalam seminggu (Wawancara dengan SH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017). SH juga menambahkan bahwa dalam rantai pembuatan kain tenun, bapak-bapak biasanya berperan membeli benang dan alat, sementara pada rantai pemasaran kain tenun, bapak-bapak ikut berperan memasarkannya. Dari pengalamannya selama ini, SH belum pernah menemui perempuan penenun yang dibina dalam kelompok yang dimarahi atau tidak didukung oleh suaminya (Wawancara dengan SH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Menariknya, dalam rantai pemasaran tenun di Lombok Timur terungkap perbedaan pendapatan antara para penenun dan para penjual. Para penjual atau pengepul kain tenun lebih menikmati atau memperoleh keuntungan daripada para perajin atau penenun. Para

pengepul atau penjual biasanya mengambil barang dengan harga murah yang kemudian dijual dengan harga tinggi (Wawancara dengan ST, Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Lombok Timur, 17 Juli 2017).

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, WR Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan hal berikut mengenai pemasaran kain tenun.

“Dengan demikian, kita tidak komersilkan itu dengan bikin kain jual kain. Mendingan kita kalau bikin tenunan itu kita jualnya jas, nanti potongan kecil dari jas itu kita masih bikin souvenir atau produk lain. Kalau itu yang harus kita lakukan di sektor pariwisata ya kita sentuh dengan kebijakan ekonomi kreatif kita, yang kita pada saat ini kita rekatkan itu ke bidang industri. Nah bidang industrilah yang nanti menggerakkan segala upaya dalam rangka mengolah hasil produk budaya berupa tenun ikat ini untuk menjadi satu olahan baru. Jadi, nanti kalau ada orang mengatakan 'kok kain NTT mahal ya?' Ya mahal lah, kan *handicraft*. Itu bikin sendiri, prosesnya lama, dan tidak akan sama dengan kain yang lain. Kemudian kalau kita mau hitung waktu produksinya dan biaya produksinya, kalau kita bilang itu orang yang bikin itu subsidi kepada orang yang beli. Satu bulan itu kalau kita hitung ongkos dia makan saja kalau kita hitung dia makan tiga kali sehari, sebulan itu ada 90x dia makan kalau dengan harga Rp5.000,00 per porsi. Itu sudah berapa saja duitnya? Nah sementara dia menghasilkan produk itu dijualnya kalau di yang mahal itu. Cuma dari daratan Sumba atau dari tenunan tertentu karena dianggap kualitasnya bagus karena jahitannya rapat. Itu yang dikategorikan mahal.” (Wawancara dengan WR, Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

Dari keterangan WR, kain tenun NTT termasuk ekonomi kreatif yang kemudian direkatkan dalam industri. Kain tenun diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan tangan sehingga harga jualnya menjadi tinggi. Jadi, jika ada produksi massal yang mengarah ke industri kreatif adalah pada hasil olahan kain tenunnya.

Di Kota Kupang pemasaran kain tenun diintegrasikan dalam kerangka besar upaya pemerintah Provinsi NTT dalam mempromosikan kain tenun di kabupaten lain, seperti Sumba Timur, Belu, dan Sikka. Beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti melakukan berbagai pameran; menjalin kerja sama dengan METRO TV dengan para presenter memakai kain tenun; memajang kain tenun di toko-toko souvenir di kabupaten/kota termasuk di Kota Kupang dengan berbagai variasi, seperti kain adat, dompet, kain, tas, dan sebagainya sejak tahun 2012 (Wawancara dengan AF, Sekretaris Bappeda Provinsi NTT, 13 Juli 2017). Di Kota Kupang, Bapak AR, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang mengatakan kebijakan daerah untuk memakai kain tenun pada hari Kamis dan Jumat untuk mendorong pemasaran kain tenun (Wawancara dengan AR, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, 14 Juli 2017).

NO dari Dinas Perindustrian Provinsi NTT mengungkapkan perubahan nilai kain tenun yang semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan adat menjadi orientasi bisnis. Dalam pemasarannya ke luar negeri, PKK dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan penting.

“Nah, semula tenun ini bukan ke arah bisnis, tapi untuk memenuhi kepentingan adat istiadat, budaya, jadi bukan bisnis. Nah, sekarang bergeser menjadi bisnis, jadi dulu orang bikin tenun ada upacara-upacara adat yang mereka *pake*, sekarang menjadi bisnis. Sekarang tenun NTT sudah masuk ke pasar dunia bahkan. Memang beberapa kali itu provinsi melalui PKK sudah sering dikirim ke luar negeri-luar negeri, ke Belanda sudah, ke Jepang sudah, itu tenun. Dan memang mendapat respons besar. Sehingga ada upaya dari pemerintah Belanda mengembangkan semacam (Wawancara dengan NO dari Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13 Juli 2017).

AF menambahkan adanya upaya ibu-ibu PKK setempat untuk membawa para desainer dari Jakarta untuk mengangkat kain tenun NTT.

“Awalnya dari ibu-ibu PKK. Baik dari Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan, waktu itu dengan ditetapkannya PI No. 6 (kalau tidak salah, soalnya saya lupa) tentang Kota Industri Kreatif, tapi tidak secepat itu ada Permen yang mengatur atau mungkin ada, tetapi saya lupa. PKK lebih mendahului dengan melakukan pertunjukkan (*show*) ke Jakarta dan melakukan kerja sama. Waktu itu Ibu yang sering menggunakan rancangan itu dan akhirnya ia menggunakan beberapa pameran untuk ekshibisinya dia hampir menggunakan semua pakaian. Untuk *event-event* khusus menggunakan kain tenun asal NTT.” (Wawancara dengan AF, Sekretaris Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13 Juli 2017).

Melalui kutipan wawancara dengan NO dan AF, diketahui bahwa perempuan secara kolektif melalui PKK berperan dalam pemasaran kain tenun. Bahkan PKK juga berperan dalam regenerasi para penenun.

“Ya ini yang disinggung Pemprov kemarin yang bekerja sama dengan Kementerian untuk membangun sekolah tenun, atau semacam prodi. Dulu kan, Menteriya orang NTT, dulu dibangun kan ya sekarang sudah balik soal biaya sehingga dokumen itu tidak sampai final. Dan penenun itu orang di kampung kan ya tidak semua orang sekolah. Orang yang sekolah biasanya tidak menenun, kalau yang sudah kuliah itu kerja. Jadi, kalau yang sudah di rumah tidak sekolah pasti bisa dan saya yakin itu pasti tidak punah.” (Wawancara dengan VE, Dinas Perindustrian Provinsi NTT, 13 Juli 2017).

Perempuan secara individu juga berperan dalam pemasaran kain tenun. YU, perempuan bukan penenun, namun seorang pengusaha keripik dan ibu rumah tangga, mengungkapkan upaya membantu memasarkan kain tenun dengan cara menghubungkan usaha keripik dengan kain tenun. Dalam wawancara dikemukakan beberapa cara yang ditempuhnya, yaitu:

“Saya ibu rumah tangga biasa yang mencoba untuk menjadi luar biasa. Dalam perjuangannya itu, kalau keringat bisa keluar darah dia

keluar darah, kalau air mata bisa keluar darah dia keluar darah. Tapi saya tidak akan membahas lebih mendalam soal itu. Saya hanya akan berbicara yang kaitannya dengan tenun. Saya sama seperti Mama Wid, kita pengamat, mendorong, memotivasi, dan memastikan agar bisa tenunan ini bisa diketahui orang. Saya juga bukan penenun, saya pengusaha keripik. Lalu saya berpikir bagaimana menghubungkan usaha saya dengan tenun. Jadi, saya menggunakan desain tenunan dalam label (keripik) saya. Jadi, produk saya kebetulan saya *konsen* di produk pertanian dan perikanan. Lalu, bagaimana saya membuktikan cinta saya terhadap tenun NTT ini, saya masukkan ke label produk saya. Jadi, meskipun orang lain yang mendesain, saya yang mendesain kasarnya. Misalnya saya mau mendesain keripik nangka saya dengan unsur tenun dari Ende. Maka nanti saya minta yang desain itu untuk memasukkan unsur desain tenun dari Ende untuk jadi *background*-nya. Jadi, inilah cara saya agar masyarakat tahu bahwa selain ada makanan lokal dari NTT, mereka juga tahu bahwa ada desain tenun khas NTT dalam kemasan produknya di situ. Tidak hanya dari Ende saja tapi saya masukkan juga desain tenun dari daerah lain. Itu cara saya mencintai tenunan dengan cara saya. Karena tidak mungkin saya memaksakan diri saya yang tidak memiliki keahlian menenun dan saya harus belajar tenun supaya orang bisa mengenalnya. Di samping itu, saya juga berkomitmen untuk memasukkan unsur kearifan lokal selain tenunan, juga bagaimana tenunan ini bisa mendukung produk-produk kerajinan lain.” (YU, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017).

Narasi lain dikemukakan oleh HE. Meskipun HE bukan penenun, aktivitasnya bergabung dalam proses ekonomi kreatif kain tenun, ternyata membawa pada pemberdayaan dirinya.

“Saya mama HE, sudah bergabung dengan Jargub sejak 2002. Cerita teman-teman sudah menggambarkan bahwa awal mula kami mau keluar itu dari rumah itu sebuah langkah awal. Tahun demi tahun kami berjalan, dan berkat penguatan kapasitas oleh LSM, kemudian mengenalkan kami ke lembaga-lembaga lokal maupun tingkat nasional sampai dengan 2010. Dari 2010 sampai 2012 kami dipercaya

mengelola dana. Berjalan dan terus berjalan dan sampai sekarang kelompok kami tidak melalui Jargub. Jargub hanya merekomendasi ke Pemkab. Kalau untuk bicara tentang tenunan, bagi kami Jargub merupakan hal yang tidak asing. Sebenarnya, di NTT ini kurang lebih yang sempat kami tahu ada 39 jenis motif dan anggota Jargub itu sendiri sekitar 20 lebih. Itu kami tahu per suku. Misalnya suku Timor sendiri itu ada beberapa jenis. Yang menjadi hal bagi Jargub, ketika kami mau mempertahankan motif kami, muncullah motif tiruan. Tapi berkat kerja sama kami, kami membangun relasi dengan pemerintah, akhirnya bukan hanya Jargub, tapi kami bermitra dengan lembaga lain, akhirnya selain dari pemerintah kabupaten, di provinsi juga mengharuskan ada hari-hari kerja yang harus menggunakan tenun dan untuk Kabupaten Kupang, kalau ada pegawai yang ketahuan memakai tenun dengan motif tiruan itu akan dapat hukuman dan itu bisa dibilang menjadi kebanggaan, karena itu merupakan perjuangan kami. Jargub sebenarnya punya masalah pada akhirnya, karena bukan hanya kami bersaing secara pasar, tetapi kami juga berpikir keberlanjutan untuk mempertahankan tenun yang akan datang. Generasi kami sampai dengan kami saat ini, kebanyakan tidak tahu tenun itu seperti apa, mengerjakannya seperti apa. Nah, oleh sebab itu, kami punya pemikiran untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang, untuk bagaimana tenun itu dijadikan sebagai pelajaran muatan lokal. Dan kami anggota Jargub yang tahu tentang tenun, siap untuk memfasilitasi jadi guru. Tidak hanya tenunan, tetapi juga aksesoris. Orang Jargub punya kemampuan luar biasa untuk membuat tenun, membuat aksesoris, dan menjahit tas. Saya coba lihat di Kota Kupang itu hanya lima saja yang bukan anggotanya dan anggota Jarpuk yang menenun itu sampai dengan Naimata ada 54 orang. Dan mereka pernah dapat dukungan dari pemerintah pusat, itu berarti jika kita bicara tenun, kita membangun relasi dengan pemerintah dan LSM. Tidak hanya penguatan kapasitas, tetapi juga bisa berelasi dengan perbankan (HE, FGD di Kota Kupang, 15 Juli 2017).

Melalui kisah YU dan HE, ternyata jaringan perempuan berperan besar dalam pemasaran kain tenun. Tidak hanya secara individu,

seperti dilakukan YU dan HE, tetapi juga kolektif melalui ibu-ibu pejabat PKK dari kabupaten dan provinsi. Dalam konteks ini terlihat bagaimana perempuan dari kelas sosial yang berbeda, yaitu kelas bawah (para penenun) dengan kelas menengah (ibu-ibu pejabat PKK) berinteraksi untuk membuat dan memasarkan kain tenun. Penelitian ini menemukan satu lagi peran penting PKK, di luar apa yang dikatakan oleh Soetjipto dan Adelina (2013) dalam mendorong pemberdayaan perempuan kelas bawah secara riil dengan berperan pada pemasaran dan promosi kain tenun.

## F. Penutup

Apakah menenun memberikan ruang berkiprah lebih “luas” bagi perempuan penenun di Lombok Timur dan Kupang? Jawaban untuk pertanyaan ini bisa ya dan bisa juga tidak. Paparan tulisan ini menunjukkan bahwa kain tenun kini menghadapi tantangan dan ekspektasi yang berbeda dengan masa lalu. Dalam konteks MEA, kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan keinginan pemerintah daerah mempromosikan wisata, kain tenun menjadi salah satu komoditas penting ekonomi kreatif yang hendak dikembangkan.

Kain tenun dan menenun kini tidak sekadar bagian ritual menjaga tradisi. Namun, kini sudah meningkat menjadi komoditas dan aktivitas ekonomi kreatif. Melalui aktivitas menenun, para perempuan penenun ibu rumah tangga telah memiliki ruang sosial baru yang mungkin dahulu belum pernah mereka bayangkan. Dengan menenun perempuan dapat ke luar rumah, melakukan interaksi secara individu maupun kelompok, serta meningkatkan keterampilan ekonomi dan cakrawala pandang. Meskipun demikian, keinginan kedua pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Kupang untuk menjadikan menenun sebagai kegiatan utama menambah pendapatan keluarga, tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan karena sejauh ini menenun dilakukan sebagai kegiatan sampingan.

Jika dilihat lebih mendalam, perubahan dari menenun sebagai sebuah ritual penjaga tradisi ke menenun sebagai aktivitas ekonomi kreatif tidak serta merta memperbaiki relasi gender di dalam keluarga.

Perempuan masih tetap diberikan porsi dan tanggung jawab pada posisi-posisi domestik, seperti mengurus rumah tangga, menyiapkan makanan, dan menyiapkan berbagai kebutuhan anak-anak dan suami. Suami pada umumnya belum mau membantu menjalankan tugas tugas domestik istrinya. Meskipun dalam rantai proses menenun, laki-laki juga berperan misalnya dalam membeli benang dan memasarkannya. Namun, perempuan penenun dengan anak kecil tetap menghadapi kesulitan menjaga anak-anak mereka. Perempuan tetap dibebani pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan saat ini justru ditambahkan satu lagi beban untuk memberikan tambahan pendapatan untuk menopang ekonomi keluarga. Tanpa ada perbaikan relasi gender yang seimbang, justru perempuan yang menanggung beban “*triple*” dalam ekonomi kreatif kain tenun.

Menenun sebagai aktivitas ekonomi baru memang memberikan ruang gerak sosial dan harapan baru bagi para perempuan ibu rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Namun, rendahnya harga jual kain tenun yang tidak sebanding dengan tenaga dan ongkos produksi menyebabkan perempuan penenun tetap terjebak pada lingkaran kemiskinan. Hasil penjualan kain tenun sebagian besar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan suaminya. Menenun saat ini sebagai aktivitas ekonomi kreatif belum bisa disebut memberdayakan perempuan penenun.

Selain itu, tulisan ini menemukan pentingnya isu kelas sosial. Perempuan penenun yang rata-rata berasal dari kelas bawah biasanya mengalami kesulitan untuk memperbaiki relasi gender yang lebih adil. Mereka tidak cukup memperoleh pendapatan bagi peningkatan posisi tawarnya di dalam keluarga. Berbeda dengan perempuan kelas menengah yang rata-rata tidak terlibat dalam penenunan. Para perempuan yang berperan dalam proses pemasaran kain tenun biasanya berasal dari kelas menengah sehingga memiliki modal ekonomi yang lebih besar dan mudah menjalankan berbagai kegiatan dengan dukungan dari suaminya. Jadi, persoalan kelas ini menjadi salah satu isu yang muncul dan perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan perempuan penenun. Dalam konteks interaksi antara kelas sosial ini

pula, perempuan kelas menengah baik secara individu maupun kolektif melalui PKK ikut berperan dalam pemasaran kain tenun.

Menemukan isu kelas sosial antara para pelaku ekonomi kreatif kain tenun di dua daerah ini, penulis menilai pisau analisis “interseksionalitas” atau “*intersectionality*” yang diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw (1991) sebagaimana diulas juga oleh Lykke (2010) adalah lensa yang tepat untuk melihat dan menganalisis adanya kompleksitas situasi diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan yang dihadapi para perempuan itu, bersilangan dan bersinggungan dengan berbagai persoalan lain, seperti ekonomi, kelas sosial, etnisitas, dan maskulinitas kebijakan negara sehingga pisau analisis ‘interseksionalitas’ ini akan mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi perempuan tidak hanya melihat dari satu sebab saja, tetapi dilihat dari berbagai macam sisi dan kemungkinan solusi. Dalam konteks ekonomi kreatif kain tenun di dua daerah ini, misalnya: a) upaya dapat dilakukan untuk perbaikan keseimbangan relasi gender antara perempuan dan laki-laki (khususnya di keluarga penenun dari kelas sosial bawah), b) perbaikan relasi dan hubungan agar lebih saling mendorong satu sama lain terutama antara para perempuan penenun dari kelas sosial bawah dengan para perempuan kelas menengah yang umumnya berada pada proses pemasaran kain tenun, dan c) serta perbaikan kebijakan pemerintah daerah yang lebih ramah terhadap suara dan hak perempuan penenun, dan tidak semata berorientasi pada motif ekonomi.

Melalui berbagai ulasan di bab ini, tulisan ini menyimpulkan adanya narasi perempuan yang sama dalam ekonomi kreatif kain tenun di Lombok Timur dan di Kota Kupang, yaitu pertama, menenun masih menjadi kegiatan sampingan; kedua, bahwa perempuan justru menghadapi tantangan “*triple*” beban; ketiga, harapan akan memperoleh kesejahteraan dari penjualan kain tenun belum tercapai. Rendahnya harga jual kain tenun yang tidak sebanding dengan tenaga dan ongkos produksi menyebabkan perempuan penenun tetap terjebak pada lingkaran kemiskinan. Keempat, narasi serupa lainnya adalah persoalan perbedaan kesejahteraan antara perempuan penenun kelas bawah dengan perempuan kelas menengah yang memasarkannya; dan

kelima, adanya kehadiran jaringan perempuan secara individu maupun kolektif dalam pemasaran kain tenun secara positif.

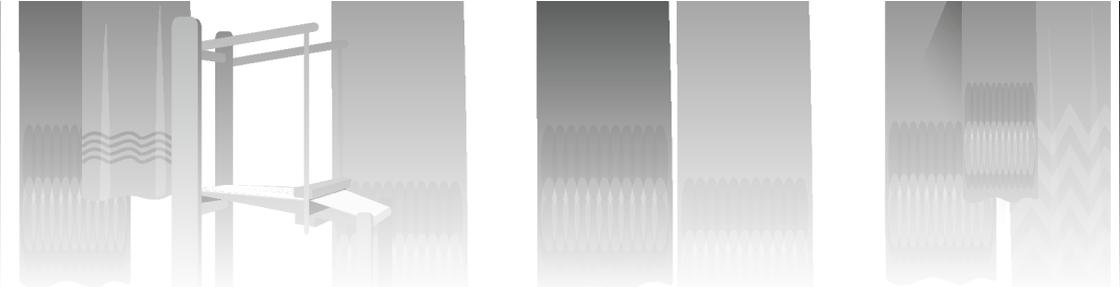
Para pembuat kebijakan harus berhati-hati dalam merumuskan formula pengembangan ekonomi kreatif kain tenun maupun berbagai produk olahannya untuk ekonomi kreatif berorientasi produksi massal, agar tidak lebih dalam menjerumuskan perempuan ke dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan. Perempuan penenun dalam ekonomi kreatif jangan sampai hanya menjadi objek dan tidak ditempatkan sebagai subjek dalam rencana pengembangannya. Pemenuhan hak-hak dan sistem pendukung yang baik bagi perempuan penenun (misalnya standar uang yang layak dan sistem pendukung untuk pengasuhan anak-anak) menjadi standar wajib yang harus dipenuhi dalam pembuatan kebijakan terkait. Upaya apa pun yang dilakukan seyogianya selalu mempertimbangkan upaya menciptakan relasi gender yang lebih baik bagi perempuan dan memberdayakan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA



- Connell, R. W. (2008). *Gender: A short introduction*. Polity Press.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Dewi, K. H. (2015). *Indonesian women and local politics: Islam, gender and networks in post-Suharto Indonesia*. NUS Press, Kyoto University Press.
- Dewi, K. H. (2023). The city, PKK leaders, and women's empowerment. *Asian Journal of Women's Studies*, 29(1), 121–135. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/12259276.2023.2170047>
- Eisenstein, H. (1984). *Contemporary feminist thought*. Unwin Paperbacks.
- Harding, S. (1987). The method question. *Hypatia*, 2(30). <http://www.jstor.org/stable/3810120>.

- Lykke, N. (2010). *Feminist studies a guide to intersectional theory, methodology and writing*. Routledge.
- Saptari, R. (2000). Networks of reproduction among cigarette factory women in East Java. Dalam J. Koning, M. Nolten, J. Rodenburg, & R. Saptari (Ed.), *Women and households in Indonesia: Cultural notions and social practices*. Routledge.
- Soetjipto, A. W., & Adelina, S. (2013). *Suara dari desa: Menuju revitalisasi PKK*. Marjin Kiri.



## BAB 6

# MENCARI ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KREATIF TENUN DI INDONESIA: ANTARA PELESTARIAN TRADISI DAN KOMERSIALISASI BUDAYA

*Longgina Novadona Bayo*

Tenun adalah identitas budaya dengan perempuan sebagai pemegang peran sentral dalam keseluruhan proses yang menghasilkan selembar kainnya. Hal ini menegaskan peran perempuan sebagai agensi kebudayaan—*heritage bearer* (Avanza, 2021). Terkait dengan fungsi perempuan tersebut, buku ini memberikan dua kontribusi dalam diskusi tentang tenun dan perempuan. Pertama, buku ini berupaya membaca situasi perempuan dalam pengembangan industri tenun dengan menganalisis lingkup kebijakan pemerintah dari lingkup meso (kebijakan di tingkat lokal dan nasional) hingga lingkup global (ASEAN). Kedua, buku ini secara gamblang ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya perempuan dapat mengambil ‘keuntungan’ dari pengembangan industri tenun, namun hal ini masih kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat.

---

©2023 L. N. Bayo  
Universitas Gadjah Mada, E-mail: novabayo@ugm.ac.id

Bayo, L. N. (2023). Mencari Arah Kebijakan Ekonomi Kreatif Tenun di Indonesia: Antara Pelestarian Tradisi dan Komersialisasi Budaya. Dalam P. R. N Rimbawati (Ed.), *Perempuan dan ekonomi kreatif tenun: Perspektif gender* (151–158). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.588.c674 E-ISBN: 978-623-8372-01-0

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Temuan utama dari buku ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan di level meso untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis tenun belum benar-benar menginsersikan perspektif gender yang secara serius memperhatikan *triple roles* (peran produksi, peran reproduksi, dan peran komunitas) perempuan. Kajian ini menemukan dua rasionalitas yang mendasari hal tersebut. Pertama, ragam kebijakan pemerintah daerah—khususnya di NTT dan NTB yang menjadi lokus kajian—masih berkuat mendesain kebijakan yang fokus pada peran produktif (*productive role*) dan bertujuan untuk preservasi budaya dan kurang memberikan aksentuasi kuat pada keseimbangan kebijakan yang melindungi perempuan dalam menjalankan peran reproduksi (*reproductive role*) dan peran komunitas (*community role*). Kedua, kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (NTT dan NTB) masih ambigu karena belum memberikan arah jelas pengembangan tenun: apakah pengembangan industri kreatif tenun tersebut lebih berorientasi pada pelestarian budaya, berfokus pada komersialisasi kain tenun, atau mengintegrasikan kedua logika tersebut?

Sejauh ini, berangkat dari pengamatan dan analisis penulis terhadap kebijakan pengembangan industri tenun di Indonesia—dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB dan Kota Kupang, Provinsi NTT—belum ada kejelasan logika yang mendasari arah pengembangan industri tenun di Indonesia. Jika pemerintah akan lebih mengutamakan logika preservasi budaya, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pelestarian budaya menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan dan menantang pemahaman statis tentang tradisi yang menyederhanakan praktik budaya yang kompleks. Terlalu kuat menempatkan tenun hanya sebagai pelestarian budaya berpotensi melanggengkan pemahaman pasif tentang tradisi dan gagal menjelaskan tuntutan budaya yang terus berubah. Sementara itu, jika kebijakan pemerintah lebih berpihak pada pemberdayaan tenun sebagai peningkatan ekonomi perempuan, pemerintah harus legawa jika dianggap menghilangkan praktik-praktik budaya yang spesifik dari menenun dan menempatkan tenun hanya sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Namun, hal positifnya adalah ada jaminan akan

keberlanjutan kelompok usaha atau organisasi karena memberikan insentif untuk partisipasi. Keluar dari ketegangan dua logika yang seolah bertabrakan tersebut, ada juga pengalaman negara-negara yang tidak memisahkan kedua tujuan atau logika itu dalam pengembangan industri tenun mereka, sebagaimana pengalaman di Peru (Del Solar, 2019) dan Bolivia (Van Etten, 2010).

Studi yang dilakukan Van Etten (2010) pada komunitas penenun di Cochabamba, Bolivia memperlihatkan bahwa konsep pelestarian justru mereduksi budaya menjadi sekadar daftar produk dan tradisi yang diobjektifkan. Akibatnya, representasi budaya dan esensialisasi identitas penenun berfungsi untuk menciptakan citra kelompok atau koperasi tenun yang seragam dan homogen yang dapat dengan mudah dipresentasikan ke dunia luar (Van Etten, 2010). Karenanya, kebijakan pengembangan industri tenun di Cochabamba, Bolivia mencoba untuk melampaui logika pelestarian budaya, yakni dengan menekankan pendekatan bahwa upaya pelestarian budaya (tenun) melalui pembentukan organisasi (kelompok tenun, koperasi tenun) adalah langkah strategis untuk mempertahankan eksistensi tenun karena berupaya untuk mengoneksikan masa lalu (tradisi/budaya) dengan masa depan. Mereka mengembangkan industri tenun dengan berpedoman pada prinsip bahwa upaya untuk “melestarikan” atau “menyelamatkan” budaya pembangunan industri tenun justru adalah upaya menciptakan dialog yang menyampaikan harapan mereka akan hubungan yang berkelanjutan dengan masa lalu yang dibawa ke masa depan (Van Etten, 2010).

Selain insentif kultural (nonmaterial) tersebut, para perempuan penenun di Bolivia juga mendapatkan manfaat ekonomi (material) secara individu dan insentif politik dari menenun. Dengan insentif ekonomi itu, mereka bisa meningkatkan peran dan partisipasinya dalam memerangi arus pekerja migran di daerah mereka karena mereka kemudian memiliki kemampuan untuk tetap tinggal menetap di desanya dan dekat dengan keluarga mereka sembari dapat terus melanjutkan tradisi menenun. Melalui pengorganisasi perempuan penenun di dalam komunitas untuk pemberdayaan ekonomi, para perempuan bukan hanya memperoleh kebanggaan tentang budaya

asal mereka dan insentif ekonomi, namun juga dapat mendorong kepemimpinan perempuan (Van Etten, 2010). Kelompok tenun pada perkembangannya menjadi salah satu ruang bagi perempuan untuk bersuara, tempat perempuan belajar mengungkapkan pendapat, berpartisipasi dalam ruang publik, mengorganisasi pertemuan, dan sejenisnya. Implikasinya, terjadi transformasi dalam pembagian kerja berbasis gender yang melampaui rumah tangga. Perempuan bukan lagi hanya fokus pada kerja-kerja domestik, namun mulai merambah ke ruang publik. Dengan kata lain, peningkatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan kelompok tenun secara tidak langsung telah mengintegrasikan suara perempuan ke dalam wacana lokal.

Selain Bolivia, pengembangan industri tenun di Peru pun mengilustrasikan pengembangan tenun yang mengintegrasikan logika preservasi budaya dan komersialisasi tenun. Di Peru, produksi kain tenun guna memenuhi konsumen baru (pasar) dapat hidup berdampingan dengan produksi kain tenun untuk kebutuhan kostum tradisional. Mereka menempatkan tenun tradisional bukan sebagai kerajinan konservatif, tetapi menciptakan inovasi kain tenun yang bukan hanya untuk memenuhi konsumen baru saja, melainkan juga dapat pula diterima kelompok tenun itu sendiri. Belajar dari komersialisasi tenun sebelumnya, Peru kemudian tidak memaksa para penenunnya untuk melakukan transformasi total produk yang mereka tawarkan ke pasar baru, tetapi justru mendorong penenun mempertahankan pola produksi yang sama dengan desain yang mereka terapkan pada pakaian tradisional mereka (Del Solar, 2019). Sebelumnya, sekitar tahun 1960-an, terjadi tekanan pasar wisata Cusco yang sangat menekankan gagasan diferensiasi motif tenun di masyarakat (keragaman produk) guna memperoleh pendapatan yang lebih banyak dan tujuan pembangunan yang lebih besar. Praktik ini tampaknya menyebabkan efek negatif bagi penenun sehingga mereka hanya akan mereplikasi desain kain tenun yang laku di pasaran atau pola tenun tradisional yang menarik perhatian.

Belajar dari pengalaman Peru dan Bolivia, jika pemerintah Indonesia ingin mendamaikan kedua logika tersebut—yakni pelestarian budaya dan komersialisasi budaya—kuncinya adalah

'integrasi kebijakan' yang dapat menjamin adanya inklusi ekonomi, sosial, dan dimensi pembangunan lingkungan (Del Solar, 2019). Artinya, kebijakan yang berwatak meningkatkan peran produksi perempuan perlu diimbangi dengan kebijakan yang melindungi peran reproduksi dan peran komunitas perempuan. Bukan hanya sebatas itu, integrasi kebijakan untuk konteks pengembangan tenun di Indonesia juga perlu diintegrasikan ke dalam skema besar kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Dengan kebijakan ini maka ekonomi kreatif tenun bukan hanya bertumpu pada beberapa dinas terkait saja, melainkan dapat disisipkan ke dalam kebijakan makro di level pemerintah daerah sehingga sedikit banyak mampu menjawab persoalan keterbatasan anggaran yang kerap menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis tenun.

Pengalaman Peru misalnya, memperlihatkan bahwa jika konteks di masyarakat atau negara yang bersangkutan masih terdapat ketimpangan gender yang serius, langkah pertama yang perlu diambil pemerintah adalah berupaya mencari pendekatan yang dapat menghubungkan *cultural heritage* dengan pasar kontemporer sebagai aset sehingga peningkatan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian identitas atau budaya asli (Del Solar, 2019). Guna mengoneksikan *cultural heritage* (menenun) dengan pasar kontemporer, pemerintah Peru terlebih dahulu mengambil kebijakan yang bertujuan menguatkan kembali identitas personal maupun identitas kolektif masyarakat melalui ragam intervensi pembangunan. Perlahan, mulai ada kesadaran dari perempuan desa sebagai penenun bahwa pekerjaan menenun yang mereka lakoni saat ini tidak hanya untuk menjaga warisan sejarah (warisan budaya), tetapi juga sebagai aset bagi peningkatan ekonomi mereka sendiri (Del Solar, 2019). Aset bagi komunitas yang dimaksud adalah struktur, teknik, dan desain tenun. Hampir serupa dengan pengalaman di Bolivia, pemberdayaan komunitas penenun di distrik di Peru juga menjelaskan adanya perubahan relasi gender di masyarakat. Setelah 10 tahun program pemberdayaan penenun perempuan di Peru berlangsung, perempuan dapat mengakses kepemimpinan di daerah. Menurut Del Solar (2019), ada sekitar 34% perempuan yang terlibat dalam program tersebut mendapatkan posisi atau memegang otoritas

dalam komunitasnya dan ada yang terpilih menduduki jabatan politik di lembaga legislatif daerah (kabupaten/distrik) mereka.

Dengan mempelajari bagaimana Peru dan Bolivia melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis tenun sembari preservasi budaya, kita menemukan bahwa budaya tidak dianggap sebagai barang dagangan (*merchandise*), namun sebagai prinsip yang dapat membantu menguraikan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inovatif (Del Solar, 2019). Ada kehati-hatian untuk tidak secara gegabah melakukan komodifikasi budaya (tenun). Meminjam Van Etten (2010, 108), komodifikasi budaya bisa berbahaya karena potensinya untuk melucuti artefak simbolis yang penting dari makna dan hubungan budayanya. Karena itu, pengembangan industri kreatif tenun di Indonesia pun perlu mempertimbangkan tendensi kanibalistik dari komodifikasi budaya (Jackson, 2002). Hemat penulis, setidaknya ada empat isu penting yang sangat urgen dipikirkan jika ingin melakukan komersialisasi tenun di Indonesia.

Pertama, isu relasi gender. Sentralnya peran perempuan dalam keseluruhan proses produksi tenun justru dapat menambah beban perempuan ketika tenun ingin dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar. Sejauh ini, perempuan masih dominan dalam memegang peran reproduksi, seperti merawat anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Jika beban domestik ini tidak berkurang dan pada saat yang bersamaan perempuan 'dipaksa' untuk bekerja menenun guna memenuhi permintaan pasar, tentu saja beban kerjanya menjadi berlipat ganda. Keseimbangan peran perempuan pada peran produksi, peran reproduksi, dan peran komunitas inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan industri kreatif tenun yang berperspektif gender.

Kedua, isu tentang orisinalitas (*property rights*). Hak kolektif guna melindungi kekayaan intelektual (motif atau desain tenun) masih sangat jarang menjadi persoalan serius yang dipikirkan pemerintah. Dalam kasus di Peru, para penenun pun kurang memiliki pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual tersebut dan tak jarang bertanya tentang bagaimana melindungi motif mereka dari pencurian oleh desainer tenun. Tentu saja tugas ini tidaklah mudah mengingat

pertukaran budaya yang meluas di wilayah tersebut dan tidak adanya perlindungan politik yang diberikan oleh negara Peru (Del Solar, 2019). Kasus senada tampaknya juga terjadi di Indonesia. Produk tenun Troso di Jepara misalnya, secara banal mencuri motif-motif dari NTT maupun NTB. Meskipun begitu, tidak ada langkah serius pemerintah daerah setempat untuk mempertanyakan ‘pencurian’ motif tersebut. Ke depan, penting untuk dipikirkan mendirikan sebuah pusat dokumentasi yang dapat menampung memori kain tenun daerah di setiap kabupaten/kota, sebagai cara untuk identifikasi desain dan sertifikasi pengetahuan asli. Hal ini dapat mendukung pengenalan elemen simbolik dan referensi dari masa lalu, dan memperkuat peran mereka dalam produksi kain tenun tradisional.

Ketiga, isu hak-hak pekerja perempuan. Masalah yang sulit untuk dipertimbangkan adalah beban kerja yang berlebihan karena perempuan penenun sudah memiliki beban tugas rumah tangga yang berat. Bagaimana meningkatkan kapasitas mereka untuk merundingkan peran gender baru adalah masalah yang perlu direspons oleh kebijakan. Keempat, isu degradasi lingkungan. Bersamaan dengan peningkatan permintaan pasar akan kain tenun dengan pewarnaan alami maka secara tidak langsung hal itu sebenarnya mendorong ekstraksi sembarangan beberapa spesies dari ekosistem wilayah setempat yang mungkin saja rapuh dan berisiko punah. Untuk menangkal tindakan ini diperlukan pengelolaan yang lebih rasional dan terkendali oleh masyarakat lokal karena mereka lebih tanggap terhadap aspek lingkungan dan teritorial (Del Solar, 2019).

Sebagai kesimpulan akhir, tidak dapat dimungkiri jika pengembangan industri kreatif tenun dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, perempuan memegang peranan sentral (agensi kebudayaan) dalam produksi kain tenun. Posisi perempuan dalam mentransmisikan budaya juga menempatkan mereka sebagai pencipta dan pemelihara budaya. Akibatnya, banyak komunitas memandang kepatuhan perempuan dan penyebaran norma-norma budaya sebagai hal yang penting untuk kelangsungan budaya tersebut. Menurut Silbaugh (1997, dalam Nugroho dkk., 2021) ketika ada penentangan terhadap pembayaran uang untuk pekerjaan tradisional yang dilakukan perempuan,

“kemungkinan besar ada garis gender dalam modifikasi juga”. Oleh sebab itu, ketika hendak mendesain kebijakan yang berorientasi pada pengembangan industri kreatif, pemerintah wajib mempertimbangkan relasi gender yang bekerja di masyarakat, termasuk ketika hendak melakukan transformasi relasi gender sebagai konsekuensi logis dari program-program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk kelompok tenun.

## DAFTAR PUSTAKA



- Avanza, G. (2021). The status of women weavers as heritage bearers: Accounts of social transformation and empowerment in the Province of Cuzco, Peru. *International Journal of Intangible Heritage*, (16), 78–88. DOI: 10.35638/ijih.2021..16.008
- Del Solar, M. E. (2019). Highland peasant weavers: Empowered women, heritage keepers and home providers. Incakunaq Ruwaynin Project, Cusco, Peru. *TEXTILE*, 17(2), 168–181. <https://doi.org/10.1080/14759756.2018.1474003>
- Jackson, P. (2002). Commercial cultures: Transcending the cultural and the economic. *Progress in Human Geography*, 26(1), 3–18.
- Nugroho, C., Nurhayati, I. K., Nasionalita, K., & Malau, R. M. U. (2021). Weaving and cultural identity of Batak Toba women. *Journal of Asian and African Studies*, 56(6), 1165–1177.
- Van Etten, S. (2010). Weaving development: Cultural preservation and economic improvement in Cochabamba, Bolivia. *Anthropology Honors Projects*, 6. [https://digitalcommons.maclester.edu/anth\\_honors/6](https://digitalcommons.maclester.edu/anth_honors/6)

## TENTANG EDITOR



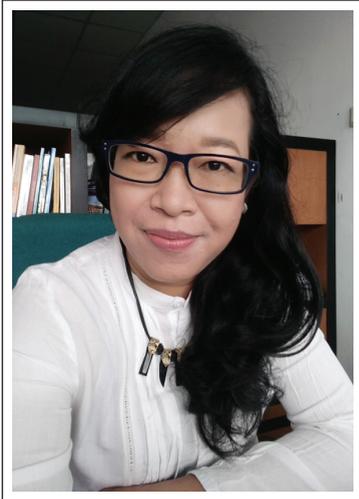
**Putri Rakhmadhani Nur Rimbawati** adalah Peneliti ASEAN Studies Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Memiliki *passion* dalam bidang komunikasi dan gender, hak-hak asasi perempuan dan anak, komunikasi kesehatan, serta media baru di Indonesia dan Asia Tenggara. Bidang lain yang menjadi kualifikasinya adalah *news anchor* dan presenter televisi di sebuah stasiun televisi grup Jawa Pos. Selain

itu, Putri juga seorang praktisi media dan komunikasi dengan latar belakang pendidikan doctoral yang berfokus pada *New Media Studies*, School of Media and Communication, Shanghai Jiao Tong University, Tiongkok. Surel: [putrirakhmadhani@gmail.com](mailto:putrirakhmadhani@gmail.com).



Buku ini tidak diperjualbelikan.

## TENTANG PENULIS



**Agustina Kustulasari** adalah staf pengajar dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM. Ia juga merupakan *research fellow* di the ASEAN Studies Center. Minat kajiannya adalah kebijakan pendidikan, *collaborative governance*, dan gender. Saat ini ia tengah menempuh pendidikan doktoral di bidang Educational Policy and Leadership di University at Albany-State University of New York, Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright-DIKTI. Ia mendapatkan gelar Master di bidang

yang sama dari The Ohio State University. Semenjak bergabung di FISIPOL, ia telah melakukan riset yang relevan dengan minat kajiannya, seperti *gender responsive policy* yang tertuang dalam buku ini, pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dan pengungsi anak. Alamat surel: [a.kustulasari@ugm.ac.id](mailto:a.kustulasari@ugm.ac.id).



**Longgina Novadona Bayo** adalah staf pengajar dan peneliti di Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM. Ia menyelesaikan studi S-1 di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, dan menuntaskan gelar Master di program Human Right and Democracy in Southeast Asia (HARD SEA) Pascasarjana Ilmu Politik Fisipol UGM-National University of Singapore. Saat ini dia sedang menyelesaikan studi doktoralnya di University of Melbourne, Australia dengan konsentrasi *Anthropology and*

*Development Studies*. Riset yang digeluti fokus pada studi demokrasi dan politik lokal, gender dan politik, pemberdayaan perempuan, politik dan pemerintahan desa, serta studi pembangunan dan masyarakat adat. Ia menulis beberapa artikel baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional dan juga editor sekaligus kontributor buku bertajuk *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Surel: novabayo@ugm.ac.id.



**Kurniawati Hastuti Dewi** adalah peneliti senior di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) [dahulu bernama Pusat Penelitian Politik-LIPI] dengan kepakaran di bidang gender dan politik; politik dan pemerintahan. Dewi adalah pendiri dan koordinator tim Gender dan Politik di Pusat Riset Politik BRIN. Dewi merupakan Sekretaris Jenderal Asian Association of Women's Studies (AAWS) 2020–2022. Dewi meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (*cumlaude*) dari Universitas Diponegoro (2000), Master di

bidang Studi Asia Tenggara (spesialisasi gender di Asia Tenggara) dengan predikat *First Class Honours* diperoleh dari Australian National University (2007). Dewi meraih gelar Doktor bidang Area Studies dari Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS) Kyoto University Jepang (2012) dengan disertasinya diterbitkan menjadi buku berjudul: *Indonesia Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post-Suharto Indonesia* (National University of Singapore Press & Kyoto University Press, 2015). Publikasi kunci: Kurniawati Hastuti Dewi (ed), *Gender and Politics in Post-Reformasi Indonesia: Women Leaders within Local Oligarchy Networks* (Springer, 2022); Kurniawati Hastuti Dewi, "Motherhood Identity in the 2019 Indonesian Presidential Elections: Populism and Political Division in the National Women's Movement", *Contemporary Southeast Asia* 42, no. 2 (August 2020): 224–50; Kurniawati Hastuti Dewi, "Indonesia: Local Advocacy for Suffrage" in *The Palgrave Handbook of Women's Political Rights*, Franceschet, Susan, Krook, Mona Lena, Tan, Netina (eds.) (Palgrave Macmillan, 2018). Karya lainnya dapat ditemukan di *Southeast Asian Studies*, *Asian Journal of Women's Studies*, *Asian Studies Review*, *SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, *Asian Women*, *Indonesian Feminist Journal*. Surel: kurn008@brin.go.id.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

# INDEKS

## A

- absen 7, 102
- adat budaya 71
- adat istiadat 19, 121, 142
- Adonara Barat 97
- Adonara Timur 97
- advokasi 51, 83
- agen ekonomi 88
- agensi budaya 92
- agensi kebudayaan 91, 151, 157
- agro industri 62
- ajaib 15
- akses 21, 24, 25, 27, 47, 48, 52, 65, 68, 77, 84, 85, 101, 105, 108, 109, 110, 115
- akses organisasi 84
- aksesori 17, 59, 145
- aktivitas ekonomi 21, 35, 146, 147
- aktor regional 49
- alat manual 70
- alat pengangkutan 62
- alat produksi 27
- alat tenun 69, 76, 111, 125
- Alat Tenun Bukan Mesin 70, 123
- alat tenun tradisional 69, 76
- alat tradisional 61
- alokasi 21, 25, 46, 67, 68, 86
- alokasi waktu 68
- Alor Barat Daya 97
- Alor Barat Laut 97
- Alor Selatan 97
- Alor Timur 97
- analisis berbasis gender 20, 21, 28, 29, 76
- analisis gender 9, 20, 22, 26, 28, 72, 104
- analisis kebijakan 28, 45, 80, 119
- Analisis Moser 20
- Anglo-Amerika 11
- Anti-kemiskinan 84
- antusiasme 59
- apresiasi seni 61
- Arsitek 10
- arsitektur 14, 16, 18
- Artisan 10
- artistik 10, 11, 13, 18, 94
- art shop* 86, 87, 128

- ASEAN 1, 2, 4, 9, 28, 29, 35, 36, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59,  
88, 117, 151, 173, 175
- ASEAN Studies Center 57, 58, 59,  
173, 175
- asosiasi 7, 38, 57
- Asosiasi Pendamping Perempuan  
Usaha Kecil Mikro 7, 39, 58
- asosiasi pengusaha kecil 64
- aspek akademis 16
- aspek manajemen 11
- aspek psikologi 11
- aspirasi 74, 83, 108, 114
- asset* 62, 64
- ATBM 70, 71, 76, 123
- B**
- Ba'a 98
- background* 53, 144
- bahan alami 58
- bahan baku 7, 61, 108
- bahan katun 70
- bahan tenun 58
- Bajawa 96
- bakat 5, 11, 12, 14, 18
- bakau 58
- Balohing 97
- Balohing Tanapi 97
- bambu 42, 60
- bangsawan 92, 93
- barang antik 5, 11
- barang seni 40
- basic needs* 131
- batik 7, 40, 41, 42, 58, 59
- Batulolong 97
- beban kerja 21, 26, 72, 110, 116,  
157
- Belah Ketupat 97
- Bele Kale 96
- belis 92
- benang 7, 41, 58, 69, 70, 71, 76, 79,  
111, 126, 129, 137, 140, 147
- benang emas 70
- benang filamen artifisial 41
- benang tekstur 41
- berperspektif gender 9, 40, 44, 92,  
116, 120
- bias gender 72
- Biboki 98
- bidang ekonomi 12, 67
- Bilba 98
- biologis 51
- bisnis 2, 14, 19, 57, 60, 61, 89, 142
- bisnis kecil 60
- bisnis utama 60
- Blueprint* Masyarakat Ekonomi  
ASEAN 28
- Bokai 98
- bordir 40
- bottom-up* 28
- buatan 60
- budaya 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19,  
20, 24, 27, 28, 29, 35, 36, 37,  
40, 42, 49, 52, 57, 58, 60, 61,  
69, 71, 91, 92, 93, 94, 95, 99,  
100, 106, 121, 129, 131, 141,  
142, 151, 152, 153, 154, 155,  
156, 157
- budaya lokal 57, 58, 61, 69, 71
- C**
- cabang industri 62
- campur tangan 59, 72
- cara hidup 71
- cara pandang 72
- Cibal 95

ciri khas 42, 58, 59, 140  
*community-managing activities* 107  
*community politics* 107, 108  
*community role* 152  
corak 95  
corak kain tenun 95  
*Corporate Social Responsibility* 140  
Covid-19 49  
*cultural democracy* 12  
*cultural goods and services* 15  
*cultural heritage* 155  
*cultural industry* 12

## D

dalam negeri 59  
dampak positif 58, 139  
dampak sosial 21, 75, 76  
Dasawisma 135  
daya cipta 14, 87  
daya cipta individu 14  
daya kreasi 14  
daya saing 3, 58  
daya tarik 119  
daya tawar 43, 82  
debitur 82  
*decision-making within the household* 23, 72  
deforestasi 4  
degradasi 157  
dekade 2, 3, 81  
Dela 98  
*delete* 77  
Demo Pagong 97  
Dengka 98  
desain 6, 10, 14, 17, 18, 60, 87, 91,  
140, 144, 154, 155, 156, 157

Desainer 57, 59, 142, 156  
Desainer Grafis 10  
Desainer Interior 10  
desain fesyen 6, 10, 60  
desain grafis 17  
desain kebijakan 91  
desain tradisional 6  
desa percontohan 65  
Desa Pringgasela 65, 67, 68, 69, 70,  
71, 123, 124  
desa wisata 69  
diferensiasi 154  
*digital banking* 66  
Diken Belen 97  
dimensi 121, 133, 154  
dinamika 24, 91, 124, 132, 134  
dinamika gender 91  
dinamis 1, 71  
Dinas Koperasi dan UKM 64, 111  
*disaggregating control of resources*  
23, 72  
diskriminasi 46, 80, 116, 148  
diskursus 7  
diskusi 37, 40, 49, 51, 122, 151  
disrupsi 49  
*distinguishing between different  
aims in interventions* 23, 72  
distribusi 10, 11, 16, 17, 28, 60  
distribusi pendapatan 28  
domain domestik 107  
domain perempuan 72  
domestik 4, 27, 67, 68, 105, 107,  
129, 138, 146, 147, 154, 156  
dominasi 6, 104, 114  
*double* 128  
dua peran 7, 67  
dunia fesyen 58  
dutawan 74

## E

eceran 16  
efisiensi 101  
ekonomi berbasis kreatif 70  
ekonomi global 2, 3  
ekonomi kreatif 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 19, 20, 28, 29, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 81, 82, 83, 86, 87, 91, 92, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 138, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 155  
ekonomi kreatif tenun 1, 19, 29, 36, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 60, 61, 68, 71, 72, 81, 82, 83, 86, 87, 92, 108, 116, 123, 138, 155  
ekonomi perempuan 9, 21, 88, 95, 101, 152, 154, 155  
eksploitasi 10, 14, 18, 25, 60  
eksploitasi karya 10, 60  
ekspor 4, 36, 66, 71  
ekspresi seni 134  
ekstraksi 157  
ekuitas 84  
elektronik 16  
*elite capture* 113  
emansipasi perempuan 84  
emisi karbon 4  
emosional 11  
*empowerment* 22, 84, 116  
energi terbarukan 4  
*equality* 22, 84  
*equity* 22, 84, 105  
*equity approach* 105  
*e-shop* 66  
estetika 11, 57, 94

etnis 21, 35, 76  
etnisitas 148  
evaluasi 40, 69  
*evidence-based policy* 21, 76

## F

faktor ekonomi 68  
faktor pinjaman 82  
faktor utama 68  
*feminist research methodology* 120  
Festival 10  
fesyen 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 20, 58, 59, 60, 140  
film 10, 17, 19, 60  
film & video 5  
*Focus Group Discussion* 57, 58, 122  
forum 39, 74, 83, 86, 87, 101, 110, 112, 113, 114, 115  
Forum Pengembangan Ekonomi Lokal 74  
forum perencanaan 39, 86, 87, 110, 112, 115  
forum perencanaan pembangunan 86, 112  
Fotografer 10  
*framework* 21, 22, 28, 51, 53, 116  
*fresh engine* 4  
fundamental 108  
fungsi budaya 92  
fungsi identitas budaya 93  
fungsional 71  
fungsi penanda kelas 93

## G

Gajah 96, 97  
gaji rendah 67

gangguan pasokan 81  
garis kemiskinan 38  
garis keturunan 71  
Gebitir Keti Limi Geweng 97  
gedogan 61  
gelang 59  
gender 1, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37,  
39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 51,  
53, 54, 55, 72, 73, 76, 80, 84,  
88, 89, 91, 92, 101, 104, 105,  
106, 116, 117, 119, 120, 121,  
122, 124, 126, 127, 128, 138,  
139, 146, 147, 148, 149, 151,  
153, 155, 156, 157, 173, 175,  
176, 177  
*gender and development* 22, 37  
*gender-aware organizations* 23, 73  
*gender-blind* 45, 46  
*gender-blind policy* 45  
*Gender Budget Statement* 101  
*gender-informed* 45  
*Gendering Global Governance* 28,  
31  
*gender needs assessment* 22, 72  
*gender-neutrality* 21, 76  
*gender-neutral policy* 45  
*gender planning* 22, 27, 104  
*gender relations* 120  
*gender-responsive* 32, 45, 48, 55, 89  
*gender responsive framework* 51  
*gender-responsive policy* 45  
*Gender Roles Framework* 21  
*gender roles identification* 22, 72  
*gender-sensitive* 45, 46  
*gender-specific* 45  
*gender-transformative* 45, 47  
*gender-unequal* 45, 46  
generasi 14, 19, 72

geografis 39  
global 1, 2, 3, 4, 28, 59, 117, 151  
globalisasi 13  
*global warming* 4  
*grass-roots* 113

## H

hak istimewa 6, 37  
Hak Kekayaan Intelektual 18  
hak kolektif 156  
hak legal 25  
hak perempuan 77, 119, 148  
*Harvard Analytical Framework* 20,  
21  
hasil hutan 62  
hasil olahan 141  
hasil tenun 76, 112  
hasrat 5, 117  
*heritage bearer* 94, 151  
hiburan 10, 11, 16, 17  
hiburan interaktif 5  
hierarki 22  
historis 39  
*horizontal learning* 9  
hukum 9, 25, 28, 31, 54, 89, 99

## I

ibu rumah tangga 68, 124, 125, 127,  
128, 129, 130, 132, 137, 143,  
146, 147  
identitas 7, 17, 29, 35, 71, 91, 92, 93,  
94, 95, 106, 151, 153, 155  
identitas budaya 92, 93, 94, 106,  
151  
identitas kolektif 155  
identitas kultural 7, 91

- identitas sosial 71
- identitas sosial dan kultural 71
- Ikan Pari 97
- ikatan kekerabatan keluarga 67
- Ikat Biboki 98
- ikat kepala 59
- ikon budaya 35
- Ile Boleng 97
- Ilebura 97
- ilmu pengetahuan 16, 69, 71
- ilustrasi 124, 127
- imajinasi 18
- impor 36, 41
- impor tekstil 41, 54
- indigenous designs* 7
- indigenous people* 94
- indikator 62
- individualisme 12
- individuals and groups act* 120
- Indonesia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 35, 38, 42, 48, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 65, 66, 69, 75, 78, 82, 88, 89, 149, 152, 154, 156, 173, 176, 177
- industri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 63, 68, 77, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 106, 108, 111, 117, 123, 129, 130, 141, 151, 152, 153, 154, 156, 157
- industrialisasi 91, 107
- industri berbasis budaya 91
- industri budaya 9, 12, 15, 16
- industri kain tenun 42, 44, 94, 101
- industri kecil 7, 9, 42, 44, 63, 95, 101
- industri kerajinan anyaman bambu dan daun lontar 42
- industri kerajinan gerabah 42
- industri kerajinan sabut kelapa 42
- industri konveksi 42
- industri kreatif 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 28, 49, 50, 51, 60, 91, 92, 94, 100, 101, 102, 141, 152, 156, 157
- industri kreatif tenun 8, 9, 91, 92, 94, 100, 101, 102, 152, 156, 157
- industri manufaktur 13
- industri pandai besi 42
- industri rumah tangga 129
- influencing factors* 21
- informal 35
- infrastruktur 51, 86, 114
- inisiatif 83, 87
- inklusi ekonomi 154
- inklusif 88, 175
- inovasi 13, 19, 20, 59, 60, 72, 154
- Insana 98
- insani 4
- insentif 9, 36, 61, 152, 153
- insentif fiskal 61
- insentif kultural 153
- institusi 26, 82
- instrumen 4
- intangible* 15, 93
- integrasi 1, 18, 28, 154
- integrasi kebijakan 154
- intelektual 10, 11, 14, 16, 60, 156
- intelektualitas 4
- intensif 78
- Intensifikasi 94
- inter-household networks* 138
- internasional 3, 59, 60, 69, 83, 91, 140, 176

- interpretasi 51, 52  
*intersectionality* 148  
 interseksionalitas 147, 148  
 intersektoral 84, 105, 110  
 intervensi 23, 24, 26, 27, 72, 83, 84,  
 104, 105, 106, 109, 110, 116,  
 155  
 investasi 7, 88  
*invited space* 115, 116  
*involving women* 23, 73
- J**
- jaringan perempuan 29, 135, 138,  
 139, 145, 148  
 Jaringan Perempuan Usaha Kreatif  
 39  
 Jarpuk 39, 145  
 jasa domestik 67  
 jasa komputer 5  
 jasa kreatif 4, 5  
 jejaring 66  
 jejaring usaha 66  
 jenis ekonomi kreatif 20, 60  
 jenis kelamin 25, 46  
 jumlah UKM 62, 63, 64
- K**
- kabupaten 9, 29, 38, 41, 42, 44, 62,  
 74, 75, 86, 88, 95, 99, 100,  
 101, 113, 130, 142, 155, 157  
 Kabupaten Alor 97  
 Kabupaten Ende 96  
 Kabupaten Flores Timur 97  
 Kabupaten Lombok Timur 28, 29,  
 37, 38, 42, 43, 59, 61, 62, 63,  
 64, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75,  
 76, 77, 83, 86, 87, 88, 119,  
 121, 123, 128, 140, 141, 146,  
 152  
 Kabupaten Manggarai 95  
 Kabupaten Ngada 96  
 Kabupaten Rote Ndao 98  
 Kabupaten Sumba Barat 98  
 Kabupaten Timor Tengah Utara 98  
 kader 87  
 kain batik 59  
 kain songket 70  
 kain tenun 6, 7, 26, 35, 40, 41, 42,  
 44, 57, 58, 59, 69, 70, 72, 77,  
 79, 91, 92, 93, 94, 95, 101,  
 109, 111, 119, 120, 121, 122,  
 123, 124, 126, 127, 128, 129,  
 130, 131, 137, 139, 140, 141,  
 142, 143, 144, 145, 146, 147,  
 148, 152, 154, 157  
 kain tenunan 41  
 kain tenun ikat 7, 69, 70, 130  
 kain tenun Pringgasele 69  
 kampanye 16, 48  
 kanibalistik 156  
 kanker serviks 78  
 kapasitas 45, 65, 75, 81, 82, 87, 108,  
 113, 144, 145, 157  
 kapitalisasi 7  
 kapitalisme 106, 117, 122  
 karya tenun 6, 36  
 kasus kekerasan 81  
 kaum suami 72  
 kayu 17, 58, 60, 133  
 keadilan gender 26  
 keanekaragaman 61  
 kearifan 20, 28, 57, 61, 69, 93, 121,  
 144  
 kearifan budaya lokal 57, 61  
 kearifan lokal 20, 28, 69, 93, 121,  
 144

- kebijakan 8, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 72, 76, 80, 81, 82, 84, 91, 94, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 116, 119, 120, 131, 141, 142, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 175
- Kebijakan Ekonomi Kreatif Kain Tenun 99
- kebijakan gender 22, 27
- kebijakan lokal 28, 48
- kebijakan pemerintah lokal 57
- kebutuhan dasar 78
- kebutuhan gender 24, 25, 105
- kebutuhan praktis 22, 24, 25, 26, 37, 39, 72, 104, 105
- kebutuhan praktis gender 105
- kebutuhan praktis-strategis gender 39
- kebutuhan strategis gender 105
- kecamatan 62, 101, 113, 140
- Kecamatan Pringgasela 69
- kegelisahan 9
- Kegiatan PUG 80
- kegiatan rutin 73
- kegiatan sampingan 73, 132, 137, 146, 148
- Keka 98
- kekerasan 25, 81, 101, 148
- kekerasan laki-laki 81
- kekuasaan 25, 47, 113, 120
- kelas bawah 67, 139, 145, 146, 147, 148
- kelas menengah 113, 139, 146, 147, 148
- kelas sosial 92, 121, 139, 145, 147, 148
- keleluasaan 68, 112, 113
- Kelisin 97
- kelompok dampingan 39
- kelompok gender 21, 45, 48, 76
- kelompok penenun formal 102
- keluarga 6, 19, 26, 27, 35, 36, 37, 49, 67, 68, 71, 73, 74, 78, 80, 85, 87, 88, 93, 105, 116, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 146, 147, 148, 153
- keluarga miskin 67
- Kelurahan Ramah Anak 100
- kemajuan teknologi informasi 66
- kemasyarakatan 24, 26, 27
- Ken Alona 97
- Keniren Keroko 97
- kepastian hukum 9, 99
- kepatuhan 69, 157
- kepentingan perempuan 45, 85, 87
- kepercayaan 113
- keputusan 23, 25, 26, 27, 48, 72, 75, 104, 105, 112, 113, 115
- kerajinan 4, 7, 14, 17, 40, 42, 60, 61, 66, 69, 73, 87, 93, 95, 99, 109, 124, 141, 144, 154
- kerajinan Cukli 66
- kerajinan tangan 61, 141
- kerajinan tenun 7, 60, 61, 66, 87, 93, 95, 99
- kerangka analisis 20, 22, 28, 48, 120
- kerja sama 28, 64, 111, 130, 142, 143, 145
- kesadaran gender 26, 46, 48, 116, 117
- kesediaan 113
- Kesehatan Ibu dan Anak 44, 100, 101
- kesehatan reproduksi 43

kesejahteraan 14, 18, 19, 65, 67, 78,  
     84, 87, 88, 99, 105, 111, 112,  
     122, 123, 148  
 kesejahteraan keluarga 67, 87, 88  
 kesetaraan 22, 24, 25, 26, 47, 88,  
     105, 114  
 kesetaraan gender 24, 47, 88, 105  
 keterampilan 14, 18, 19, 27, 28, 36,  
     45, 68, 81, 87, 94, 146  
 keterampilan administrasi 81  
 keterampilan 9, 99  
 keterbatasan sumber daya 108  
 ketidakberdayaan 19, 149  
 Ketupat 97, 98  
 keuntungan 13, 60, 82, 140, 151  
 kimia 62, 133  
*kin-based networks* 138  
 klasifikasi 7, 45, 62, 63, 64  
 klaster 40, 41, 65, 89  
 klaster tenun 65  
 Koki 10  
 kolaborasi 75  
 kolektif 143, 145, 147, 148, 155, 156  
 kolektivisme 12  
 kolektor 82, 83  
 Kolon Matan 97  
 komersial 29  
 komersialisasi 14, 95, 152, 154  
 komersialisasi budaya 154  
 komitmen 9, 83, 99, 100, 101, 119,  
     132, 133  
 komodifikasi 156  
 komoditas 7, 71, 122, 146  
 komoditas pasar 71  
 komoditi 27  
 komparatif 39  
 kompeten 82  
 kompetisi 4, 52  
 kompleksitas 148  
 Komposer 10  
 komunitas 1, 6, 19, 24, 26, 37, 41,  
     42, 93, 95, 107, 112, 120,  
     151, 152, 153, 154, 155, 156,  
     157  
 kondisi pasar 27  
 kondisi politik 28  
 kondusif 4  
 koneksi internet 51  
 konsekuensi 94, 157  
 konservatif 154  
 konsisten 69  
 konsistensi 65  
 konstruksi 9, 17, 28  
 konstruksi gender 28  
 konsultatif 45, 106, 110, 115  
 konsumen 59, 154  
 konsumen baru 154  
 konsumsi barang dan jasa 10, 11  
 konteks 4, 6, 7, 24, 28, 35, 37, 39,  
     49, 51, 93, 94, 95, 106, 115,  
     116, 117, 120, 122, 139, 141,  
     145, 146, 147, 148, 154, 155  
 kontekstualisasi 29  
 kontribusi 2, 3, 4, 5, 9, 15, 62, 151  
 kontrol 21, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 72,  
     104, 105, 110, 115, 121  
 konvensional 13, 122, 126, 127, 131  
 koordinasi 64, 111, 112  
 operasi 41, 74, 75, 83, 84, 85, 105,  
     108, 110, 111, 130, 132, 134,  
     153  
 operasi perempuan 74  
 Korbafo 98  
 korelasi 22  
 Kota Kupang 8, 37, 38, 43, 44, 54,  
     91, 92, 99, 100, 101, 102,  
     103, 104, 106, 110, 111, 112,  
     113, 115, 116, 118, 119, 121,

- 129, 130, 131, 132, 133, 134,  
135, 136, 137, 138, 139, 141,  
142, 144, 145, 146, 148, 152
- Kota Waikabubak 98
- kreasi 10, 14, 16, 17, 18, 60
- kreativitas 11, 14, 16, 18, 19, 20, 36,  
59, 60, 61, 69, 87
- kredit 25, 27, 65
- krisis 49
- kualitas 19, 57, 64, 66, 111, 131
- kuantitas 66, 111
- kuasa kewargaan 115
- KUBE 112
- Kuda Pasola 98
- Kui (Nawon Akan) 97
- Kui Suku Kapitan 97
- kuliner 4, 60
- kulit 41, 58, 60, 133
- kulit kayu banten 58
- kultural 6, 7, 10, 11, 35, 71, 91, 106,  
112, 116, 153
- kunyah 58
- L**
- laki-laki 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 36, 37, 38, 43, 45, 46,  
47, 72, 76, 77, 83, 104, 105,  
106, 107, 114, 116, 117, 121,  
122, 123, 127, 128, 137, 138,  
147, 148
- laki-laki dan perempuan 21, 24, 25,  
27, 37, 76, 116, 117
- Lakin Puhun 97
- Lako Dowa 97
- lambang 58, 69
- lambang cinta 69
- Landu 98
- lapangan kerja 12, 14, 65
- lapangan pekerjaan 19, 87
- Larantuka 97
- Lawo Biri-Pisa 96
- Lawo Butu 96
- Lawo Gami Tera Esa 96
- Lawo Jara 96
- Lawo Jara Nggaja 96
- Lawo Keli Mara 96
- Lawo Mangga 96
- Lawo Manu 96
- Lawo Mata Anggo 96
- Lawo Mata Sinde 96
- Lawo Nepa Mite 96
- Lawo Nepa Te'a 96
- Lawo One Mesa 96
- Lawo Pea Kanga 96
- Lawo Pundi 96
- Lawo Soke 96
- Lawo Soke Mata Loo 96
- Lawo Soke Mata Ria 96
- layanan kreatif 10, 60
- leader* 87
- leading sector* 110
- legenda daerah 93
- Lekota 98
- Lelenuk 98
- Lembor 95
- lensa 148
- level mikro 21
- level of recognition of women's issue*  
22
- levels of equality* 22
- Lewolema 97
- linear 22
- linen 41
- lintas sektor 16, 91, 110, 112
- lintas usia 73
- Lio 96
- literasi 52

logam 62  
 logika 152, 153, 154  
 lokal 7, 9, 20, 28, 39, 48, 57, 58, 59,  
 61, 69, 71, 72, 81, 83, 93, 95,  
 101, 119, 121, 144, 145, 151,  
 154, 157, 176  
 Lole 98  
 Lombok Utara 75  
*Longwe's Women Empowerment  
 Work* 21, 22  
 LPSDM 8, 74, 75, 86, 127, 128  
 luar negeri 44, 67, 69, 142  
 Lurik 97

**M**

Mafauf 98  
*main income* 131  
 makro 35, 155  
 Mamoli 98  
 manajemen kepemimpinan 81  
 manajemen usaha 68  
 mancanegara 66, 71  
 manual 35, 70  
 marginal 52, 75  
 marginalitas 48  
 masif 81, 108  
 maskulin 72  
 maskulinitas 148  
*mass production* 117  
 Masyarakat Ekonomi ASEAN  
 (MEA) 1, 4, 35, 117  
 Mataru 97  
 material 7, 16, 18, 153  
 mati suri 66  
 Mau Behi 97  
 mayoritas 36, 48, 52, 58, 67, 68, 73,  
 124  
 Mberhe Arhe 96  
 MEA 1, 2, 4, 35, 36, 39, 117, 122,  
 130, 146  
 media 13, 16, 27, 54, 61, 66, 118,  
 173  
 media informasi 27  
 media sosial 61  
 media transaksi 66  
 mekanisme 4, 15, 115  
 memintal benang 69  
 mengikat benang 69  
 menopang perekonomian 68, 73,  
 99  
*merchandise* 155  
 mesin 11  
 mesin ekonomi kreatif 11  
 metafora 94  
 minat 35, 58, 59, 82, 175  
*mindset* 66  
 Miomafo 98  
 mitra 65  
 mobilitas sosial 93  
 modal 27, 36, 51, 61, 68, 75, 82,  
 108, 109, 110, 111, 112, 114,  
 127, 128, 134, 147  
 modal dasar 68  
 model 27, 83  
 modern 12, 29, 36, 59, 60, 111, 130,  
 131  
 modifikasi 134, 157  
 Moser 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
 28, 31, 37, 48, 54, 72, 88, 91,  
 104, 116, 118, 119, 120  
*Moser Gender Planning* 20, 21, 22,  
 37, 119  
*Moser Gender Planning Framework*  
 20, 21, 22, 119  
 motif 35, 41, 43, 44, 58, 69, 70, 71,  
 92, 93, 94, 95, 99, 107, 134,  
 145, 148, 154, 156

motif batik 41  
motif bolak-balik 71  
motif tradisional 94  
Mowah Ina 97  
multilateral 51  
museum 10  
musik 12, 14, 17  
Musikus 10  
musiman 68  
Musrenbang 74, 75, 84, 87, 101,  
112, 113, 114, 115  
Musrenbang Perempuan 74, 75

## N

nalar budaya 94  
nalar ekonomi 94  
Nangapanda 96  
narasi 29, 93, 95, 120, 121, 139, 148  
narasi perempuan 93, 95, 120, 121,  
139, 148  
narasi perempuan penenun 139  
Ndao 98, 102  
Ndona 96  
negosiasi 94  
netral gender 45  
Nigen Belen 97  
nilai budaya 6, 15, 16, 19, 94  
nilai ekonomis 60  
nilai estetika 57, 94  
nilai individu dan masyarakat 28  
nilai jual 60, 66  
nilai jual produk 66  
nilai kearifan budaya lokal 57  
nilai kontinuitas 71  
nilai lokal 93  
nilai publik 52  
nilai tambah 3, 4, 5, 6, 16, 58, 62,  
69, 129

nilai tambah produksi 62  
nilai tradisional 19  
Nilung Sisa Matang 97  
Niwan 97  
non-artistik 18  
non fiskal 61  
*Non-Governmental Organization* 8  
*non-renewable* 61  
non tunai 66  
norma 28, 46, 47, 157  
Nusak Ba'a 98  
Nusak Bilba 98  
Nusak Bokai 98  
Nusak Dela 98  
Nusak Dengka 98  
Nusak Diu 98  
Nusak Keka 98  
Nusak Korbafo 98  
Nusak Landu 98  
Nusak Lelenuk 98  
Nusak Lole 98  
Nusak Ndao 98  
Nusak Oenale 98  
Nusak Renggo 98  
Nusak Talae 98  
Nusak Termanu 98  
Nusak Thie 98  
Nusa Tenggara Barat 7, 8, 28, 31,  
35, 36, 38, 42, 59, 60, 65, 66,  
67, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 83,  
85, 86, 88, 89, 119, 123

## O

observasi 52, 122  
Oenale 98  
Onelako & Kota Ende 96  
optimal 64, 113

- organisasi 23, 26, 51, 73, 83, 84, 85,  
86, 93, 106, 107, 108, 139,  
152, 153
- P**
- pagelaran 10  
pameran 83, 140, 143  
pandemik 49  
panggung 17  
Pantar Barat 97  
*pap smear* 77, 78, 84  
paradoks 36  
para lelaki 70  
pariwisata 60, 65, 83, 119, 129, 131,  
141  
pariwisata alam 119  
partisipan 23  
partisipasi 12, 23, 36, 49, 64, 73, 85,  
108, 113, 115, 116, 152  
partisipasi perempuan 23, 49, 73,  
85, 115  
partisipasi publik 115  
pasar 3, 7, 11, 16, 17, 18, 27, 59, 60,  
65, 67, 69, 71, 81, 94, 106,  
109, 116, 117, 134, 142, 145,  
154, 155, 156, 157  
Pasar Barang Seni 17  
pasar lokal 69  
pasar ritel modern 60  
Pasar Seni 5  
*pattern* 95  
pekerjaan perempuan 72  
pekerjaan rumah tangga 68, 124,  
125, 127, 138, 156  
pekerjaan sampingan 78, 124, 127,  
132  
pekerjaan utama 78, 128  
pekerja migran 101, 153  
pekerja tenun 6, 36  
pelaku bisnis 19, 61  
pelaku ekonomi kreatif 61, 147  
pelaku usaha 19, 59, 84, 85  
Pelaku Usaha Kecil Menengah 65  
pelatihan 27, 28, 65, 80, 81, 82, 85,  
87, 101, 111, 130, 132  
pelayanan konseling 75  
pelestarian 9, 29, 99, 152, 153, 154,  
155  
pelestarian budaya 29, 99, 152, 153,  
154  
pelibatan perempuan 112, 113, 115  
peluang 4, 19, 27, 39, 57, 108  
Pelukis 10  
pemasaran 27, 60, 76, 82, 83, 85, 87,  
101, 112, 119, 120, 124, 128,  
133, 139, 140, 141, 142, 143,  
145, 146, 147, 148  
Pematung 10  
pembagian kerja gender 24  
pembangunan ekonomi 13, 28, 83,  
87, 88, 110  
Pembangunan Nasional 40  
pembantu rumah tangga 67  
pemberdayaan 6, 9, 19, 22, 24, 37,  
44, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 95,  
111, 114, 131, 144, 146, 147,  
152, 153, 154, 155, 157, 176  
pemberdayaan ekonomi 9, 80, 84,  
85, 86, 88, 95, 153, 155, 157  
Pemberdayaan Kesejahteraan Kelu-  
arga 139  
pemberdayaan laki-laki 37  
pemberdayaan perempuan 6, 22,  
86, 87, 111, 131, 146, 147,  
176  
pembinaan 64, 85, 102, 123, 135,  
137

- Pemeriksaan IVA 77, 78
- pemerintah 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13,  
20, 26, 39, 40, 41, 42, 48, 49,  
53, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 69,  
74, 75, 78, 81, 82, 83, 84, 86,  
87, 91, 95, 99, 100, 102, 106,  
109, 110, 112, 113, 115, 116,  
117, 118, 119, 122, 123, 128,  
130, 131, 132, 140, 141, 142,  
145, 146, 148, 151, 152, 154,  
155, 156, 157
- pemerintah daerah 7, 8, 9, 20, 75,  
83, 86, 91, 95, 102, 113, 119,  
122, 123, 130, 140, 146, 148,  
152, 155, 156
- pemerintah lokal 57, 95
- pemetaan 16, 24, 64
- pemintalan benang 71
- pemuda 28
- penciptaan 4, 12, 13, 14, 69
- pendampingan 65, 112, 133
- pendapat 153
- pendayagunaan 64
- pendekatan gender 20
- pendekatan kelompok 41
- penderitaan 26
- pendidikan 27, 28, 67, 68, 75, 173,  
175
- pendidikan politik 75
- penenun 7, 29, 36, 37, 44, 48, 52,  
58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71,  
73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,  
82, 83, 85, 86, 87, 93, 95,  
102, 106, 107, 108, 109, 111,  
114, 116, 121, 122, 124, 126,  
127, 128, 129, 130, 132, 133,  
134, 135, 136, 137, 138, 139,  
140, 143, 144, 146, 147, 148,  
149, 153, 154, 155, 156, 157
- penenun perempuan 48, 74, 76, 78,  
79, 81, 82, 83, 85, 109, 139,  
155
- penerbitan 14, 18
- pengalaman baru 71
- pengambilan keputusan 25, 26, 27,  
48, 75, 104, 105, 112
- Pengarang 10
- Pengarang Lagu 10
- pengarusutamaan gender 40, 101
- Pengarusutamaan Hak Anak 101
- pengasuhan anak 80, 149
- pengembangan ekonomi kreatif 2,  
4, 20, 40, 41, 42, 44, 52, 61,  
72, 112, 119, 148
- Pengembangan Ekonomi Lokal 83,  
86, 140
- pengentasan kemiskinan 52, 154
- pengetahuan 7, 15, 16, 18, 19, 28,  
69, 71, 82, 120, 156, 157
- pengetahuan baru 71
- pengetahuan manajerial 82
- pengetahuan seni 71
- penghapusan diskriminasi 80
- pengolahan makanan 10
- penguatan kapasitas 75, 82, 144,  
145
- penguatan nilai 7
- pengurangan beban 80
- penjaga tradisi 94, 122, 129, 146
- penopang ekonomi keluarga 105,  
116, 127
- penyebaran pengetahuan 28
- penyerapan 2, 5, 62, 64
- perajin 9, 60, 61, 67, 68, 72, 87, 125,  
128, 131, 140
- perajin tenun 9, 67
- peran domestik 27, 68, 138
- peran dominan perempuan 123

peran ekonomi kreatif 59  
 peran ganda 37, 39, 42, 48, 67, 84, 110  
 peran ganda-tiga 37  
 peran gender 24, 25, 47, 104, 105, 157  
 perangkat 14, 24, 27, 101  
 peran kaum perempuan 67  
 peran komunitas 37, 41, 42, 112, 151, 152, 154, 156  
 peran laki-laki 76, 107  
 peran lipat tiga 72  
 peran media sosial 61  
 peran perempuan 23, 29, 68, 74, 93, 106, 110, 139, 151, 156  
 peran produksi 100, 101, 106, 151, 154, 156  
 peran produktif 24, 27, 40, 42, 44, 61, 152  
 peran reproduksi 37, 100, 101, 104, 106, 112, 116, 151, 152, 154, 156  
 peran tenun 91  
 peranti lunak 18  
 peraturan 9, 14, 20, 28, 42, 54, 55, 61, 99, 118, 119  
 percetakan 5, 11, 18  
 perdesaan 62  
 perekayasaan 62  
 perekonomian 15, 29, 48, 58, 61, 67, 68, 73, 78, 88, 99, 137  
 perempuan 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 173, 176  
 perempuan penenun 29, 37, 44, 52, 68, 69, 70, 80, 87, 108, 109, 116, 121, 122, 126, 127, 128, 130, 132, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 153, 157  
 perencanaan 16, 17, 22, 23, 24, 26, 39, 40, 73, 83, 86, 87, 101, 106, 110, 112, 115, 116  
 perencanaan gender 24, 106  
 perencanaan intersektoral 105  
 perencanaan pembangunan 24, 26, 83, 86, 101, 112  
 periklanan 5, 11, 14, 16  
 periodik 10  
 perkebunan kapas 81, 109  
 perkembangan 1, 7, 12, 20, 22, 28, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 93, 100, 122, 134, 137, 139  
 perkotaan 62  
 permainan 10, 17, 60  
 permainan interaktif 17  
 permainan komputer 17  
 perpustakaan 10  
*personal is political* 121  
 perspektif 3, 16, 20, 21, 27, 52, 91, 104, 119, 120, 151  
 perspektif gender 20, 21, 91, 119, 151  
 pertukaran 10, 11, 156  
 pertumbuhan 3, 4, 5, 19, 64

pertunjukan 14, 16, 17, 19  
 perubahan relasi gender 127, 128,  
 139, 155  
 perusahaan 10, 13, 17, 60, 62, 109  
 pewarna alami 58, 109  
 pewarnaan 69, 111, 122, 123, 131,  
 132, 133, 135, 157  
 pewarnaan alam 123, 133  
*planning for balancing the triple role*  
 23, 72  
*platform* 6, 50  
 popular space 115, 116  
 porsi 141, 146  
 posisi tawar 43, 139  
 potensi 2, 3, 14, 20, 36, 42, 60, 61,  
 63, 66, 70, 99, 101, 113, 129  
 potensial 60, 66, 113  
 potensi ekonomi kreatif 60  
 potensi kerajinan 61  
 potensi lokal 101  
 potret 99  
*power* 21, 23, 72, 120  
*power relations* 120  
 praktik budaya 152  
 preservasi 100, 152, 154, 155  
 preservasi budaya 100, 152, 154,  
 155  
 prioritas program 80, 114  
*priviledge* 37  
 proaktif 87  
*productive role* 152  
 produk budaya 141  
 Produk Domestik Bruto 1  
 produk fesyen 4, 17, 59  
 produk kerajinan 17, 40, 60, 66,  
 141, 144  
 produk olahan 66  
 produksi 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18,  
 22, 26, 27, 37, 42, 60, 62, 66,  
 71, 74, 76, 84, 85, 93, 95,  
 100, 101, 102, 106, 109, 112,  
 128, 130, 136, 141, 147, 148,  
 151, 154, 156, 157  
 produksi film & video 10  
 produksi massal 14, 141, 148  
 produksi musik 10  
 produksi ornamen 11  
 produksi tenun 74, 76, 84, 85, 93,  
 106, 112, 156  
 produk tekstil 7, 41  
 produk tenun 66, 95, 156  
 produktif 24, 25, 27, 40, 42, 43, 44,  
 61, 112, 152  
 produktivitas 5, 85  
 profesi 68  
 program 22, 23, 27, 39, 40, 47, 48,  
 72, 80, 83, 84, 85, 86, 100,  
 108, 110, 111, 112, 114, 116,  
 130, 135, 155, 157  
 program infrastruktur 114  
 program nonpemerintah 40  
 progres 80  
 properti 25  
*property right* 95  
 prospek 92  
 proteksi 100, 109  
 Provinsi Nusa Tenggara Barat 31,  
 42, 60, 66, 88, 119  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur 9,  
 32, 43, 54, 55, 91, 99, 118,  
 141, 142  
*public speaking* 81  
*public value* 52  
 publik 11, 16, 21, 52, 76, 105, 107,  
 115, 121, 153, 154  
 Puskesmas Ramah Anak 100

## R

radio & TV 10  
ramah lingkungan 4, 111, 122  
rasional 68, 157  
rasionalitas 2, 151  
realisasi 85, 114  
regional 4, 28, 35, 49, 51  
*regional governance* 28  
regulasi 28, 48, 99  
rekaman audio 10  
rekomendasi 49, 51  
relasi gender 48, 117, 120, 121, 122,  
124, 126, 127, 128, 138, 139,  
146, 147, 148, 149, 155, 156,  
157  
relasi perempuan dan laki-laki 105,  
121  
remaja putri 67  
Renggo 98  
renovasi 72  
Reok 95  
reproduksi 22, 37, 43, 100, 101, 104,  
106, 107, 112, 116, 151, 152,  
154, 156  
reproduktif 24, 26, 27, 42, 43, 44,  
74, 101, 107  
respons 75, 80, 99, 100, 142  
responsif gender 8, 9, 45, 84  
Responsivitas Kebijakan 46  
restoran-katering 10  
*rigid* 107  
riset dan pengembangan 5, 18  
ritel 17, 60  
ritual 6, 93, 95, 121, 146  
ritual adat 6, 121  
roda pembangunan 61  
rotan 60  
ruang narasi perempuan 93, 95

ruang publik 153, 154  
rumah tangga 21, 23, 24, 25, 26, 42,  
44, 67, 68, 72, 73, 78, 81, 84,  
101, 104, 105, 107, 108, 112,  
124, 125, 127, 128, 129, 130,  
132, 135, 137, 138, 143, 146,  
147, 153, 156, 157

## S

sains 18  
saluran irigasi 85, 114  
sandang 35  
sanksi adat 92  
Sarung Gajah 97  
Satar Mese 95  
Sekolah Ramah Anak 100  
sektor ekonomi 59, 60, 61, 86  
sektor ekonomi kreatif 59, 60, 86  
sektor kebudayaan 12  
sektor kerajinan 61, 95  
sektor kuliner 60  
sektor pariwisata 83, 141  
sektor pertambangan 66  
sektor pertanian 66, 68  
sektor swasta 39, 82  
sektor tenun 109  
sektor UMKM 49, 65  
Senai 96  
sendi kehidupan 49  
Seng Watola 97  
seni 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,  
40, 51, 60, 71, 107, 134, 138  
seni gerabah 71  
seni kerajinan 60  
seni kulineri 10  
Seniman 10  
seni pertunjukan 14, 16, 19  
seni visual 10

sentra 41, 42  
 sentra industri kecil 42  
 sentral 6, 37, 52, 91, 93, 151, 157  
 serat alam 60  
 serat jute 41  
 serat nabati 41  
 serikat pekerja 82  
 serikat perempuan 82  
 signifikan 2, 3, 7, 12, 13, 19, 39, 51,  
 59, 63  
 simbol rekonsiliasi konflik 92  
 simbol strata sosial 92  
 simpanan pokok 74  
 simpanan wajib 74  
 sinkronisasi 111, 112  
 sistem 10, 11, 18, 67, 116, 149  
 Sistem Ekonomi Kreatif 10  
 situasi baru 71  
*social prestige* 92  
 Solor Barat 97  
 Solor Selatan 97  
 Songke Mata Manuk 95  
 songket 69, 70  
 songket tenun 69  
 sorotan 7  
 sosial budaya 49, 52  
 sosial ekonomi 113, 114, 121  
 sosialisasi 19, 72  
 Sotis 98  
 spesies 157  
*stakeholder* 26, 86  
 standar ganda 37  
 statistik gender 101  
 status ekonomi 67  
 status sosial 6, 36  
 strata 92, 93  
 strategi ekonomi 67  
 strategis gender 37, 39, 72, 105  
 struktural 2, 4, 116  
 struktur kelembagaan 28, 120  
 suara perempuan 113, 115, 154  
 subetnis 95  
 subsektor 4, 6, 16, 18  
 suku 95, 145  
 sulaman 40  
 sumber daya 4, 18, 21, 23, 24, 25,  
 26, 27, 45, 46, 47, 48, 51, 59,  
 64, 68, 72, 75, 81, 104, 105,  
 108, 109, 110, 130, 133, 138,  
 139  
 sumber daya alam 18, 27, 64, 81,  
 105, 108  
 sumber daya ekonomi 59, 133, 138  
 sumber daya insani 4  
 sumber daya manusia 18, 64, 130  
 sumber daya perempuan 75  
 sumber ekonomi 61  
 sumber mata pencaharian 68, 123,  
 124  
 sumber penghasilan 73  
*sustainable* 49, 53, 55  
 sutra 41  
 souvenir 85, 87, 141, 142

**T**

Talae 98  
 talenta 5, 18  
 tali rafia 71  
 Tanapi 97  
 tanggung jawab 127, 129, 146  
*tangible* 15, 93  
 tantangan 2, 29, 36, 37, 72, 92, 111,  
 112, 122, 130, 146, 148  
 taraf hidup 19  
 tata kelola global 28  
 teknologi 16, 18, 27, 28, 51, 52, 66,  
 67, 69, 71

teknologi baru 18, 71  
 teknologi digital 51, 52  
 teknologi informasi 18, 66, 69  
 tekstil 7, 41, 62  
 tempat tinggal 78  
 temuan 9, 48, 138  
 tenaga kerja 2, 3, 5, 20, 27, 48, 62,  
 64, 72, 99  
 tenaga kerja perempuan 20, 99  
 tenun 1, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 26, 29, 35,  
 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
 48, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 59,  
 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70,  
 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80,  
 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89,  
 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100,  
 101, 102, 104, 105, 106, 107,  
 108, 109, 110, 111, 112, 114,  
 116, 117, 118, 119, 120, 121,  
 122, 123, 124, 125, 126, 127,  
 128, 129, 130, 131, 132, 133,  
 134, 135, 136, 137, 138, 139,  
 140, 141, 142, 143, 144, 145,  
 146, 147, 148, 151, 152, 153,  
 154, 155, 156, 157  
 tenun ikat 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44, 69,  
 70, 71, 95, 99, 105, 108, 110,  
 111, 118, 129, 130, 132, 133,  
 134, 141  
 Tenun Ikat “Bahagia” 102  
 Tenun Ikat “Bougenvile” 103  
 Tenun Ikat “Cendana” 102  
 Tenun Ikat “Cinta Karya” 102  
 Tenun Ikat “Ina Ndao” 102  
 Tenun Ikat “Intan Indah” 103  
 Tenun Ikat “Lamaholot” 103  
 Tenun Ikat “Mandiri” 103  
 tenun ikat motif 43, 44, 99  
 Tenun Ikat “Ruba Deo” 102  
 Tenun Ikat “Ruba Muri” 103  
 Tenun Ikat “Sadi Soda 1” 103  
 Tenun Ikat “Sadi Soda 2” 103  
 Tenun Ikat “Sadi Soda 3” 103  
 Tenun Ikat “Sadi Soda 4” 103  
 Tenun Ikat “Sadi Soda 5” 103  
 Tenun Ikat “St. Yosep 7” 103  
 Tenun Ikat “Sutra Mandiri” 103  
 Tenun Ikat “Tulu Ruba” 102  
 Tenun Ikat “Venty” 103  
 tenun songket 70  
 Tenun Todo 95  
 tenun tradisional 7, 40, 69, 76, 95,  
 99, 116, 154, 157  
 Termanu 98  
 terobosan 52, 66  
 terpadu 1, 64  
*The Access and Control Profile* 21  
*The Activity Profile* 21  
 Thie 98  
 tiang desa 74  
 tiang siar 51  
 tingkat kemiskinan 3, 28  
 tingkat pendidikan 68  
 Titehena 97  
 toko kerajinan 87  
*tradable economic goods* 12  
 tradisi 6, 11, 12, 19, 36, 60, 72, 92,  
 93, 94, 121, 122, 127, 129,  
 146, 152, 153  
 tradisi sosial 72  
 transaksi 66  
 transformasi 4, 71, 93, 111, 117,  
 153, 154, 157  
 trendi 59

*triple* 22, 23, 26, 72, 104, 105, 106,  
116, 117, 127, 128, 138, 147,  
148, 151  
*triple role* 22, 23, 26, 72, 104, 105,  
116, 117  
tugas domestik 147  
tulang punggung 87  
tumbuh-tumbuhan 59  
tunai 25, 66, 75  
turun temurun 61, 67, 73, 124

## U

UKM 36, 39, 62, 63, 64, 65, 66, 87,  
111  
Ula Age 97  
Ulos 93  
Uma Kalada 98  
UMKM 2, 19, 20, 30, 36, 41, 48, 49,  
65, 66, 89  
*union* 82  
universal 11  
unsur keindahan 57  
Usaha Kecil Menengah 65  
Usaha Mikro 2, 30, 41, 43, 49, 54,  
65  
Usaha Mikro Kecil 2, 49  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
2, 49

usaha rumahan 35, 39  
usaha tenun 36, 40, 41, 49, 52, 105  
usaha tenun ikat 105

## V

visi 11  
volume 130

## W

Wai Manu 96  
warisan 16, 17, 19, 20, 36, 37, 57,  
93, 95, 155  
warisan budaya 16, 19, 20, 36, 37,  
57, 93, 155  
warisan sejarah 155  
warisan tradisional 19  
watak 100  
Watowiti 97  
*weightless economy* 13  
*welfare approach* 105  
wilayah tertinggal 67  
wirausaha 87  
wisata lokal 119  
wisatawan mancanegara 66  
Wolajita 96  
Wolowaru 96  
*Women in Development* 21, 37

# Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun: Perspektif Gender

**E**konomi kreatif tenun lekat dengan keterlibatan perempuan, yang pada awalnya memproduksi tenun untuk kepentingan kelestarian budaya. Di NTB dan NTT khususnya, jumlah perempuan penenun ditemui lebih banyak. Melihat potensi ekonomi kreatif di Indonesia khususnya desain fesyen yang menduduki peringkat kedua nilai tambah PDB nasional, perkembangan industri tenun patut dipertimbangkan. Meskipun demikian, kebijakan yang mendorong peningkatan peran perempuan dalam aktivitas produksi industri ini seyogianya diantisipasi.

Buku ini mengulas dua fokus tersebut: apakah pemerintah sudah mematangkan kebijakan yang mengembangkan jenis ekonomi kreatif ini, dan apakah arah kebijakan tersebut melindungi berbagai peran yang dijalankan perempuan. Dalam pendekatan dan kerangka analisis berbasis gender, kita akan melihat berbagai isu yang kemudian muncul.

Memberikan *best practices* dan *knowledge sharing*, buku ini sangat tepat dibaca untuk lebih memahami dinamika industri ekonomi kreatif berbasis tenun dan keterkaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Selain itu, buku *Perempuan dan Ekonomi Kreatif Tenun: Perspektif Gender* diharapkan dapat memperkaya buku-buku dengan tema sejenis di Indonesia, hingga menjadi masukan dalam penentu arah kebijakan.

*Selamat Membaca!*



Diterbitkan oleh:  
**Penerbit BRIN, Anggota Ikapi**  
**Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah**  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. MH. Thamrin No. 8,  
Kb. Sirih, Kec. Mentang, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: +62 811-1064-6770  
E-mail: penerbit@brin.go.id  
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.588



e-ISBN 978- 623-8372-01-0



9 786238 1372010